

LAPORAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA



18 Mei - 5 Juni 2026

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA
KRISTEN INDONESIA**

Penulis:

Tim Penyusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Penerbit:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Raya Puncak KM 83, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16750, Telp. (021)
2352 9000

Hak Cipta ©2026 Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Heru Setiawan

Penanggung Jawab:

Mundiri

Pengolah Data:

Santhy Kustrihardiani

Santi Widiastuti

Hadian Taofik Rochman

Chafid Sugianto

Angga Putri Gardina

Penulis Naskah:

Chafid Sugianto

Angga Putri Gardina



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus dan/atau anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia mengenai Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami. Selain itu, laporan ini juga sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

Bogor, 28 Juni 2026

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2 Tujuan	5
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	6
B.1. Nama Kegiatan.....	6
B.2. Waktu dan Tempat	6
B.3. Peserta Kegiatan.....	6
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	9
B.5. Uraian Kegiatan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	13
C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran	13
C.2. Efektivitas Pembelajaran.....	14
C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	16
D. HAMBATAN.....	24
E. PENUTUP.....	24
F. LAMPIRAN	25



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Bahan Penjelasan Teknis
4. Bahan Penjelasan MKLC
5. Kumpulan Materi Narasumber
6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
7. Kumpulan Surat Tugas
8. Daftar Hadir Peserta
9. Rekapitulasi Data Peserta Pembelajaran
10. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
11. Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas Pembelajaran
12. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan
13. Dokumen Perjanjian Kerjasama
14. Laporan Keuangan



PENDAHULUAN



mklc.mkri.id



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

18 MEI S.D. 05 JUNI 2026

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana berat lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain menjalankan peran fundamentalnya sebagai penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi strategis sebagai institusi yang berperan dalam memberikan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat luas. Melalui penyusunan putusan-putusan yang argumentatif, sistematis, dan mudah dipahami, serta didukung oleh kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai hak-hak konstitusional warga negara dan pentingnya menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan supremasi hukum. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai sengketa konstitusional yang berpotensi timbul dalam praktik ketatanegaraan, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, keberadaan dan peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada fungsi yudisial semata, tetapi juga mencakup fungsi edukatif yang berkontribusi pada penguatan budaya sadar berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif kelembagaan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki kepentingan strategis dan normatif terhadap setiap upaya yang diarahkan untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, yakni norma dasar negara yang menjadi sumber legitimasi sekaligus landasan filosofis bagi keseluruhan bangunan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneguhan nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya dipahami sebagai agenda ideologis, melainkan juga sebagai kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa praktik ketatanegaraan senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Orientasi ini sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi melalui peradilan konstitusi yang merdeka. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui serangkaian misi kelembagaan, antara lain peningkatan kualitas putusan dan kesadaran berkonstitusi



penyelenggara negara dan warga negara, serta memperkuat independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi yang modern.

Dalam kerangka tersebut, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pengujian undang-undang terhadap konstitusi, atau penanganan perselisihan hasil pemilihan umum semata. Kewenangan ini juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas dalam membangun kultur konstitusional di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap tumbuhnya kesadaran berkonstitusi menjadi bagian inheren dari fungsi kelembagaan Mahkamah, sebab keberhasilan penegakan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan peradilan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan warga negara terhadap nilai, norma, serta prinsip-prinsip konstitusi. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang memadai akan menunjukkan sikap aktif dalam menghormati hukum, berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis, serta memahami dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, di samping menjalankan perannya sebagai *the guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi secara substansial juga memerankan fungsi sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights*, yaitu pelindung hak konstitusional warga negara. Peran ganda ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga sebagai agen edukatif dan transformasional yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, berdaya secara konstitusional, serta berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demokratis. Melalui pendekatan yang integratif antara fungsi peradilan dan penguatan literasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menciptakan tata kelola ketatanegaraan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara yang dilaksanakan secara sistematis oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan ini dimaksudkan untuk membekali warga negara dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi, serta mekanisme perlindungan hak konstitusional, sehingga mereka tidak hanya memahami posisinya sebagai subjek hukum, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis serta mengawal penyelenggaraan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan demikian, pendidikan konstitusi menjadi



instrumen strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi (*constitutional awareness*) sekaligus membentuk budaya hukum (*constitutional culture*) yang bermartabat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya kebutuhan akan akses pembelajaran yang lebih luas, inklusif, dan fleksibel, Mahkamah Konstitusi memandang perlunya inovasi dalam metode penyampaian pendidikan konstitusi. Dalam konteks tersebut, pembangunan media pembelajaran e-learning berupa Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. MKLC dirancang sebagai *platform* digital yang menyediakan materi pembelajaran terstruktur dan dilengkapi dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Kehadiran MKLC tidak hanya meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan secara kuantitatif, tetapi juga memperkaya kualitas pembelajaran melalui pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis teknologi.

Dengan tersedianya MKLC, upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara semakin masif melalui mekanisme edukasi yang berkelanjutan dan berdaya jangkau nasional. *Platform* ini memungkinkan terwujudnya pemerataan akses pengetahuan konstitusi bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur penyelenggara negara, pendidik, mahasiswa, dan komunitas warga negara di daerah terpencil, sehingga kesenjangan literasi konstitusi dapat diminimalkan. Pada akhirnya, integrasi antara fungsi peradilan konstitusi dan pengembangan media pembelajaran digital tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk membangun ekosistem pendidikan konstitusi yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi dalam terciptanya tatanan konstitusi yang bermartabat.

Adapun proses pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dilaksanakan menggunakan media pembelajaran *e-learning* yang diberi nama MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*). Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan format penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara.



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PELAKSANAAN KEGIATAN



mklc.mkri.id



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia”.

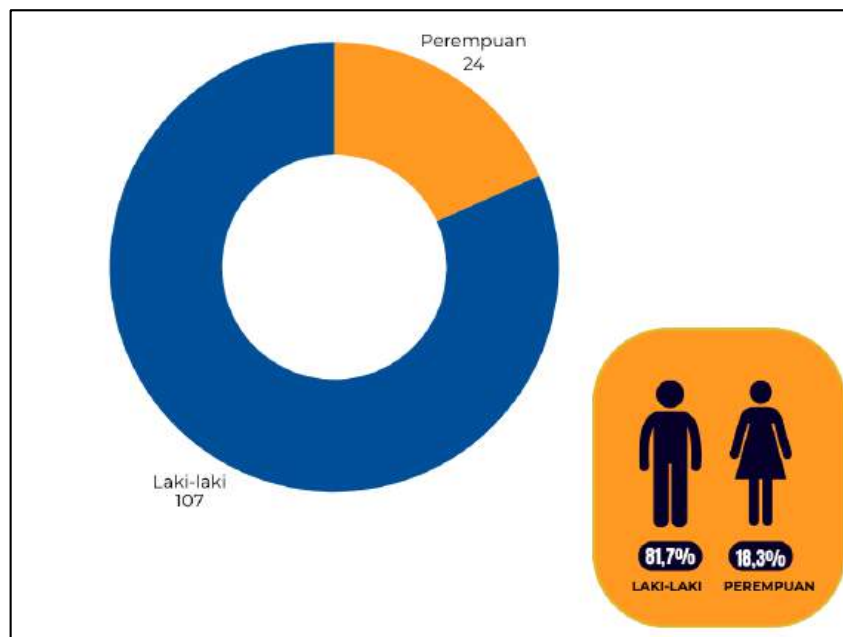
B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 18 Mei s.d. 05 Juni 2026 dengan menggunakan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* MKLC.

B.3. Peserta Kegiatan

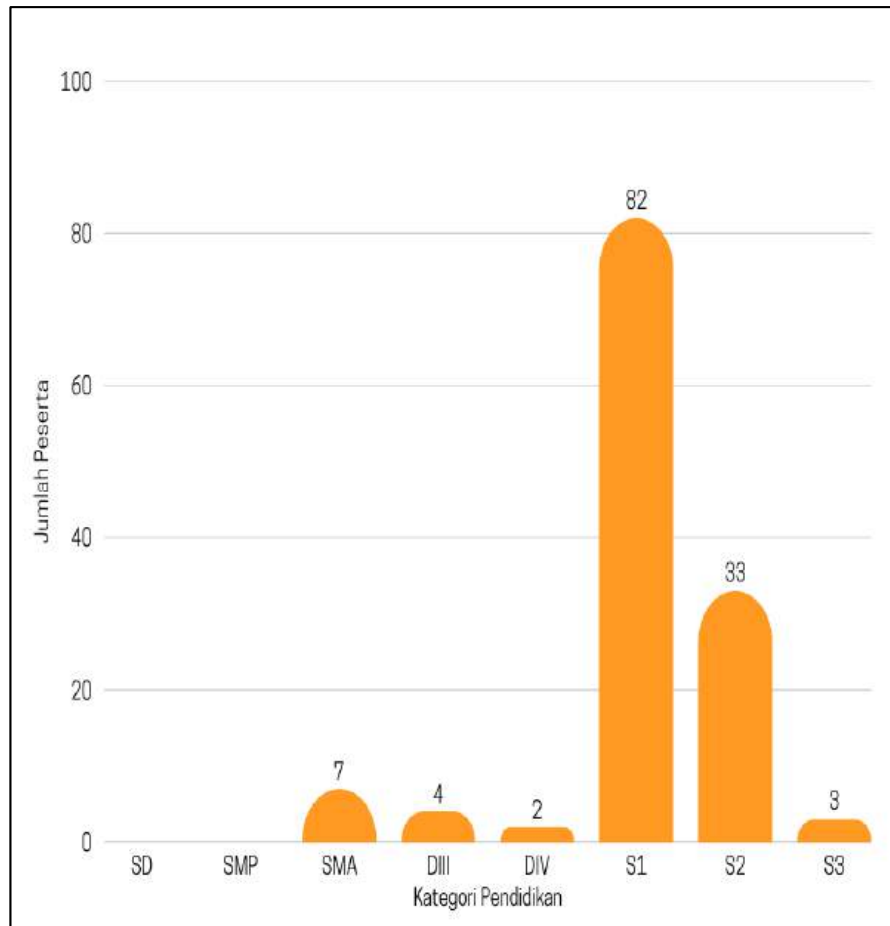
Peserta yang mendaftar dalam program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sebanyak 180 orang. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dalam kegiatan tersebut melalui MKLC dan dinyatakan lulus berjumlah 131 orang. Berikut adalah grafik sebaran peserta yang menyelesaikan pembelajaran dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia:

Grafik 1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas bahwa persebaran peserta berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi kelompok laki-laki. Secara rinci, terdapat 107 orang peserta laki-laki yang merepresentasikan 81,7% dari total peserta yang lulus. Sementara itu, kelompok perempuan berjumlah 24 orang atau sebesar 18,3% dari total peserta yang lulus.

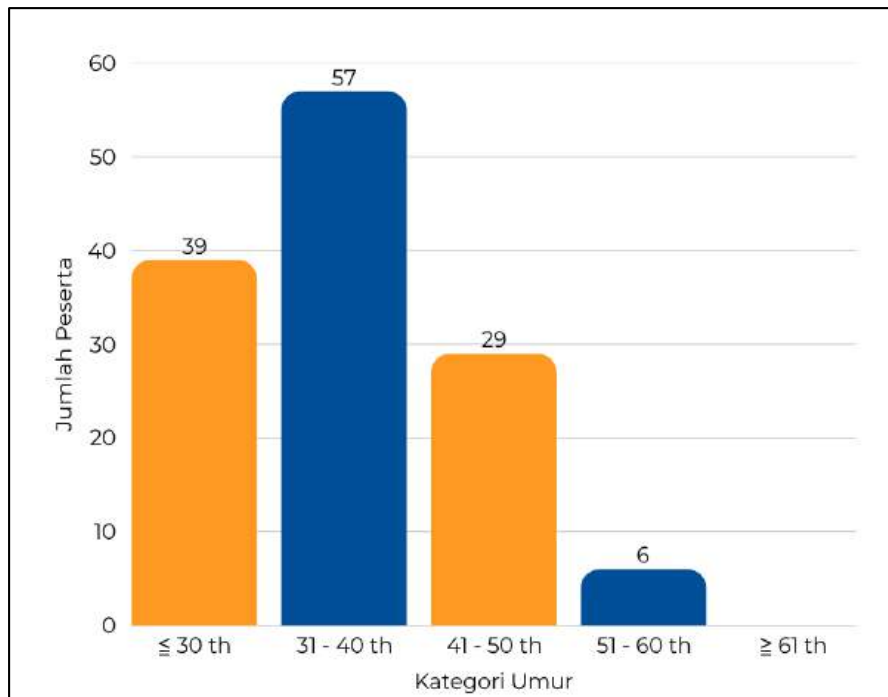
Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Pendidikan



Dilihat dari karakteristik latar belakang pendidikan pada Grafik 2, program ini diikuti oleh peserta dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Doktor (S3). Kelompok lulusan Sarjana (S1) menjadi konstituen terbesar dengan jumlah 82 orang, selanjutnya disusul oleh kelompok lulusan Pascasarjana (S2) dengan jumlah 33 orang. Terdapat peserta dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 7 orang, lulusan Diploma Tiga (DIII) berjumlah 4, dan Doktor (S3) berjumlah 3 orang. Kelompok dengan jumlah paling sedikit dimiliki oleh lulusan Diploma Empat (DIV) sebanyak 2 orang.

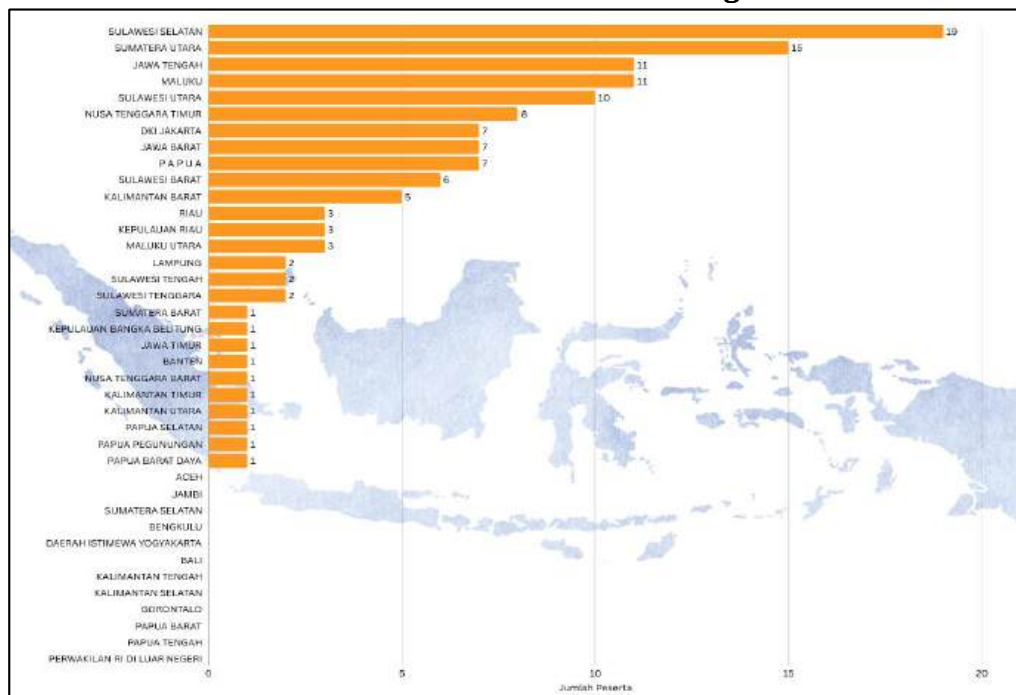


Grafik 2. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur



Karakteristik peserta berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa program ini didominasi oleh kelompok usia produktif. Sebaran data menunjukkan bahwa peserta dengan usia 31 – 40 tahun merupakan kelompok terbesar dengan jumlah 57 orang. Posisi berikutnya diikuti oleh kelompok usia ≤ 30 tahun sebanyak 39 orang, kelompok usia 41 – 50 tahun sebanyak 29 orang, dan kelompok usia 51 – 60 tahun sebanyak 6 orang.

Grafik 4. Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Provinsi



Berdasarkan data pada grafik di atas, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi kontributor utama dengan jumlah terbanyak yaitu 19 orang. Setelah itu disusul oleh Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah peserta 15 orang, Jawa Tengah dan Maluku dengan jumlah masing-masing 11 orang, dan Sulawesi Utara dengan jumlah 10 orang. Sementara itu juga terdapat peserta yang berasal dari provinsi lainnya yaitu dari Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta mendapatkan bahan materi berupa video dan PowerPoint yang dapat diakses kembali kapan saja dan dimana saja melalui akun MKLC peserta.
- b. E-Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang menyelesaikan pendidikan sampai akhir (100%).

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dilaksanakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan media pembelajaran *e-learning* MKLC dengan alamat web mklc.mkri.id. Media pembelajaran ini dapat diakses menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung dengan internet. MKLC disusun sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi. Melalui MKLC, kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih menjangkau area yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Seluruh peserta mengikuti sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mundiri. Peserta dijelaskan terkait kurikulum pendidikan, jadwal, dan ketentuan terkait pemberian e-



sertifikat. Setelah sesi tersebut, peserta dipandu oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Bapak Chafid Sugianto untuk bersama-sama mengakses MKLC dan memulai pengerjaan soal *pre test*. Acara dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan pendidikan yang dihadiri oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. pada Senin, 18 Mei 2026 pukul 16.00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Pendidikan berlangsung cukup lama yaitu selama 19 hari kalender. Peserta secara mandiri mendaftar di kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan menyelesaikan pembelajaran. Pendidikan ditutup pada tanggal 5 Juni 2026.

B.5.2. Tutorial Penggunaan MKLC

MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*) merupakan media pembelajaran berbasis *e-learning* yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh warga negara Indonesia belajar tentang Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. MKLC dapat diakses dengan menggunakan laptop/PC/*smartphone* yang tersambung dengan internet. Video tutorial lengkap penggunaan MKLC dapat diakses melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=Z3u5DyXVVIM>. Berikut akan dijabarkan langkah-langkah untuk mengakses MKLC, yaitu:

- a. Pastikan laptop/PC/gawai yang digunakan telah tersambung dengan internet;
- b. Buka browser dan ketik mklc.mkri.id;
- c. Pilih menu “Daftar” di pojok kanan atas. Isi data sesuai ketentuan, lalu pilih “Daftar Sekarang”;
- d. Akan ada *email* verifikasi yang dikirimkan ke alamat *email* peserta;
- e. Periksa *email* masuk/spam di akun *email* yang telah didaftarkan;
- f. Buka *email* yang dikirimkan oleh Pusdik Mahkamah Konstitusi RI. Klik tombol “Verifikasi” pada *email* tersebut;
- g. Buka kembali browser dan ketik mklc.mkri.id;
- h. Pilih menu “Masuk” di pojok kanan atas. *Login* ke akun peserta menggunakan alamat *email* dan *password* yang telah dibuat;
- i. Lengkapi data diri. Jika telah selesai, pilih tombol “Update Data Diri” di bagian paling bawah.
- j. Pilih menu “Pendidikan” di bagian atas;



- k. Pilih kegiatan yang ingin diikuti;
- l. Klik tombol “Daftar”, lalu klik tombol “Lanjutkan”;
- m. Ikuti rangkaian kegiatan pendidikan secara berurutan mulai dari:
 - 1) Mengisi soal *Pre Test*;
 - 2) Mempelajari setiap bahan ajar yang disediakan dan pilih tombol "Klik Jika Selesai" dan tombol "Selanjutnya" untuk meneruskan ke materi selanjutnya;
 - 3) Mengisi *review* di setiap materi;
 - 4) Mengisi soal *Post Test*;
- n. Isi kuesioner evaluasi kegiatan;
- o. Unduh *e-sertifikat*. *E-sertifikat* akan tersedia setelah kegiatan berakhir.

B.5.3. Penyampaian Materi

Seluruh materi pada kegiatan ini disampaikan menggunakan media pembelajaran *e-learning* MKLC. Materi disampaikan dalam bentuk video dan PowerPoint yang dapat diakses darimana saja dan kapan saja melalui akun MKLC masing-masing peserta. Setelah peserta mempelajari seluruh bahan ajar di suatu materi, peserta akan diminta untuk mengerjakan soal *review* dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami suatu materi yang telah dipelajari. Sebagai penguatan pemahaman kepada peserta, terdapat 2 materi yang juga disampaikan secara daring melalui Zoom Meeting oleh narasumber yang ahli di bidangnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Mundiri

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Peserta akan mendapatkan narasi pengantar soal dan *template* penyusunan permohonan Undang-Undang. Setelah itu,



peserta akan diminta mengisi soal pilihan ganda untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang.

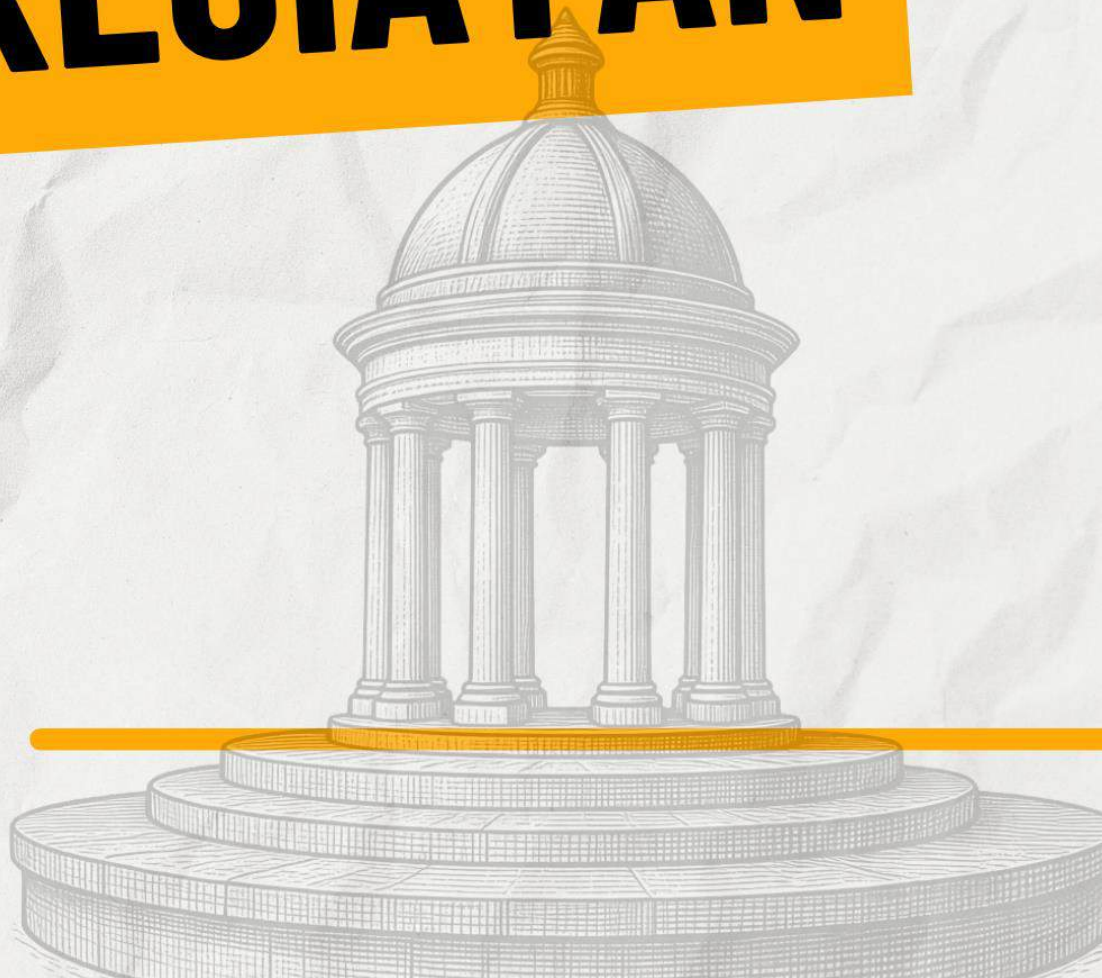
Terdapat 8 materi yang dipelajari oleh peserta melalui media pembelajaran *e-learning* MKLC, yaitu:

1. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila;
2. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia;
3. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945;
4. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945;
5. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
6. Sistem informasi perkara elektronik;
7. Teknik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang;
8. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang.



HASIL EVALUASI KEGIATAN

mklc.mkri.id



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran

Dalam upaya untuk memastikan objektivitas dalam menilai sejauh mana peserta menyerap materi yang disampaikan, panitia menerapkan standar penilaian yang komprehensif. Evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pembelajaran tidak hanya dilakukan di akhir sesi, tetapi juga mencakup *review* melalui tes formatif. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi program diukur melalui sistem penilaian terbobot yang mengombinasikan dua instrumen evaluasi utama:

1. Tes Formatif (*Review*): Berfungsi sebagai evaluasi berkala untuk memantau perkembangan peserta selama proses pembelajaran serta pemahaman peserta setiap materi pembelajaran. Nilai dari tes ini berkontribusi sebesar 20% terhadap nilai akhir. Terdapat 6 materi yang memiliki tes formatif dan 2 materi yang tidak memiliki tes formatif. Adapun materi yang diukur dalam tes formatif antara lain:
 - a. Reaktualisasi implementasi nilai-nilai Pancasila jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - b. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - c. Sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - d. Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - e. Mahkamah Konstitusi dan hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 jumlah 5 soal dengan nilai bobot maksimal 10;
 - f. Praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang jumlah 10 soal dengan nilai bobot maksimal 10.



2. Tes Sumatif (*Post-Test*): Berfungsi sebagai evaluasi akhir untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai. Nilai ini memiliki bobot dominan sebesar 80%. Tes Sumatif menggunakan mekanisme 10 soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta pembelajaran terhadap seluruh materi yang telah dipelajari. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan.

Penghitungan nilai akhir Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dilakukan dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Tingkat Pemahaman} \\ \text{Peserta} \\ \text{Pembelajaran} \end{array} = (\bar{x} \text{ Tes Formatif} \times 20\%) + (\bar{x} \text{ Tes Sumatif} \times 80\%)$$

Hasil perhitungan Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia adalah Skor **87,60** (rekapitulasi perhitungan terlampir). Adapun skor yang digunakan dalam tingkat pemahaman peserta pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (0-40: kurang); (41-60: cukup); (61-80: baik); dan (81-100: sangat baik). Hasil perhitungan nilai tes formatif dan tes sumatif di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta pembelajaran termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Efektivitas Pembelajaran

Indikator Efektivitas Pembelajaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana intervensi pendidikan atau pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Penggunaan metode *Normalized Gain (N-Gain)* dipilih karena mampu menormalisasi perbedaan kemampuan awal peserta, sehingga efektivitas diukur berdasarkan proporsi peningkatan pengetahuan yang berhasil dicapai dari total potensi peningkatan yang tersedia. Mengingat profil peserta yang bersifat heterogen, baik dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, maupun pemahaman awal terhadap materi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah *baseline* (Nilai Maksimal – Nilai *Pretest*) sebagai titik



acuan awal. Penggunaan *baseline* ini memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, di mana efektivitas diukur bukan dari siapa yang meraih nilai tertinggi, melainkan dari seberapa besar peningkatan pengetahuan yang dihasilkan oleh proses pembelajaran terhadap masing-masing individu.

Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas pembelajaran adalah:

$$\text{Efektivitas Pembelajaran} = \frac{\bar{x} (\text{Nilai Post Test} - \text{Nilai Pre Test})}{\bar{x} (\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Pre Test})} \times 100$$

Sebagai catatan dalam perhitungan indikator tersebut, peserta yang telah mencapai nilai *baseline* maksimal (Nilai 10) pada tahap *pretest* akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (*potential gain* sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

Hasil evaluasi peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh rata-rata kenaikan skor (gap) sebesar **1,82 poin**, yang menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran peserta mengalami peningkatan pemahaman dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan. Untuk melihat efektivitas pembelajaran secara lebih proporsional terhadap kemampuan awal peserta, dilakukan pula analisis menggunakan *Normalized Gain (N-Gain)*. Hasil perhitungan pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia menunjukkan nilai 0,54 yang menurut klasifikasi Hake (1998) termasuk dalam kategori efektivitas sedang.

Nilai N-Gain sebesar 0,54 menunjukkan bahwa proses pembelajaran mampu memanfaatkan sekitar **53,88%** dari potensi peningkatan pemahaman yang mungkin dicapai peserta. Adapun presentase yang digunakan dalam efektivitas pembelajaran diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut (< 30%: rendah); (30% - 70%: sedang); dan (> 70%: tinggi). Dengan demikian, peningkatan skor sebesar 1,82 poin tidak hanya menunjukkan adanya perubahan pengetahuan secara signifikan, tetapi juga mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan telah berjalan **efektif** dalam meningkatkan pemahaman peserta.



C.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan Sistem Informasi Pendidikan (MKLC). Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang telah menyelesaikan pembelajaran dengan memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan substansi pembelajaran didapatkan dari 1 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:

A. UNSUR KOMPETENSI

1) Kemudahan Memahami Modul (Bahan Bacaan):

Indikator ini mengevaluasi kualitas struktur bahasa dan penyajian narasi dalam modul. Skor pada poin ini mencerminkan apakah bahan bacaan telah disusun secara sistematis sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta tanpa hambatan kognitif yang berarti.



2) Efektivitas Materi PowerPoint:

Pengukuran difokuskan pada aspek visual dan ringkasan informasi. Materi presentasi dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyederhanakan konsep yang kompleks menjadi poin-poin krusial yang mudah diingat dan dipahami secara cepat.

3) Kemanfaatan Informasi:

Indikator ini mengukur nilai guna materi bagi peserta. Evaluasi ini memastikan bahwa substansi yang diajarkan memiliki korelasi positif terhadap peningkatan wawasan atau keterampilan praktis peserta di lapangan.

4) Relevansi dengan Tujuan Pendidikan:

Narasi ini menjelaskan sejauh mana keselarasan antara isi materi dengan kurikulum dan tujuan yang ditargetkan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh komponen pembelajaran tetap berada pada jalur pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.

5) Validitas Soal *Review* per Materi:

Mengukur ketepatan instrumen evaluasi jangka pendek dalam memetakan pemahaman peserta terhadap setiap materi. Ini berfungsi sebagai kontrol kualitas instan untuk mendeteksi bagian materi mana yang telah dikuasai atau masih memerlukan pendalaman.

6) Validitas Soal *Pre* dan *Post-Test*:

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat tes mampu secara objektif mengukur gap pengetahuan sebelum dan sesudah pembelajaran sehingga perubahan kompetensi dapat terdokumentasi dengan akurat.

7) Komunikasi dan Kemudahan Pemahaman Video:

Narasi indikator ini mendeskripsikan kualitas performa narasumber dalam mengemas materi ke dalam media video. Penilaian mencakup artikulasi, gaya bahasa yang komunikatif, serta kemampuan narasumber dalam membangun koneksi instruksional dengan peserta melalui layar, sehingga materi terasa lebih hidup dan mudah diserap.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pembelajaran didapatkan dari 6 penilaian unsur berisi beberapa variabel yang terdiri dari:



A. UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN

1) Kemudahan Persyaratan Keikutsertaan:

Indikator ini mengevaluasi aspek administratif dan teknis pendaftaran. Narasi ini menekankan pada upaya institusi dalam mereduksi hambatan birokrasi, sehingga proses inklusi peserta ke dalam sistem pendidikan berjalan lebih efisien dan ramah pengguna.

B. UNSUR WAKTU

2) Fleksibilitas Waktu Pembelajaran:

Poin ini mengukur keunggulan metode *asynchronous* pada MKLC. Narasi difokuskan pada kemampuan platform dalam mengakomodasi jadwal peserta yang heterogen dan sibuk, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme dan ketersediaan waktu masing-masing tanpa mengurangi kualitas hasil belajar.

C. UNSUR PENGADUAN DAN SARAN

3) Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan "Halo MKLC":

Indikator ini mengukur performa helpdesk atau layanan bantuan dalam memberikan respons terhadap kendala peserta. Narasi difokuskan pada dua elemen krusial yaitu durasi waktu tunggu (kecepatan) dan kualitas solusi yang diberikan (ketepatan) untuk memastikan kelancaran proses belajar peserta.

D. UNSUR PROSEDUR

4) Komprehensivitas Panduan Penggunaan:

Indikator ini mengevaluasi sejauh mana petunjuk teknis yang disediakan mampu menjelaskan alur penggunaan platform secara utuh. Penekanan narasi berada pada aspek kemandirian peserta. Panduan yang baik memungkinkan peserta mengoperasikan MKLC tanpa perlu bantuan teknis yang intensif.

5) Efektivitas Menu Bantuan (QnA) sebagai Solusi Prosedural:

Pengukuran ini difokuskan pada relevansi konten tanya-jawab (QnA). Deskripsinya mencakup kemampuan fitur bantuan dalam memitigasi kebingungan peserta terkait prosedur administratif maupun teknis selama masa pendidikan.



E. UNSUR PRODUK

6) Kemudahan Akses Platform MKLC:

Indikator ini menilai aspek teknis aksesibilitas, termasuk stabilitas server, kecepatan pemuatan laman (*load time*), serta keramahan antarmuka platform saat diakses melalui berbagai perangkat (responsivitas perangkat).

F. UNSUR BIAYA

7) Transparansi Layanan Tanpa Biaya (Gratis):

Indikator ini mengonfirmasi komitmen institusi dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan akuntabel. Narasi ditekankan pada kepastian bahwa seluruh proses pengembangan kompetensi di MKLC dapat diakses sepenuhnya tanpa beban biaya apapun, sehingga menghilangkan hambatan finansial bagi peserta.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 1. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran			
UNSUR KOMPETENSI		3,66	Baik
1	Materi berupa bahan bacaan (modul) mudah dipahami	3,59	Baik
2	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	3,62	Baik
3	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,76	Sangat Baik
4	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	3,72	Baik
5	Soal <i>review</i> per materi mampu mengukur pemahaman peserta	3,67	Baik
6	Soal <i>pre</i> dan <i>post</i> test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	3,67	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
7	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	3,60	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran		3,66	Baik
Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran			
UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN		3,68	Baik
8	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	3,68	Baik
UNSUR WAKTU		3,76	Sangat Baik
9	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	3,76	Sangat Baik
UNSUR PENGADUAN DAN SARAN		3,57	Baik
10	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	3,57	Baik
UNSUR PROSEDUR		3,61	Baik
11	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	3,66	Baik
12	QnA di menu “Bantuan” dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	3,55	Baik
UNSUR PRODUK		3,75	Baik
13	MKLC dapat diakses dengan mudah	3,75	Baik
UNSUR BIAYA		3,80	Sangat Baik
14	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak dipungut biaya apapun	3,80	Sangat Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran		3,70	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi (Rata-Rata)	3,68	Baik

Hasil perhitungan Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia adalah **3,68**. Adapun hasil penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0). Hasil perhitungan nilai di atas menunjukkan tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini **efektif** dalam memberikan kepuasan penyelenggaraan pendidikan terhadap peserta pembelajaran.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju metode pendidikan, media pembelajaran, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- 1) Belum terdapat video di beberapa materi. Mungkin dapat dilengkapi ke depannya;
- 2) Materi yang disampaikan masih bersifat umum, lebih sering mengacu pada UUD sehingga metode penyampaian masih bersifat konvensional;
- 3) Materi disetiap pembahasan dapat dikaitkan dengan hak konstitusional ajaran iman Kristen yaitu mengarah kepada cara saling menghormati hak orang lain dan kebebasan serta hak menyampaikan pendapat. Pemahaman ini bertujuan agar menjaga kerukunan antar umat beragama. Intinya adalah agar GAMKI tidak hanya memahami hak konstitusional sebagai teks hukum, tetapi menjadikannya pedoman hidup untuk membangun karakter pemimpin muda yang paham hukum, beriman dan cinta tanah air;
- 4) *Platform* mklc harus lebih dimaksimalkan dengan lebih fleksibel agar bisa diterapkan pada berbagai perangkat sehingga bisa diakses oleh berbagai kalangan kapanpun dan dimanapun;
- 5) Tampilan antarmuka (UI/UX) masih kaku dan kurang ada ruang untuk diskusi mendalam yang dinamis;



- 6) *Platform* mkclc sering kali mengalami kelambatan (*lag*) atau bahkan tumbang (*crash*) ketika diakses secara massal dalam waktu bersamaan misalnya saat pendaftaran program Bimbingan Teknis (Bimtek) baru saja dibuka terutama saat proses verifikasi email;
- 7) Pembelajaran cenderung bersifat satu arah. Pengguna biasanya hanya diminta menonton video prerekaman, membaca dokumen PDF, dan mengerjakan kuis pilihan ganda. Kurang ada ruang untuk diskusi mendalam yang dinamis. Perlu adanya penerapan gamifikasi seperti gunakan sistem poin, level, dan lencana (*badges*) untuk meningkatkan motivasi belajar pengguna;
- 8) *Platform* mkclc dapat lebih difokuskan untuk *mobile-first*. Kembangkan aplikasi Android/iOS dengan fitur *download* materi untuk akses *offline* di daerah minim sinyal;
- 9) Perlu adanya personalisasi berbasis AI. Gunakan teknologi AI untuk merekomendasikan materi hukum secara otomatis sesuai minat pengguna;
- 10) Materi belum banyak pembahasan mengenai isu-isu aktual seperti netralitas ASN, politik uang, hak konstitusional pemilih, dan penyelesaian sengketa pemilu yang dekat dengan realitas masyarakat;
- 11) Materi pelatihan sudah disajikan dengan baik dan variatif namun perlu ditambah dengan infografis agar lebih menarik;
- 12) Materi PowerPointnya dibuat lebih kaya isi;
- 13) Waktu kegiatan relatif singkat sehingga beberapa topik penting tidak dibahas mendalam;
- 14) Menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang (akademisi, praktisi hukum, aktivis masyarakat) agar perspektif lebih kaya;
- 15) Menambahkan simulasi kasus atau *role-play* tentang pelaksanaan hak konstitusional dalam kehidupan berbangsa;
- 16) Membuat kelompok diskusi kecil agar peserta lebih aktif dan berani menyampaikan pendapat;
- 17) MKLC dapat diperluas lagi bagi semua kalangan, baik siswa maupun mahasiswa, dan masyarakat umum;
- 18) Perlu adanya kegiatan tatap muka atau kegiatan secara langsung, bukan *online* agar dengan mudah para peserta bisa menerima dan mempraktekkan materi yang didapatkan;



- 19) Semoga layanan *customer service* cepat merespon terkait kendala;
- 20) Kegiatan melalui Zoom Meeting dapat diperbanyak, bisa sesuai dengan setiap bagian materi (1-9);
- 21) Akses video kurang fleksibel. Berbeda dengan PDF yang bisa diunduh, materi video wajib diputar di *platform* sehingga menguras kuota internet dan menyulitkan peserta yang berada di area sinyal tidak stabil;
- 22) Beban Materi Padat. Volume materi yang diberikan dalam waktu 2 minggu sangat besar, sehingga waktu untuk mencerna seluruh modul secara berkualitas terasa terbatas;
- 23) Setiap video materi agar durasinya tidak terlalu panjang sehingga penjelasannya lebih mudah dipahami;
- 24) Materi dalam bentuk video mohon menggunakan gaya komunikasi standar masyarakat agar lebih mudah dipahami;
- 25) Kalau bisa semua materi itu disampaikan dalam bentuk video saja agar mudah dimengerti;
- 26) Materi jangan bisa langsung di *skip*;
- 27) Tampilan *slide* materi tidak dapat dilihat dengan utuh, namun penjelasan dari para pemateri dapat dipahami dengan baik;
- 28) Mungkin boleh gabungkan materi dengan studi kasus, simulasi, atau diskusi kelompok;
- 29) Saat *review* jawaban yang salah masih ada coding menyatu dengan narasi seperti </p>.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa fitur MKLC yang sedang terus dibangun oleh tim IT sehingga peserta belum dapat menggunakan semua fitur yang tersedia di MKLC;
2. MKLC masih belum mendukung untuk dibuka di 2 perangkat yang berbeda sehingga masih terdapat peserta yang kesulitan;
3. MKLC masih sering mengalami *error* seperti peserta tidak mendapatkan email verifikasi dan data daerah yang tidak bisa muncul; serta
4. Terdapat beberapa peserta yang tidak menuntaskan pendidikan di MKLC.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.





LAMPIRAN



mklc.mkri.id



DOKUMENTASI KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi <i>Learning Center</i>
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa
Selasa - Senin, 19 s.d. 25 Mei 2026	08.00 WIB – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Pretest - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

At the bottom of the schedule, there are social media handles: officialMKRI, @officialMKRI, @mahkamahkonstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, and www.mkri.id.

Sesi Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Penjelasan sistem informasi peserta (MKLC) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda MK.



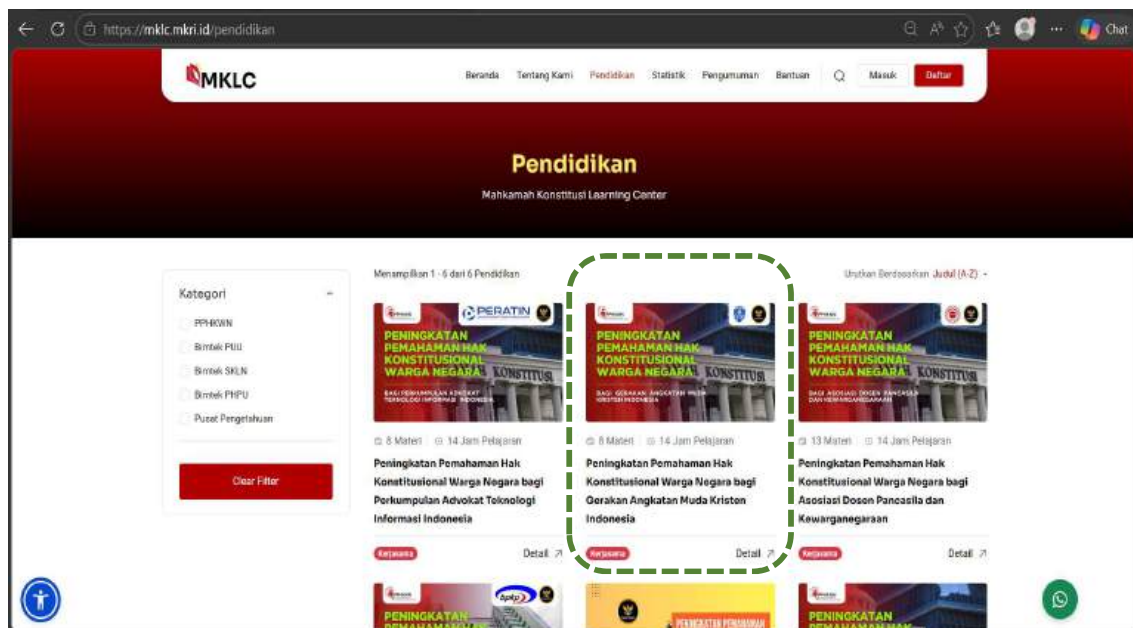
Kegiatan PPHKWN bagi GAMKI dibuka oleh YM Ketua MK, serta dihadiri oleh Ketua Umum GAMKI, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia oleh Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Tangkapan layar kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di web mklc.mkri.id.

JADWAL KEGIATAN

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 5 Juni 2026

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik	
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia	
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Mars Gamki 7. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK	
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 WIB - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Selasa, 26 Mei 2026	15.00 – 17.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Hakim Konstitusi	Zoom
Rabu s.d. Selasa, 27 Mei s.d. 2 Juni 2026	08.00 WIB - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : Hakim Konstitusi	Zoom
Kamis s.d. Jumat, 4 s.d. 5 Juni 2026	08.00 WIB - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi
Gerakan Angkatan Muda Kristen
Indonesia

Senin, 18 Mei 2026





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai kurikulum yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan (MKLC), bahan ajar, dan video pembelajaran.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat kepada **peserta yang memenuhi syarat**.



Peserta:

- ❖ Mengikuti materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai PUSDIK MK.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

Dilaksanakan melalui platform e-learning {mklc.mkri.id}

- ❖ sebagai sarana pembelajaran yg fleksibel & efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi.
- ❖ jangkauan yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.
- ❖ pembelajaran mandiri yang aktif dengan multimedia yang lebih menarik.



KURIKULUM KEGIATAN

**Reaktualisasi
Implementasi
Nilai-nilai
Pancasila**

**Konstitusi &
Konstitusionalisme
Indonesia**

**Sistem
Penyelenggaraan
Negara menurut
UUD NRI Tahun
1945**

**Jaminan Hak
Konstitusional
Warga Negara
dalam UUD NRI
Tahun 1945**

**MK dan Hukum
Acara Pengujian
Undang-Undang
terhadap
UUD NRI 1945**

**Sistem
Informasi
Perkara
Elektronik**

**Teknik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang**

**Praktik
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang**

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Jumat,
18 Mei s.d. 05 Juni 2026
- **Tempat** :
penugasan/kediaman masing-masing secara
daring (*online*) melalui aplikasi Zoom/MKLC



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi <i>Learning Center</i>
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa
Selasa - Senin, 19 s.d. 25 Mei 2026	08.00 WIB – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Pretest - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom Meeting untuk sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Narasumber: YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 WIB – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD 1945
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom Meeting untuk sesi: Mahkamah Konstitusi & Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Narasumber: YM Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi – YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 – selesai	Pembelajaran Mandiri melalui MKLC untuk: - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test &Kuesioner



KETENTUAN UMUM



Durasi kegiatan ialah 23 hari kalender, wajib **mengerjakan pretest, mengikuti materi Pendidikan, serta posttest & kuesioner** yang telah disediakan



Peserta wajib memiliki akses internet yang memadai untuk kelancaran kegiatan



Peserta wajib menggunakan komputer desktop/laptop untuk keperluan pembelajaran dan pengerjaan tugas yang diberikan



Peserta diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti **seluruh rangkaian kegiatan dan menyelesaikan tugas** yang diberikan

MAHKAMAH KONSTITUSI LEARNING CENTER

mklc.mkri.id

- ❖ Registrasi Peserta
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Video dan Modul Pembelajaran
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

INTERNET / WI-FI



***Pastikan Koneksi Internet / WiFi
Anda dalam kondisi baik***



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Template Presentation



mklc.mkri.id



Tujuan MKLC

Pembangunan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) merupakan upaya transformasi digital Mahkamah Konstitusi untuk memperluas jangkauan dan pemerataan informasi tentang hak-hak konstitusional warga negara ke seluruh pelosok negeri, tanpa terhalang batasan geografis.

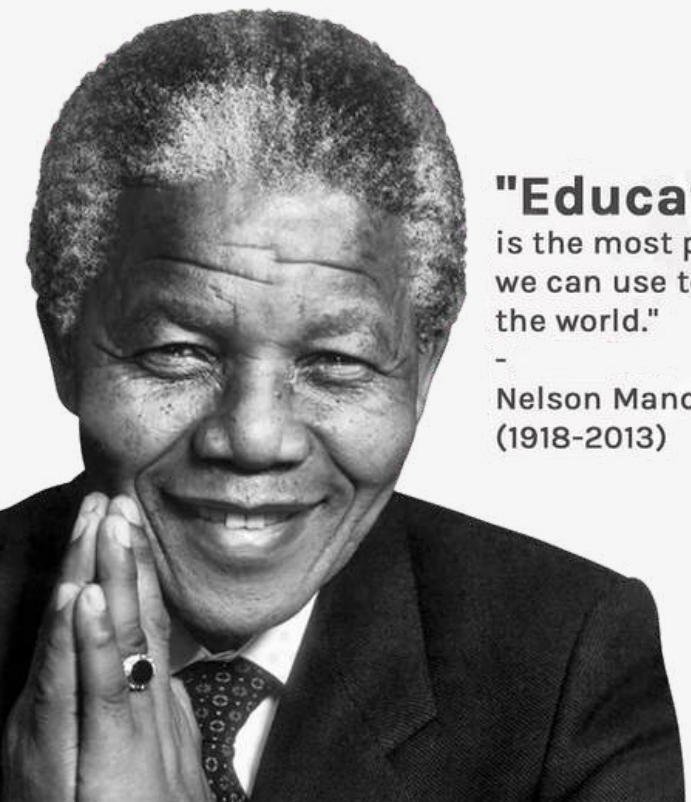
Melalui materi yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami, MKLC berfungsi untuk meningkatkan literasi konstitusi secara masif. Hal ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap jaminan dan prosedur perlindungan hak-hak dasar mereka. Pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak yang dijamin UUD 1945 akan memberdayakan masyarakat untuk aktif dan kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

“MKLC bukan hanya tentang teknologi, tetapi merupakan fondasi penting untuk menciptakan kesadaran berkonstitusi masyarakat”





Menu



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)



PENGUMUMAN

Jika terjadi kendala login, lakukan clear cache pada browser anda atau lakukan reset password

Jika kendala belum teratasi, ketuk banner ini untuk mengakses menu **BANTUAN**



 085157929660



Tentang Kami

Mahkamah Konstitusi Learning Center

 Selamat Datang

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Pusat Inovasi dan Edukasi Konstitusi



Penyebarluasan atau diseminasi hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) sangat penting untuk memastikan setiap individu memahami dan dapat menuntut serta mempertahankan hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tidak hanya memperkuat kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Dengan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah serta lembaga negara lainnya, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat krusial karena tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui putusan-putusan yang transparan dan sosialisasi yang aktif, Mahkamah Konstitusi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka dan pentingnya menjaga supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan sengketa konstitusional yang dapat timbul, sehingga memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi Mahkamah Konstitusi adalah Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi memiliki komitmen untuk membangun kesadaran berkonstitusi warga negara serta penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara keseluruhan, penyebarluasan hak-hak konstitusional dan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam proses ini adalah fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional, warga negara dapat lebih berdaya dalam menuntut keadilan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Melalui E-Learning yang telah dikembangkan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi warga negara dan penyelenggara negara dalam meningkatkan pemahaman terkait hak-hak warga negara yang tertuang dalam konstitusi. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pendidikan yang dapat diikuti diharapkan dapat memberikan gambaran terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, serta dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai Hukum Acara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kenapa MKLC?

Meningkatkan wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai konstitusi Indonesia



Belajar Mandiri

Belajar dengan kecepatan masing-masing, dapat diulang kapan saja dan dimana saja.



Materi Komprehensif

Materi telah dirancang oleh para Ahli sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.



Sertifikat Elektronik

Sertifikat tersedia secara digital dan dapat diunduh melalui dashboard masing-masing

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori

- ☒ PPHKWN
- ☒ Bimtek PUU
- ☒ Bimtek SKLN
- ☒ Bimtek PHPU
- ☒ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 5 dari 5 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan Judul (A-Z)



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi

Superadmin

Kerjasama Detail



0 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode Februari 2026)

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (Periode Januari 2026)

Superadmin

Umum Detail



0 Materi | 0 Jam Pelajaran

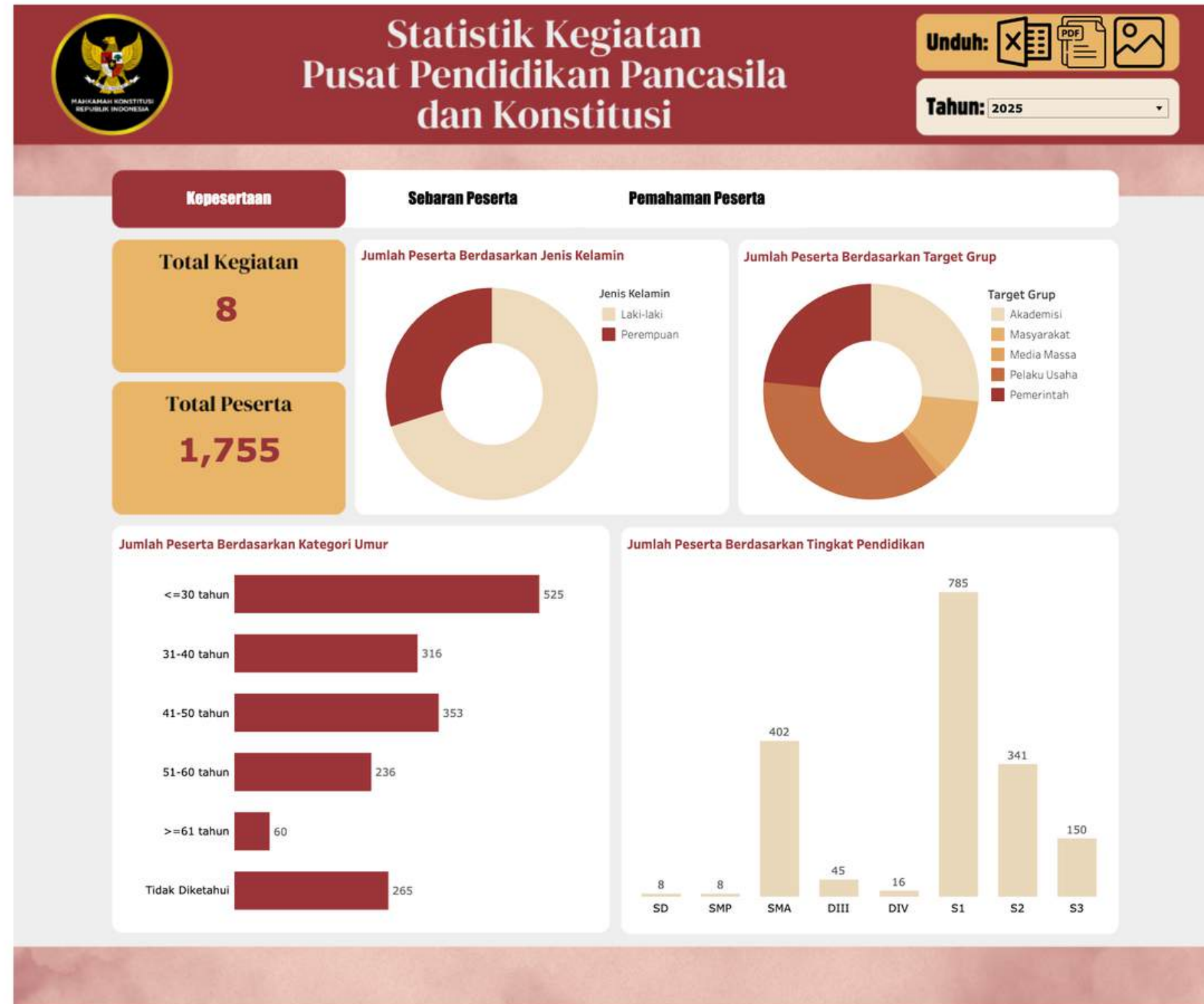
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Superadmin

Umum Detail

Statistik

Mahkamah Konstitusi Learning Center



Pengumuman

Mahkamah Konstitusi Learning Center



Bimbingan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 1



Pembukaan Pendaftaran Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 7

📅 25 Jun 2025 17:34 WIB | 👤 Developer E-learning

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan XX, yang akan dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

[Selengkapnya](#) ➤



Bimbingan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 1



Pembukaan Pendaftaran Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan 6

📅 25 Jun 2025 17:33 WIB | 👤 Developer E-learning

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka pendaftaran untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Angkatan XX, yang akan dilaksanakan selama bulan Maret 2025.

[Selengkapnya](#) ➤



Bantuan

Telusuri informasi yang Anda butuhkan



**Jenis
Pembelajaran**



Tentang MKLC



Akun/Profil



Pelatihan

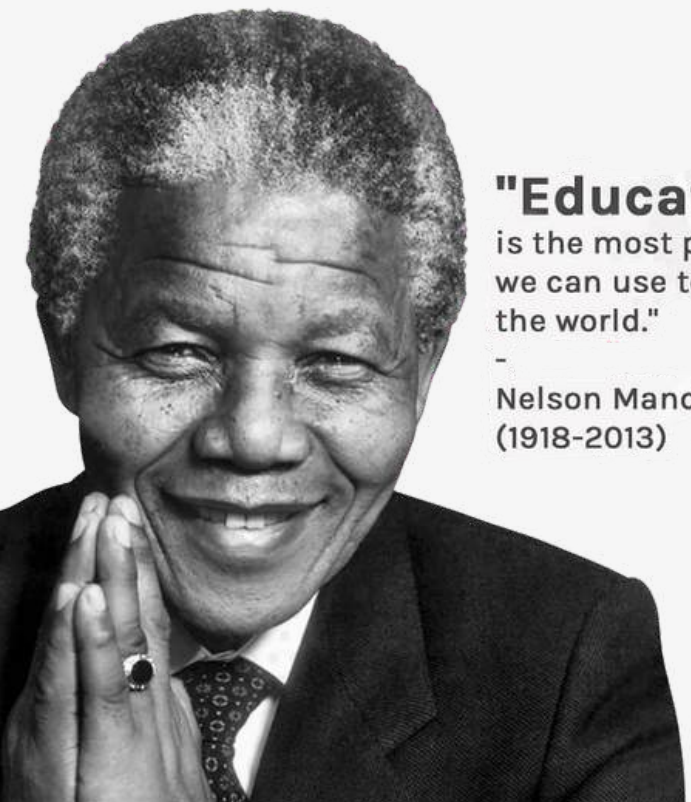


Troubleshooting





Daftar



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)



[Daftar Sekarang ↗](#)





Pusdik Mahkamah Konstitusi RI <noreply@mkri.id>
to me ▾

Mon, Oct 6, 2025, 9:40 AM



Mahkamah Konstitusi Learning Center

Hello!

Please click the button below to verify your email address.

Verify Email Address

If you did not create an account, no further action is required.

Regards,
Mahkamah Konstitusi Learning Center

If you're having trouble clicking the "Verify Email Address" button, copy and paste the URL below into your web browser: <https://api-mklc.mkri.id/api/v1/auth/email/verify/a00ba304-f31f-4bbf-b3c5-7a71946d46d4?expires=1759722001&hash=e169ba2c931e30b54d8ede9023104bd56592d876&redirect=1&signature=6134437f3ef4ab361eee98b45eb4086ace46ee6af90cdd1389e13997d20d8ec0>



Masuk

Belum memiliki Akun? [Daftar Sekarang](#)

Email

Password



[Lupa Password?](#)

Masuk ↗



Muhammad Abdullah

0 Pendidikan • 0 Sertifikat

User Dashboard

Beranda

Data Diri

Riwayat Pembelajaran

Bookmark

Ubah Data Diri

Ubah Password

Ubah Email

Logout

Data Diri

Muhammad Abdullah

tugasbimtek4@gmail.com

Edit ↗

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

Muhammad Abdullah

Gelar Depan

Gelar Belakang

S.Psi., M.H.

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Laki-laki

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

lainnya

Instansi

Mahkamah Konstitusi RI

E-Mail

tugasbimtek4@gmail.com

No. HP

Alamat Lengkap

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Kolom Nama Lengkap

Isikan Nama Lengkap tanpa gelar

Kolom Gelar depan dan belakang

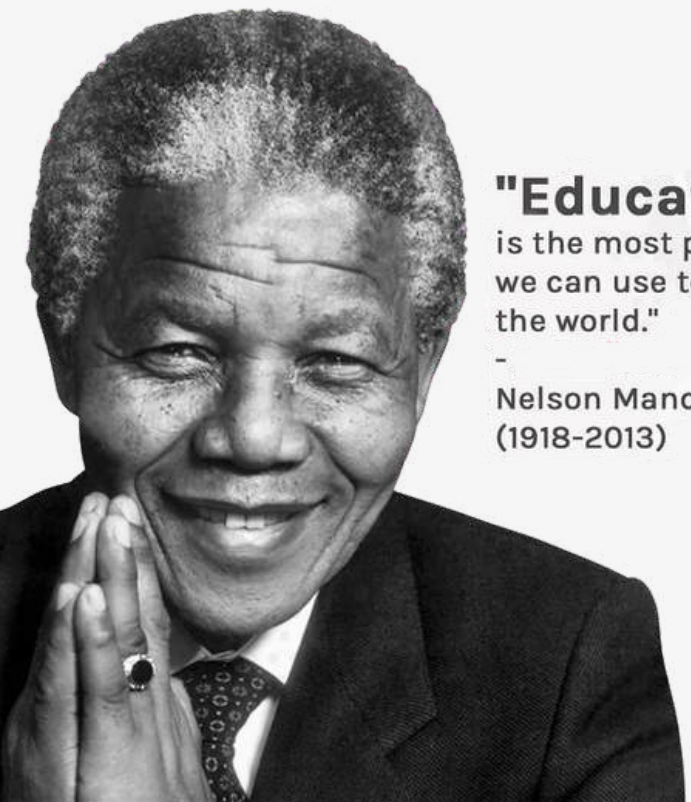
- Masukkan gelar secara spesifik sesuai dengan penempatan depan atau belakang nama
- Pastikan tanda titik dan koma yang benar

Data Kosong

Apabila ada data yang tidak perlu diisi atau kosong, maka wajib menggunakan tanda strip/minus (-)



Pendidikan



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-

Nelson Mandela
(1918-2013)

Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Learning Center

Kategori

- ☐ PPHKWN
- ☐ Bimtek PUU
- ☐ Bimtek SKLN
- ☐ Bimtek PHPU
- ☐ Pusat Pengetahuan

Clear Filter

Menampilkan 1 - 6 dari 6 Pendidikan

Urutkan Berdasarkan [Judul \(A-Z\)](#)



📅 8 Materi | ⌚ 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Kerjasama

[Detail](#)



📅 13 Materi | ⌚ 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan

Kerjasama

[Detail](#)



📅 13 Materi | ⌚ 14 Jam Pelajaran

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kerjasama



[Detail](#)



[Home](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

 8 Materi ♦  14 Jam Pelajaran ♦  1000 Peserta ♦  13 Mei 2026 - 05 Juni 2026



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

[Daftar](#) 

Materi ini berisikan:

-  Bahan Ajar
-  Akses Via Laptop
-  Akses Materi Selamanya
-  Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan



[Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

8 Materi ♦ 14 Jam Pelajaran ♦ 1000 Peserta ♦ 13 Mei 2024



Penyelenggara: pusdik-mk

Masukkan Kode Akses

Kode Akses *

KONSTITUSI

KIRIM

KONSTITUSI



Daftar ↗

Materi ini berisikan:

- ▶ Bahan Ajar
- 📄 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 🏆 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan



[Home](#) > [Pendidikan](#) > [pphkwn](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

8 Materi ♦ 14 Jam Pelajaran ♦ 1000 Peserta ♦ 13 Mei 2026 - 05 Juni 2026



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan



[Mulai ↗](#)

Materi ini berisikan:

- Bahan Ajar
- Akses Via Laptop
- Akses Materi Selamanya
- Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini








 > Pendidikan > pphkwn

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

 8 Materi ♦  14 Jam Pelajaran ♦  1000 Peserta ♦  13 Mei 2024



Penyelenggara: [pusdik-mk](#)

Silakan Klik Tombol Mulai

MULAI



Mulai 

Materi ini berisikan:

-  Bahan Ajar
-  Akses Via Laptop
-  Akses Materi Selamanya
-  Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan



Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.

Persyaratan Pendidikan

- 1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Identitas Kependudukan
- 2. Berusia minimal 17 Tahun

Persyaratan Sarana Prasarana

- 1. Perangkat (Hardware)
Komputer atau Laptop: Menggunakan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux dengan RAM minimal 4GB.
Ponsel atau Tablet: Mendukung sistem operasi Android atau iOS versi terbaru.
- 2. Jaringan (Koneksi Internet)
Kecepatan Stabil: Koneksi internet minimal 5-10 Mbps untuk kelancaran streaming video dan akses materi tanpa hambatan.
- 3. Perangkat Lunak (Software)
Peramban (Browser) Web: Gunakan versi terbaru dari Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
Pastikan JavaScript dan cookies dalam keadaan aktif.
- 4. Aplikasi Tambahan: Siapkan aplikasi pembaca dokumen seperti Adobe Acrobat Reader untuk membuka file PDF.

Silabus

▼ 1. Pre Test PPHKWN PNS

Pre Test PPHKWN

Belum

PPHKWN

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSTITUSI WARGA NEGARA

KONSTITUSI

BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

Progres Pengerjaan

0%

Lanjutkan ↗

Materi ini berisikan:

▶ Bahan Ajar

📄 Akses Via Laptop

∞ Akses Materi Selamanya

🏆 Sertifikat Elektronik

Bagikan Pendidikan ini

f

X

📷

in



Soal No. 1

-
-
-
-
-
-

Sebelumnya

Ragu-ragu

Selanjutnya

09:51

- 12345678
- 910

Keterangan Warna

- Dijawab
- Ragu-ragu
- Belum Dijawab
- Posisi Saat Ini

Selesai



1. Pre Test	
2. Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila	5 Sub Materi • 2 JP
3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	7 Sub Materi • 2 JP
4. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
5. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
6. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	6 Sub Materi • 2 JP
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik	1 Sub Materi • 1 JP
8. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	3 Sub Materi • 1 JP
9. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945	2 Sub Materi • 2 JP
10. Post Test	
Post Test Belum	

Materi dikerjakan secara berurutan

Tedapat review setiap materi dalam bentuk pilihan ganda yang harus dikerjakan dan benar semua untuk beralih ke materi berikutnya



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Video)



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi



Watch later



Share

PRAKTIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI



Watch on  YouTube

< Sebelumnya

Klik Jika Selesai

Selanjutnya >

Materi Pendidikan



Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1 Sub Materi • 2 JP

^ Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang



Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang (Video)



Soal Praktik Penyusunan Permohonan
Pengujian Undang-Undang (Power Point)





SOAL PRAKTIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Andi adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang ojek online yang berdomisili di Jalan Gegerkalong, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Andi mengeluhkan tentang kejadian saat Anda ditilang oleh polisi karena masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah habis. Pada saat ditilang, Andi sudah menyampaikan informasi kepada petugas polisi bahwa penyebab utama tidak dapat memperpanjang SIM adalah karena belum memiliki uang untuk membayar biaya perpanjangan SIM.

Pasal 85 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) memang menyebutkan bahwa ***“Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”***. Namun, apabila Andi menggunakan uangnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal tersebut yaitu memperpanjang SIM sekarang, maka Andi dan keluarganya tidak memiliki uang lagi untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

Andi sangat berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan ataupun masyarakat dalam kategori miskin untuk dapat memperpanjang SIM dengan masa perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan sejak SIM

< Sebelumnya

Sudah Selesai

Selanjutnya >



Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang

1 Sub Materi • 2 JP

^ Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang



[Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang \(Video\)](#)



[Soal Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang \(Document\)](#)



Survei Kepuasan Penyelenggaraan PPHKWN

Terima kasih telah menjadi bagian dari Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kami ingin mendengar pengalaman Anda! Silakan isi survei ini sebagai bentuk kontribusi dalam menyempurnakan program kami selanjutnya.

1. Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

☐ Kurang Setuju

☐ Tidak Setuju

2. Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif

☐ Sangat Setuju

☐ Setuju

SURVEI

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

📖 8 Materi ♦ ⌚ 14 Jam Pelajaran ♦ 👥 1000 Peserta ♦ ⌚ 13 Mei 2026 - 05 Juni 2026



Penyelenggara: **pusdik-mk**

Deskripsi

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dirancang untuk memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh negara bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Pendidikan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dapat melihat pedoman pembelajaran *Mahkamah Konstitusi Learning Center* melalui video yang terdapat dalam thumbnail pembelajaran.



Progres Pengerjaan

100%

Sertifikat

Terima kasih telah mengisi survei. Sertifikat sedang diproses. Sertifikat dapat diakses maksimal 5 hari kerja setelah Anda menyelesaikan pendidikan.

 [LIHAT SERTIFIKAT](#)

Materi ini berisikan:

- 📖 Bahan Ajar
- 💻 Akses Via Laptop
- ∞ Akses Materi Selamanya
- 📄 Sertifikat Elektronik





SERTIFIKAT

No. 38.1-MK/12/2025

diberikan kepada:

Hafidz Ikhsan Baihaki, S.Kom.

sebagai

Peserta

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Konstitusi
tanggal 4 s.d. 12 Desember 2025



Jakarta, 05 Desember 2025

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi

Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.





Terima Kasih

*Apabila terdapat kendala dan butuh informasi lebih lengkap
hubungi kontak WA Pusdik (085157929660)*



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi**



**BIMTEK HUKUM ACARA PENGUJIAN UU
PUSDIK MK, 26 MEI 2026**

Pengertian Konstitusi

Dokumen formal ketatanegaraan yang mengandung ketentuan tentang cara pengelolaan hidup bersama dalam suatu negara.

Konstitusi merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi atau sebagai sebuah manifesto pernyataan-pernyataan ideal yang secara umum hendak diwujudkan.

Pada umumnya konstitusi mengatur organ-organ negara, cara bekerjanya organ tersebut, tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh organ negara.

Konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara yang secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal.

Pengertian....

- *Konstitusi harus mewujudkan aturan-aturan mendasar dari suatu masyarakat yang demokratis daripada sekadar memasukkan ketentuan-ketentuan hukum yang senantiasa berubah-ubah yang lebih tepat diatur oleh undang-undang. Demikian pula, struktur dan tindakan pemerintahan harus sungguh-sungguh tunduk pada norma-norma konstitusi, serta tidak boleh semata-mata sebagai sekadar dokumen seremonial atau aspirasional belaka” (constitutions should serve as the highest form of law to which all other laws and governmental actions must conform. As such, constitutions should embody the fundamental precepts of a democratic society rather than serving to incorporate ever-changing laws more appropriately dealt with by statute. Similarly, governmental structures and actions should seriously conform with constitutional norms, and constitutions should not mere ceremonial or aspirational documents” (John Norton More, 1990).*



Secara ideologi
Konstitusi memuat tujuan bersama yang hendak diwujudkan termasuk tujuan dari dibentuknya organ-organ negara



Secara mekanistik
Konstitusi memuat alat-alat kelengkapan negara, tugas, fungsi dan wewenangnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang

Materi Muatan Konstitusi

- UUD adalah pernyataan mendasar tentang hal-hal yang oleh sekelompok orang yang mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dipandang sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar di mana terhadap ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar itulah yang mereka anut bersama dan kepadanya pula mereka sepakat untuk terikat

(the fundamental statement of what a group of people gathered together as citizens of a particular nation view as the basic rules and values which they share and to which they agree to bind themselves (Barry M. Hager, Rule of Law, A Lexicon for Policy Makers, 2000).



FUNGSI KONSTITUSI

1. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Penyalur/pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli (rakyat/raja) kepada organ negara.
6. Sebagai simbol pemersatu
7. Sebagai simbol rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Sebagai pusat upacara.
9. Sebagai sarana pengendalian masyarakat (arti sempit dan luas).
10. Sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat.

Konstitusionalisme

Constitutionalism = (1) a constitutional system of government; or (2) adherence to constitutional principles. Sense is now more common. Constitutionalism is the idea, often associated with the political theories of John Locke and the founders of the American republic, that government can and should be legally limited in its powers, and that its authority or legitimacy depends on its observing these limitations.

Garner, Bryan A. *A dictionary of modern legal usage*. Oxford University Press, USA, 2001.

“Constitutionalism”,
<https://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/>, diakses 5 November 2025.

Konstitusionalisme merupakan gagasan pemerintah sebagai sekumpulan aktifitas diselenggarakan atas nama rakyat, yang tunduk pada beberapa pembatasan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah. Pembatasan itu tertuang dalam konstitusi.

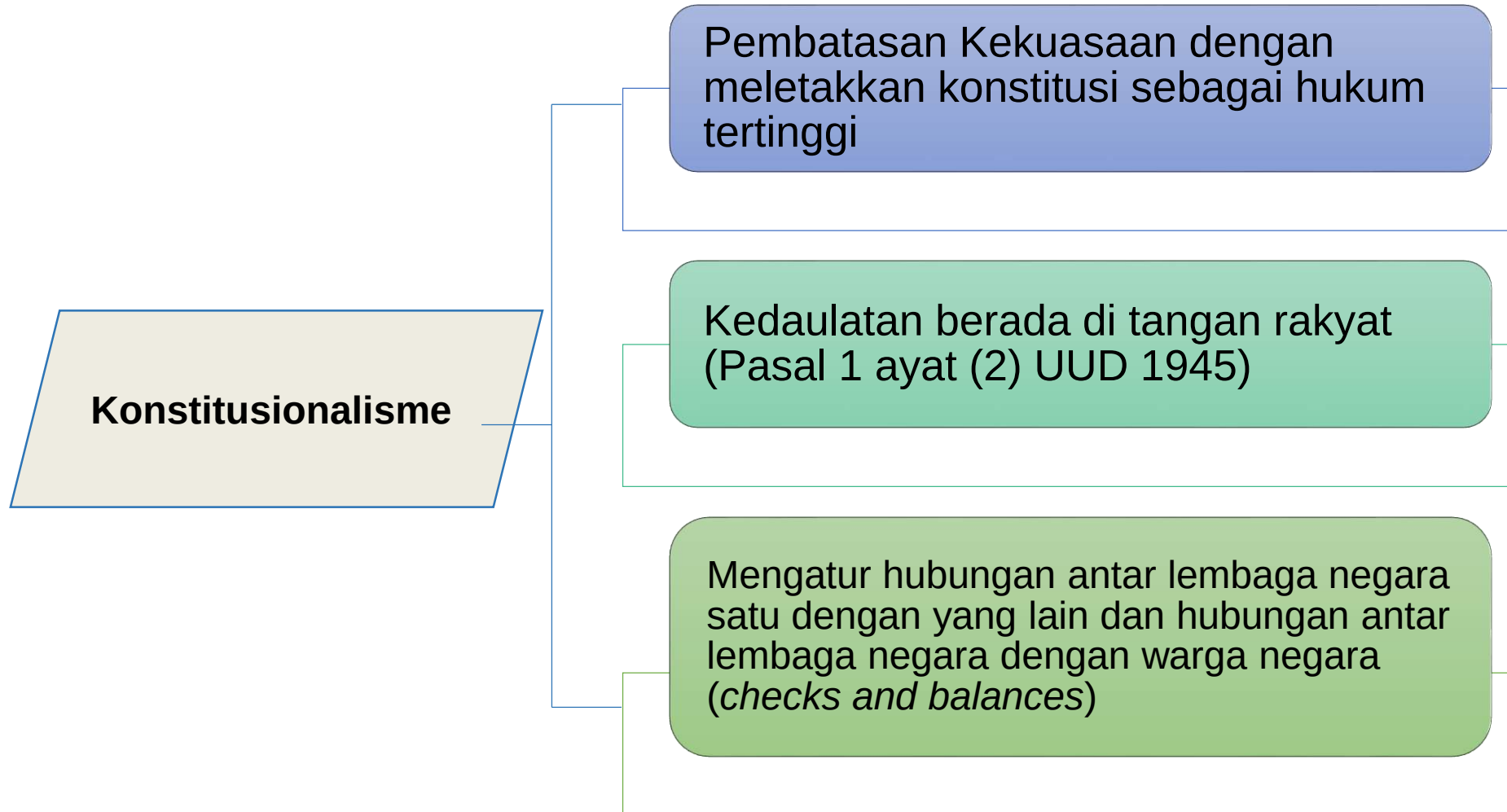


HUB ANTARA
PEMERINTAHAN –
WARGA NEGARA



HUB. ANTARA
LEMBAGA
PEMERINTAHAN

KARAKTERISTIK KONSTITUSIONALISME



PRINSIP UTAMA KONSTITUSIONALISME

1

Supremasi Hukum

Hukum adalah otoritas tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama.

2

Pemisahan Kekuasaan

Kekuasaan antara lembaga pemerintah harus dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Hak Sipil Politik, Hak Ekosob, Hak solidaritas/pembangunan (perkembangan generasi ketiga HAM))

KONSTITUSIONALISME DALAM PRAKTIKNYA

1

Pembentukan Konstitusi

Proses penyusunan konstitusi yang melibatkan partisipasi publik.

2

Pengawasan Judisial

Kekuasaan kehakiman yang independen untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi.

3

Amendemen Konstitusi

Konstitusi dapat diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan negara melalui proses amendemen yang mekanismenya telah ditetapkan.

MANFAAT KONSTITUSIONALISME

Stabilitas Politik

Konstitusionalisme menciptakan fondasi dan struktur politik yang stabil, mengurangi konflik, dan membantu menjaga kedamaian dan ketertiban.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konstitusionalisme memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah atau pihak lain.

Pembatasan Kekuasaan Pemerintah

Konstitusionalisme mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dengan mengatur keterbatasan dan mekanisme bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Pemerintahan yang Transparan

Konstitusionalisme mendorong transparansi dalam pemerintahan, memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan mencegah korupsi.

Praktik Peradilan antara lain

Putusan 005/PUU-IV/2006 (Pengujian UU Komisi Yudisial)

- ...Bahwa syarat pertama setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah **prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*)**, yaitu **prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang substansinya terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945**, sebagai perwujudan dari pernyataan kemerdekaan bangsa, sebagaimana tercermin antara lain dalam kalimat, “.... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” (hlm. 149).

Putusan 6/PUU-V/2007 (Pengujian KUHP)

- **[3.18.1]** Bahwa, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Unsur atau ciri pertama dan utama negara hukum adalah ***constitutionalism*** yang menghendaki agar konstitusi atau undang-undang dasar, *in casu* UUD NRI Tahun 1945, benar-benar diwujudkan atau ditegakkan dalam praktik.

Putusan 49/PUU-IX/2011 (Pengujian UU MK)

- Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (***constitutionalism***), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara (hlm . 74).

Constitution is supreme law of the land (karena sebagai charter of the land)

Tantangan konstitusionalisme ke depan

- Apakah UUD NRI Tahun 1945 telah mengakomodasi environmental constitutionalism?

Putusan MK **35/PUU-XXI/2023**

[3.18.2] Bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 maka dalam menjaga nilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia perlu penetapan *critical natural capital* untuk ekosistem tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tercapai keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*). Prinsip ini bertolak pada *strong sustainable development* yang tidak menolak pembangunan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai pelindung dan pencegah terjadinya kerusakan bumi dan kepunahan keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam konteks ini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memenuhi syarat elemen '*criticality*' apabila melihat dari kadar pentingnya (*degree of importance*), maupun kadar keterancamannya (*degree of threats*) berdasarkan kriteria-kriteria di atas.

Putusan **119/PUU-XXIII/2025**

Strong sustainability vs weak Sustainability

- Keberlanjutan dimaksud generasi masa depan harus dapat menikmati modal alam yang tidak lebih kecil dari yang dinikmati generasi saat ini
- Dalam kaitan ini, kegiatan pertambangan yang dikategorikan *abnormally dangerous activity* yang dalam hukum lingkungan harus dilarang

Tantangan.....

Putusan 119/PUU-XXIII/2025 (Pengujian UU PP LH)

Untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, agar tidak terjadi tindakan kriminalisasi maupun berbagai disparitas putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan konsep anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) terutama terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maupun tindakan pembalasan yang terjadi bukan dari terlapor.

Digital Constitutionalism

- How constitutional law is reacting to the advent of the digital revolution and analysing the constitutional function of Internet bills of rights (**Edoardo Celeste**)

Putusan 105/PUU-XXII/2024

- **[3.12]** ...Dalam kaitan ini, UUD NRI Tahun 1945 sekalipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai **konstitusionalisasi digital** (***digital constitutionalism***), namun sebagai suatu konstitusi yang perubahannya mendasarkan pada konstitusionalisme maka prinsip-prinsip dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tetap dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 sekalipun terdapat tantangan masif karena perkembangan pengaruh teknologi digital terhadap keseimbangan ekosistem konstitusional (*constitutional equilibrium*)... Gagasan mengenai konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*) **muncul sebagai respons terhadap tantangan era digital dengan menggunakan pendekatan normatif dan institusional dalam menjamin hak-hak dasar, termasuk kebebasan berekspresi, di ruang digital.**



Apakah UUD NRI Tahun 1945 menjangkau persoalan konstitusional karena revolusi AI dengan litrasi algoritma yang makin masif?

WEWENANG DAN FUNGSI MK MEWUJUDKAN KONSTITUSIONALISME

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Guardian of Democracy

The Guardian of State Ideology

The Protector of Human Rights

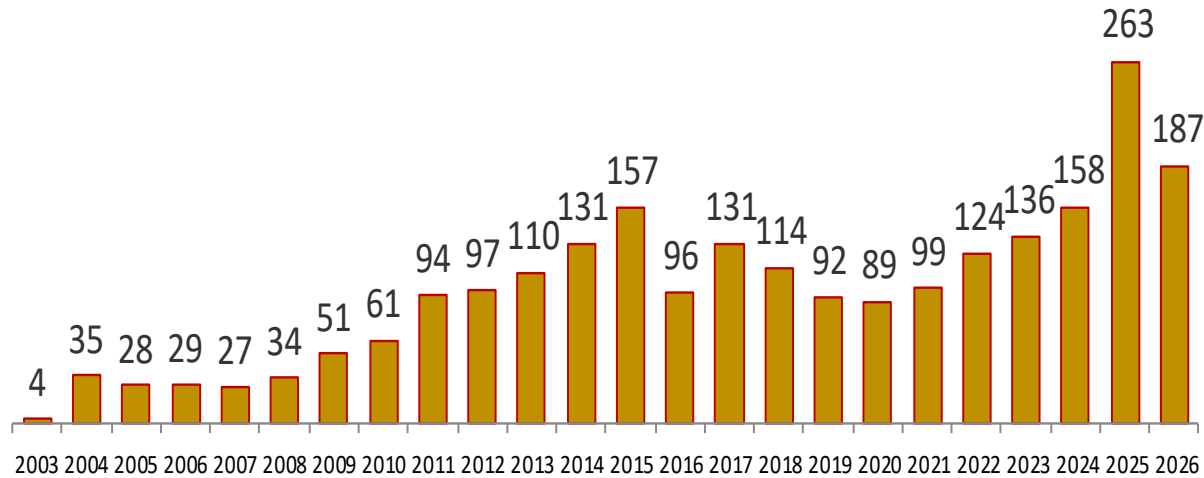
*The Protector of Citizen's
Constitutional Rights*

The Final Interpreter of Constitution

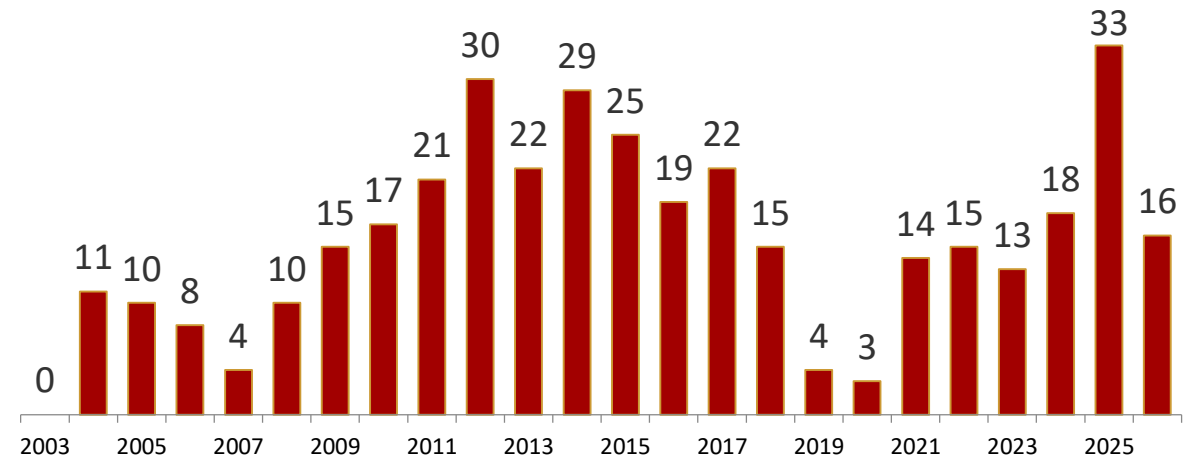
STATISTIK PUTUSAN PUU MAHKAMAH KONSTITUSI

Per 25 Mei 2026

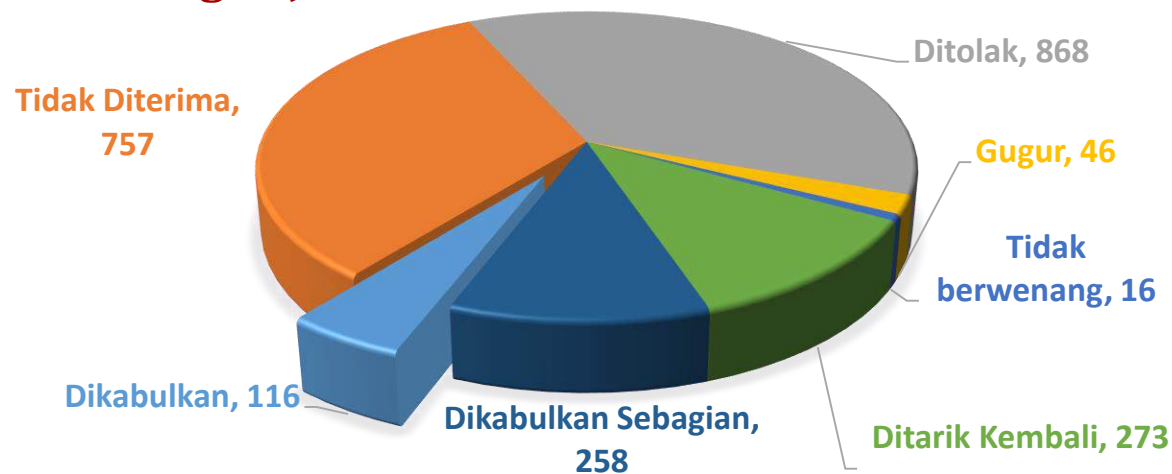
Jumlah Putusan MK tahun 2003-2026



Jumlah Putusan MK Dikabulkan tahun 2003-2026



Perbandingan Jenis Putusan MK tahun 2003-2025



632 UU yang diuji

2.347 Putusan

376 Putusan dikabulkan

UNDANG-UNDANG YANG PALING SERING DIUJI

No	Nama Undang-Undang	Frekuensi
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	183 kali
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	90 kali
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	90 kali
4	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana	60 kali
5	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	48 kali
6	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43 kali
7	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	43 kali
8	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39 kali
9	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	39 kali
10	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38 kali

Krisis Konstitusionalisme Kontemporer

01

Konstitusionalisme liberal dapat mengalami paradoks: ia membatasi kekuasaan, tetapi pada saat yang sama dapat memperkuat teknokrasi, manajerialisme, dan depolitisasi.

02

Penguatan hak individual dan lembaga kontra-majoritarian perlu diseimbangkan dengan ruang demokrasi representatif agar tidak menciptakan jarak antara rakyat dan pengambil keputusan.

03

Populisme tidak selalu hadir sebagai lawan mutlak konstitusionalisme; dalam banyak kasus, ia muncul dari krisis representasi dan memakai bahasa konstitusionalnya sendiri.

 Isu kunci: konstitusi harus menjadi pembatas kekuasaan sekaligus ruang hidup demokrasi.

Konstitusi Material dan Tantangan MK

membaca konstitusi tidak cukup hanya melalui teks formal

- 1 Konstitusi formal perlu dibaca bersama "konstitusi material": relasi sosial, dukungan kelembagaan, struktur ekonomi-politik, dan tujuan kolektif yang bekerja di balik teks.
- 2 Konflik antar lembaga, krisis legitimasi, atau ketegangan antara hukum dan kebijakan sering kali menunjukkan adanya arus bawah konstitusional yang belum selesai.
- 3 Dalam konteks ini, MK tidak hanya menjaga supremasi UUD, tetapi juga merawat keseimbangan antara pembatasan kekuasaan, akuntabilitas demokratis, dan perlindungan hak konstitusional.

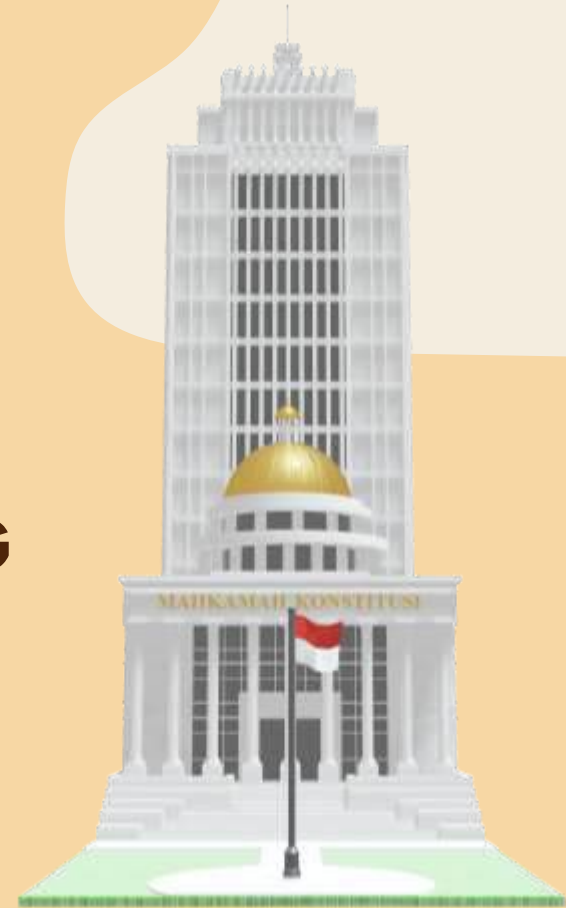
 Arah penguatan: constitutional culture perlu ditopang oleh demokratisasi, bukan sekadar legalisasi.

Penutup

- Konstitusi harus menjadi bagian dari ***constitutional culture*** sejalan dengan kedudukannya sebagai norma hukum tertinggi;
- Konstitusi sebagai *living constitution* yakni dokumen yang hidup dan berkembang mengikuti perubahan masyarakat (tanpa harus melalui amandemen). Konsep ini tidak sejalan dengan pemikiran *originalism*, yang menghendaki konstitusi harus ditafsirkan berdasarkan makna asli saat dibuat.
- Perubahan Konstitusi (jika menjadi pilihan) sejalan dengan mekanisme yang telah ditentukan dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna .

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Suhartoyo



DASAR HUKUM KEWENANGAN MK MENGUJI UU TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

**Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945**

**Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah
dengan UU 7/2020**

**Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman**

**Pasal 9 ayat (1) UU 13/2022 tentang
Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan...dll**

Hukum Acara PUU

**PMK
Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian
Undang-Undang**





MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan MK

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang **putusannya bersifat final** untuk:

1. Menguji UU terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD

Pelindung Konstitusi
(*The Guardian of Constitution*)

Penafsir Akhir Konstitusi
(*The Final Interpreter of the Constitution*)

Pelindung Demokrasi (*the Guardian of Democracy*)

Pelindung Hak Asasi Manusia
(*The Protector of Human Rights*)

Pelindung Hak Konstitusional
Warga Negara
(*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)



Karakteristik Hukum Acara PUU

Para Pihak

Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait

- ❑ **Pemohon:**
WNI, badan hukum, masyarakat hukum adat, lembaga negara
- ❑ **Pemberi Keterangan:**
MPR, DPR, DPD, atau Presiden
- ❑ **Pihak Terkait:**
Pihak yang mengajukan diri atau dihadirkan MK

Objek Pengujian Undang-Undang/Perpu

Konstitusionalitas UU/Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945

Jenis Pengujian

Pengujian Formil dan Materiil

❑ **Pengujian Materiil:**

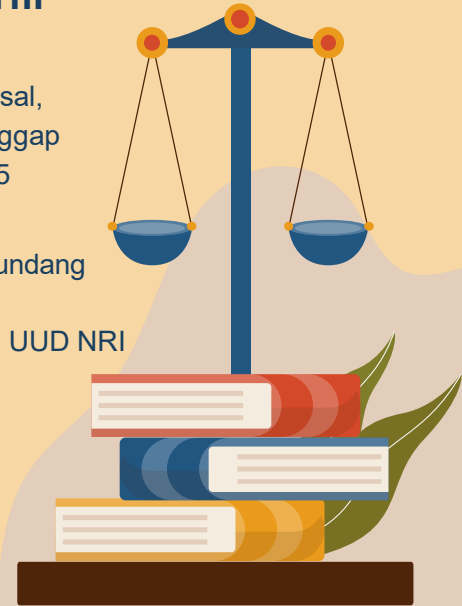
Pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

❑ **Pengujian Formil**

Pengujian terhadap pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Dasar Pengujian UUD NRI Tahun 1945

Materi dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan jaminan hak konstitusional Pemohon





URAIAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Pasal 51 ayat (1) UU MK

Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- Perorangan warga negara Indonesia
- Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang
- Badan hukum public atau privat; atau
- Lembaga negara

Syarat Kedudukan Hukum Pemohon pada Uji Materiil UU (Putusan MK 006/PUU-III/2005)

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Syarat Kedudukan Hukum Pemohon pada Uji Formil UU (Putusan MK 27/PUU-VII/2009)

Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan.

Sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang



Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum

Sekurang-
kurangnya
memuat Nama
dan alamat
Pemohon



Kewenangan MK

- Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) UU MK;
- Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;
- PMK 7/2025, dll.



Kedudukan Hukum

- Uraian mengenai kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU/Perpu;
- kerugian konstitusional dapat bersifat aktual maupun potensial



Alasan Permohonan

Interpretasi
Pemohon
mengenai
pertentangan
UU/Perpu
terhadap UUD
1945



Petitum

- **Pengujian Formil:**
Menyatakan pembentukan UU/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- **Pengujian Materiil:**
Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 [sepanjang tidak dimaknai ...]

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan



Mendengar pokok permohonan

- Pemohon menyampaikan pokok permohonan;
- MK memberikan nasihat utk melengkapi/memperbaiki Permohonan
- Pemohon diminta memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari

Memeriksa perbaikan permohonan

MK memeriksa perbaikan permohonan dan alat bukti

RPH

Perkara dilaporkan dalam RPH utk memutuskan tindak lanjut perkara

Putusan atau perkara dilanjutkan dalam

Sidang Pleno

Perkara langsung diputus MK atau dilanjutkan ke sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan



Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dan Pengucapan Putusan



**Mendengar
Keterangan
Pemberi
Keterangan**



**Mendengar
Keterangan
Pihak Terkait**



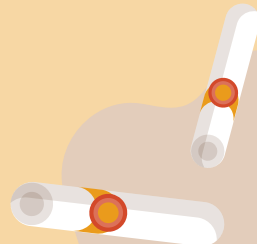
**Mendengar
keterangan
ahli dan/atau
saksi**



RPH



**Pengucapan
Putusan MK**



SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Final

- **Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU MK:**

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”

Erga Omnes

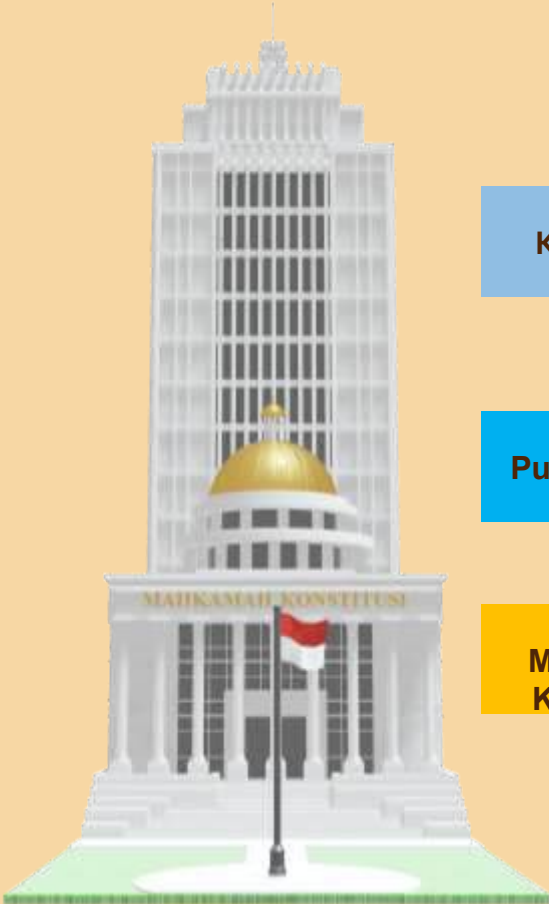
- Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat untuk umum, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara (*inter partes*).

Self executing

- Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai daya berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.



JENIS PUTUSAN MK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Ketetapan

Permohonan bukan kewenangan MK

Pemohon menarik kembali permohonan

Pemohon tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan

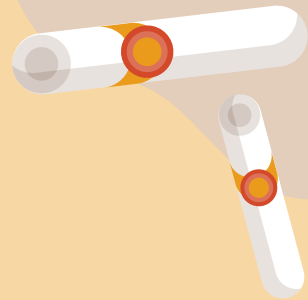
Putusan Sela

**Putusan
Mahkamah
Konstitusi**

Tidak dapat diterima

Kabul

Tolak



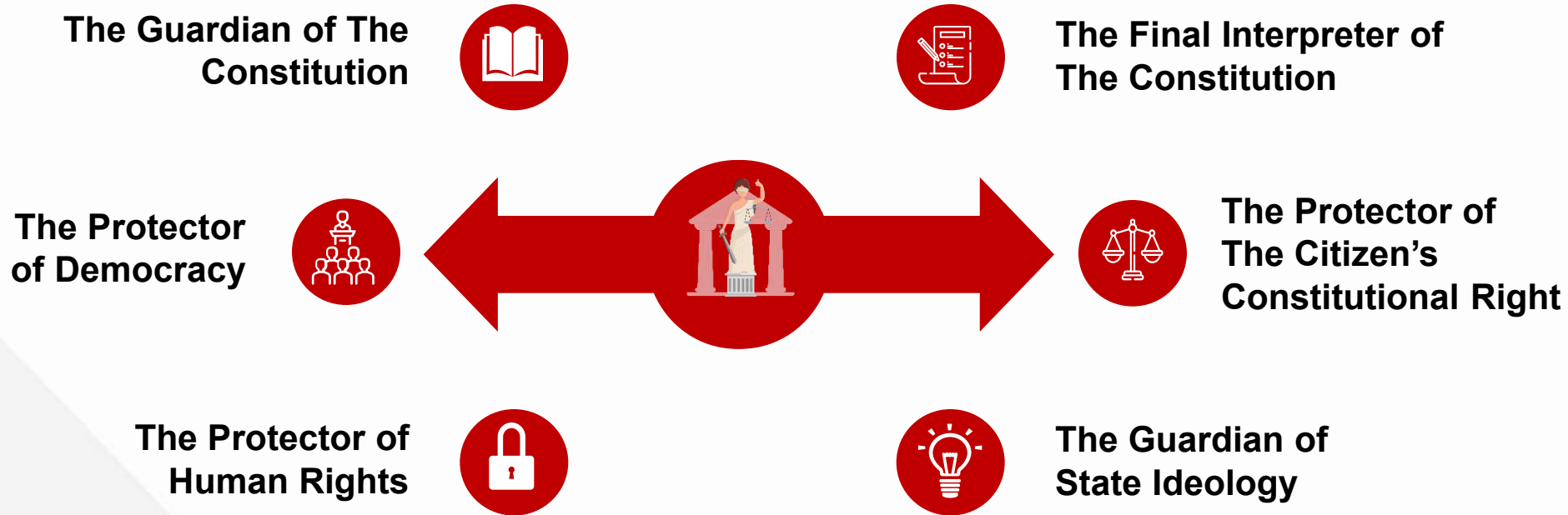
Terima kasih



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Fungsi Mahkamah Konstitusi



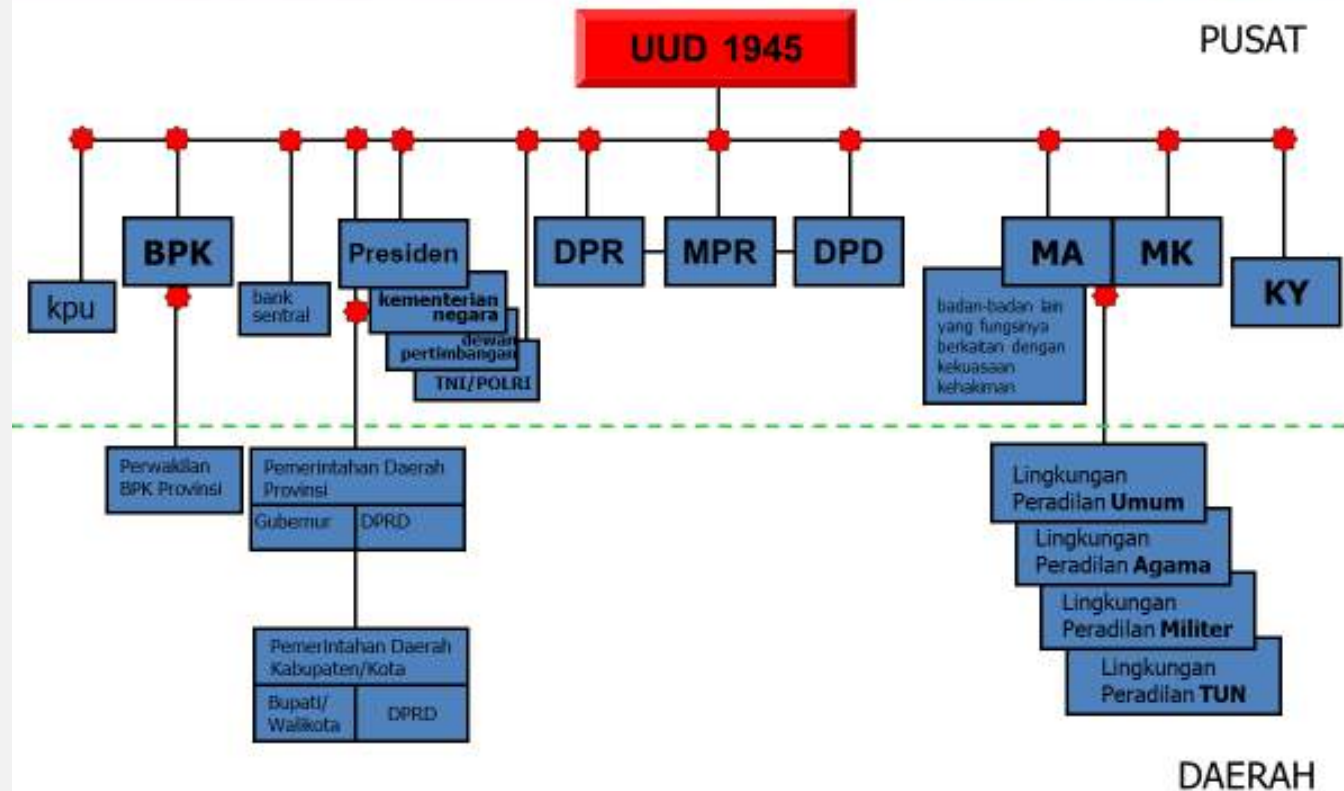
Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”



Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No 7
Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga UU No. 24
Tahun 2003
Pasal 10

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan
Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

Menguji UU
terhadap UUD
NRI Tahun 1945



3

Memutus
Pembubaran
Partai Politik

2

Memutus Sengketa
Kewenangan
Konstitusional
Lembaga Negara

5

Memberikan Putusan atas
Pendapat DPR mengenai
Dugaan Pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil
Presiden

4

Memutus Perselisihan
Hasil Pemilihan
Umum

Dalam Perkembangan



1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).
2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU.

REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

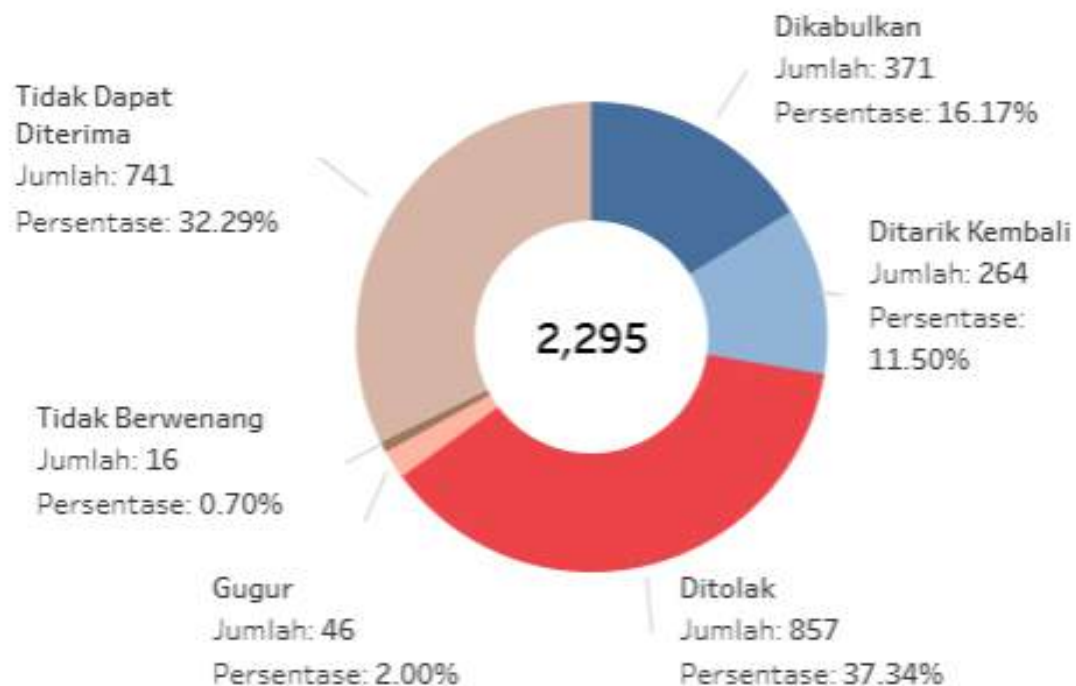
Unduh:



Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Dalam Proses Tahun Ini	Jumlah Putusan	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	0	24	24	20	4	0	0	1	1	0	2
2004	20	27	47	12	35	11	10	10	4	0	0
2005	12	25	37	9	28	10	14	4	0	0	0
2006	9	27	36	7	29	8	8	11	2	0	0
2007	7	30	37	11	26	4	11	7	4	0	0
2008	11	36	47	12	35	10	12	7	6	0	0
2009	12	78	90	39	51	15	17	12	7	0	0
2010	39	81	120	59	61	19	21	15	5	1	0
2011	59	86	145	51	94	21	30	32	9	0	2
2012	51	118	169	72	97	30	32	27	5	2	1
2013	72	109	181	71	110	22	52	22	12	1	1
2014	71	140	211	80	131	29	42	36	17	6	1
2015	80	140	220	63	157	25	51	60	15	4	2
2016	63	111	174	78	96	19	34	30	9	3	1
2017	78	102	180	49	131	22	48	44	12	4	1
2018	49	102	151	37	114	15	45	44	7	1	2
2019	37	85	122	30	92	4	49	29	8	2	0
2020	30	109	139	50	89	3	29	43	14	0	0
2021	50	71	121	22	99	14	44	29	11	0	1
2022	22	121	143	19	124	15	53	37	18	1	0
2023	19	168	187	51	136	13	57	41	25	0	0
2024	51	189	240	82	158	18	77	31	22	8	2
2025	82	284	366	103	263	33	87	96	42	5	0
2026	103	149	252	117	135	11	34	73	9	8	0
Jumlah Amar Putusan						371	857	741	264	46	16
Jumlah Registrasi						2,412					
Jumlah Putusan						2,295					

Tanggal diperbarui: 27 April 2026 05.30.02 WIB

Jumlah Putusan Perkara PUU berdasarkan Jenis Amar Putusan



Top 10 Undang-Undang yang Paling Sering Diuji di Mahkamah Konstitusi

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	182
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	90
3	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43
4	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	90
5	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	43
6	Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD	39
7	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	47
8	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	39
9	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
10	Undang-undang Nomor KUHP tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	60

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)



Pengujian Formil

- a. Pengujian Formil dan/atau
- b. Pengujian Materiil

Pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.



Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Para Pihak dalam Perkara Pengujian UU



- **Pihak Pemohon**
- **Pihak Pemberi Keterangan:**
 - MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
 - Dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait
- **Pihak Terkait**
 - Pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU

01

Pemohon

- Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat;
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga Negara.

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU/Perppu (45 Hari sejak UU/Perpu diundangkan)
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU/Perppu



Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat (**Pasal 10 PMK 7/2025**):

1. Identitas Pemohon (nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat dan alamat surat elektronik)

2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
- c. Alasan-alasan permohonan pengujian (*posita*).

3. Hal-hal yang dimohonkan (petitum)



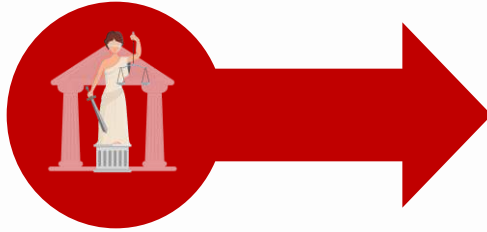
Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional (Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025)



- ✓ Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- ✓ Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon **dirugikan** oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- ✓ Kerugian konstitusional dimaksud bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ✓ Ada hubungan **sebab-akibat** antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- ✓ Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan **tidak lagi atau tidak akan terjadi**.

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas-Asas
Utama



Presumption of Constitutionality



Ius Curia Novit



Erga Omnes



Final and Binding

Prinsip-Prinsip Persidangan

Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim

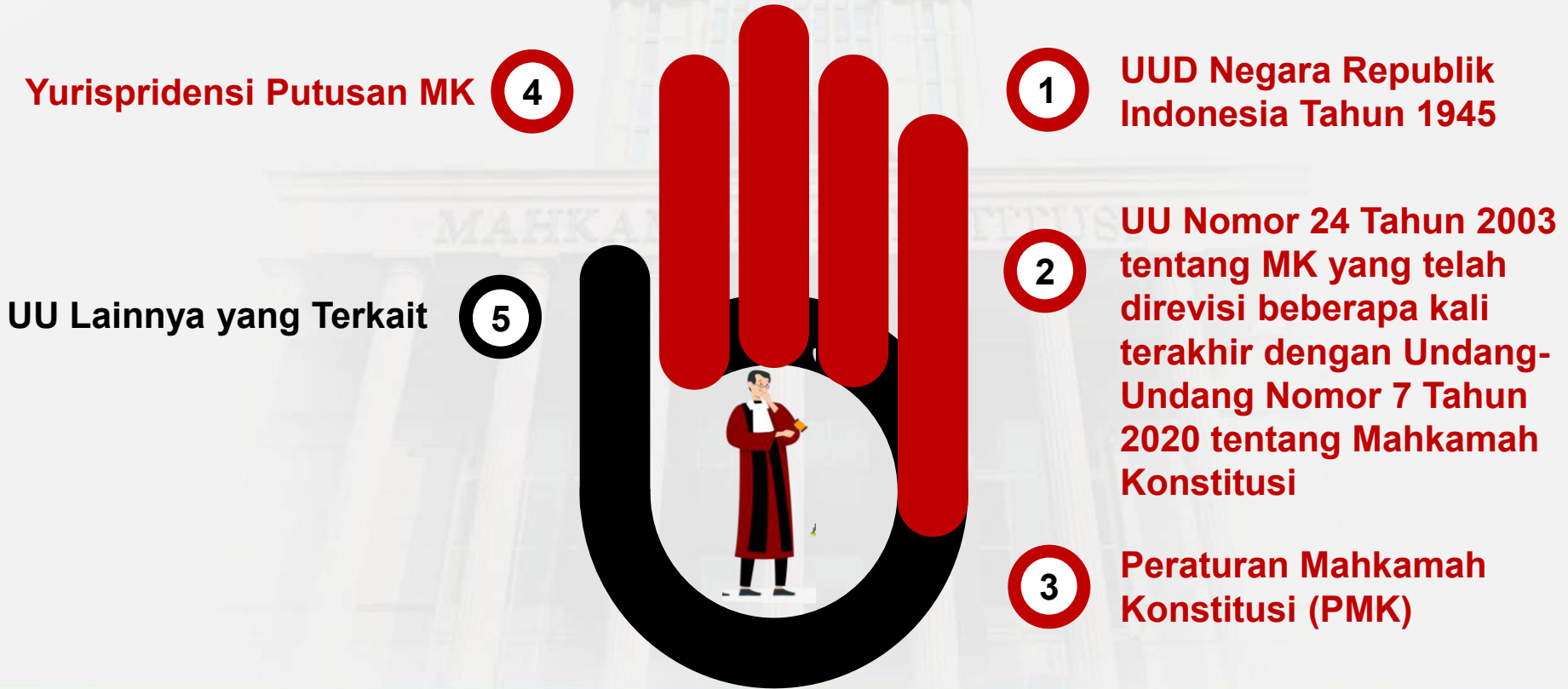
Hakim bersifat Aktif dan Pasif

Asas Pembuktian Bebas

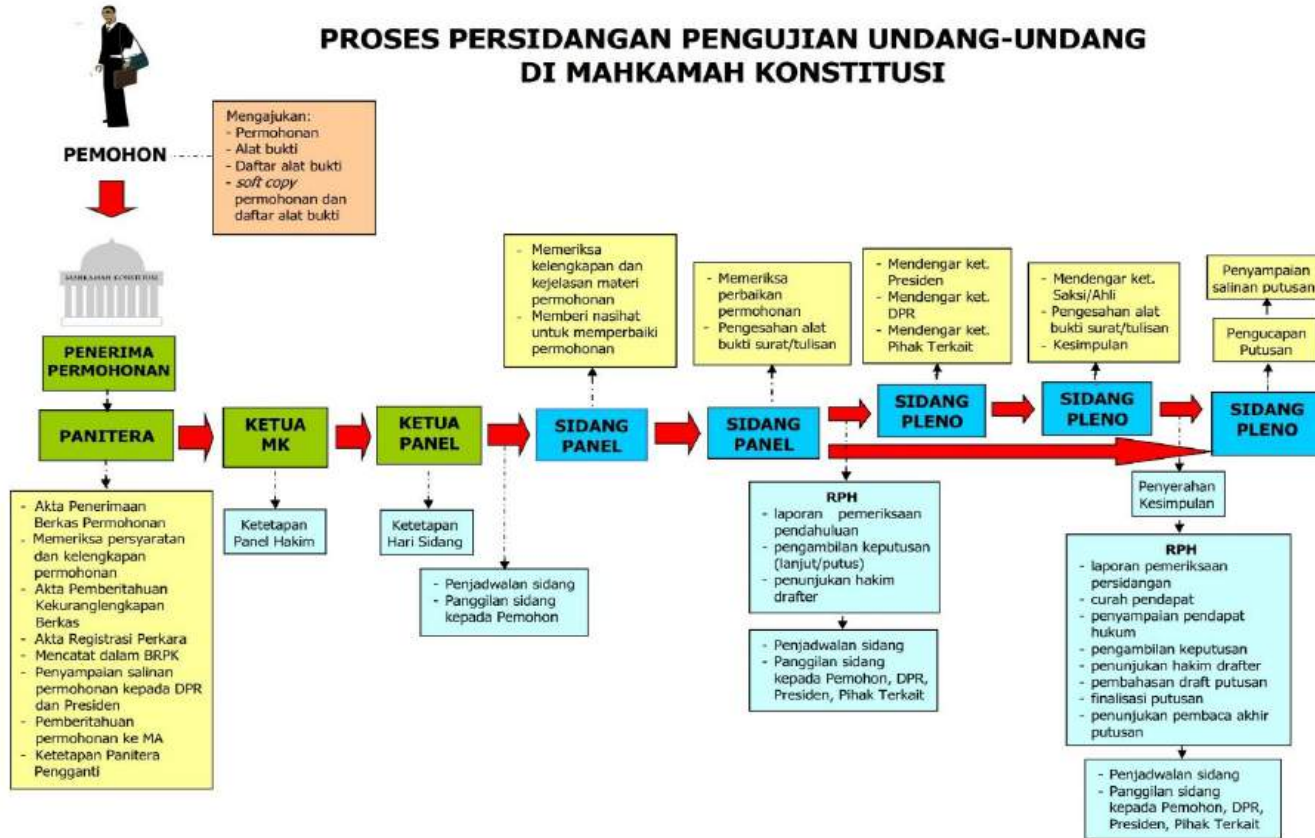
Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya



Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

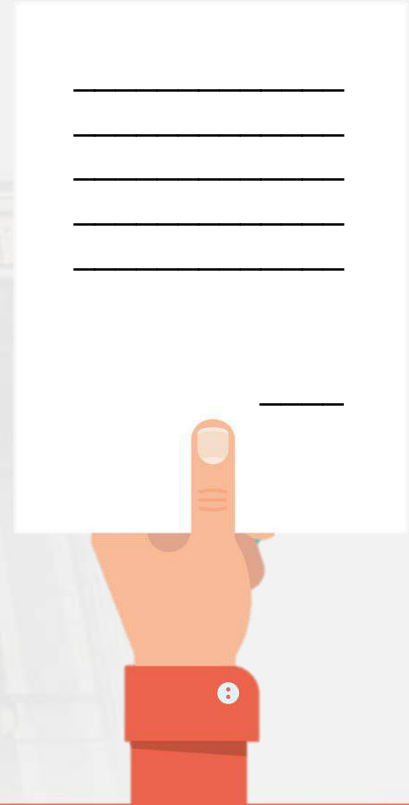
Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelengkapan.

Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa Perbaikan Permohonan

- ❑ Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.
- ❑ Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat, artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.

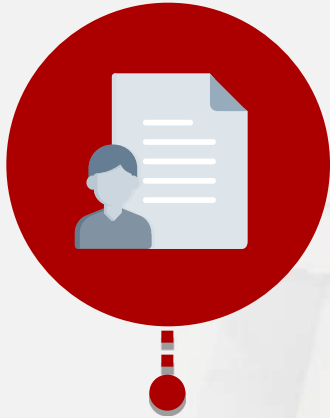


2. Pemeriksaan Persidangan

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.



Amar Putusan Mahkamah Konstitusi



Permohonan
Pemohon tidak dapat
diterima (NO)



Permohonan dikabulkan untuk
seluruhnya atau sebagian



Permohonan ditolak



Permohonan dikabulkan
secara bersyarat termasuk
menunda keberlakuan
putusan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA
Central Board of The Indonesian Youth Christian Movement

Sekretariat: Jl. Cirebon No 17, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10310
HP/WA: 0813 5489 2529 (Sekretaris Umum) / Email: dppgamki.su@gmail.com

Nomor : 121287/SU-GAMKI/EXT/B/I/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Sosialisasi**

Jakarta, 4 Februari 2026

Yang terhormat
Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
di tempat

Salam sejahtera,

Dengan penuh sukacita kami menjumpai Bapak, kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dalam setiap tugas dan tanggungjawab yang diemban.

Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen pada penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai konstitusional, kami Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menilai penting untuk memperkuat literasi konstitusi di kalangan generasi muda. Secara khusus dalam memahami kewenangan, proses, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Bukti nyata keterlibatan GAMKI dalam ruang-ruang konstitusi untuk advokasi dan edukasi masyarakat, maka kami membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GAMKI dan Lembaga Kajian Hukum dan Perundang-undangan (LKHP) GAMKI. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kerja sama dan fasilitas program edukasi konstitusional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. Bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan yang dimaksud besar harapan dapat dilaksanakan secara luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat literasi hukum dan konstitusi di kalangan pemuda, tetapi juga berkontribusi pada penguatan budaya sadar konstitusi, partisipasi demokratis yang sehat, serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Untuk konfirmasi selanjutnya, kiranya berkenan untuk menghubungi Ketua Umum (Sahat MP Sinurat: 0813 8927 2442) atau Sekretaris Umum (Alan Christian Singkali: 0813 5489 2529).

Teriring salam dan doa.

Ora Et Labora...!

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA
MASA BAKTI 2023-2026


Sahat M.P. Sinurat, S.T., M.T.
Ketua Umum


Alan Ch. Singkali, S.E., M.Si.
Sekretaris Umum

Tembusan: Arsip



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 5099/2600/DK.06.00/02/2026

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Telaah Permohonan Kerja Sama Kegiatan PPHKWN bagi
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)
Tanggal : 26 Februari 2026

Menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) nomor 121287/SU-GAMKI/EXT/B/I/2026 tanggal 4 Februari 2026 hal Permohonan Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. GAMKI adalah organisasi kepemudaan yang berkomitmen pada penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai konstitusional di Indonesia;
3. GAMKI mengajukan Permohonan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Proses Peradilan di Mahkamah Konstitusi;
4. GAMKI merupakan bagian dari warga negara dan organisasi yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan GAMKI menjadi peserta kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan dicatat sebagai salah satu target grup kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang akan diselenggarakan melalui pembelajaran secara daring (*aplikasi mklc.mkri.id*) pada Bulan Mei 2026 sebagai kelas kerja sama;
6. Terlampir kami sampaikan konsep surat jawaban kepada GAMKI terkait usulan dimaksud. Sekiranya Bapak Sekjen tidak berpendapat lain, mohon berkenan Bapak Sekjen memberikan arahan dan persetujuan pada surat dimaksud, untuk selanjutnya kami DS dan sampaikan ke GAMKI.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon persetujuan dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk-257749584260226020509



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1337/DK.06.00/03/2026

02 Maret 2026

Lampiran : -

Hal : **Jawaban Permohonan Kerja Sama Kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

Yth. Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Bapak Sahat M.P. Sinurat, S.T., M.T.
di Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) nomor 121287/SU-GAMKI/EXT/B/I/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Permohonan Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan yang dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara melalui kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, GAMKI merupakan bagian dari warga negara dan organisasi yang menjadi salah satu target grup kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berkenaan dengan hal tersebut, permohonan GAMKI akan kami agendakan dalam kelas kerja sama kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (aplikasi mklc.mkri.id) pada bulan Mei 2026 dan akan kami koordinasikan kemudian. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak WhatsApp Hotline Pusdik 0851-5792-9660 pada hari dan jam kerja.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk-920886414260302104524](#)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 427/DK.06.00/04/2026

22 April 2026

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Undangan Rapat Koordinasi Kegiatan dengan GAMKI**
(Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia)

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 22 April 2026

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-965213238260422090414

Lampiran Surat

Nomor : 427/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 22 April 2026

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Chafid Sugianto
9. Edwin Aditya Irawan
10. Angga Putri Gardina
11. Muhlis Nova
12. Bambang Sugito
13. Suhardi
14. William Ivan Nathanael Panggabean





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 428/DK.06.00/04/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

22 April 2026

Yth. Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Bapak Sahat M.P. Sinurat, S.T., M.T.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melalui platform *e-learning* MKLC. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud, kami mengundang Bapak dan/atau anggota yang lain untuk dapat menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

hari, tanggal : Rabu, 22 April 2026
waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk63754308260422082357



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 9350/2600/DK.00/04/2026

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan PPHKWN
bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)
Tanggal : 24 April 2026

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada hari Rabu, 22 April 2026 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh:
 - a. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - b. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), antara lain:
 1. Saddam Sitorus, S.H. (LBH GAMKI)
 2. Chandra, S.H. (LBH GAMKI)
 3. Tamtam Butarbutar, SH. M.Kn. (LKHP GAMKI)
 4. Ferdio Simanjuntak, SH (LKHP GAMKI)
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) akan dilaksanakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan *Platform e-learning MKLC* pada tanggal **18 Mei s.d. 05 Juni 2026** dengan jumlah peserta sebanyak 150–300 orang.
3. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk menyusun daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan serta berupaya memenuhi kuota peserta yang telah direncanakan.



4. Ketentuan Pembiayaan:
- Biaya paket data internet peserta selama mengikuti kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta;
 - Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - Peserta tidak dipungut biaya apapun selama kegiatan;
 - Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memberikan uang saku kepada peserta.
5. Adapun rencana Narasumber yang akan menyampaikan materi melalui *Zoom Meeting*, sebagai berikut:

No	Nama Narasumber	Hari, Tanggal	Materi
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Senin, 18 Mei 2026	Pembukaan
2.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H / Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Selasa, 26 Mei 2026	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
3.	YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Selasa, 2 Juni 2026	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

6. Sebagai bahan pendukung, terlampir kami sampaikan notulensi rapat dimaksud.
7. Kami lampirkan pula konsep Surat Pemanggilan Peserta kegiatan PPHKWN dimaksud.

Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami haturkan terima kasih

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Lampiran I
Nota Dinas
Nomor : 9350/2600/DK.00/04/2026
Tanggal : 24 April 2026

Notulensi Rapat

Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)

Hari, Tanggal : Rabu, 22 April 2026

Waktu : Pukul 14.10 s.d. 15.12 WIB

Tempat : Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta Rapat : 1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Peserta yang Berbicara pada Rapat : 1. Mundiri;
2. Santhy Kustrihardiani;
3. Saddam Sitorus;
4. Chandra;
5. Tamtam Butarbutar;
6. Ferdio Simanjuntak.

A. Rapat dimulai pada pukul 14.10 WIB

B. Hasil Rapat:

1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei s.d 05 Juni 2026 dengan jumlah peserta diperkirakan sekitar 150-300 orang;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan kegiatan PPHKWN dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan *Platform e-learning* MKLC. Biaya paket internet peserta selama kegiatan menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
3. Pihak GAMKI diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta kegiatan paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih



lanjut nantinya ke dalam sistem informasi Pusdik.

4. Pihak GAMKI mengusulkan untuk kegiatan pendidikan dilakukan secara *offline* agar materi pembelajaran dapat diterima secara sempurna.
5. Pihak GAMKI akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk menyusun daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan serta berupaya memenuhi kuota peserta yang telah direncanakan.
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan GAMKI sepakat untuk membentuk grup WhatsApp sebagai sarana koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan.
7. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada pimpinan.

C. Pokok-pokok Pembicaraan dalam Rapat

Mundiri	: Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara (materi paparan terlampir), terdiri dari: a. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila; b. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; c. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; d. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; e. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; f. Sistem Informasi Perkara Elektronik. g. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; h. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan PPHKWN akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi <i>Zoom Meeting</i> dan <i>Platform e-learning</i> MKLC. Biaya paket internet peserta selama kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi
---------	---



		pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan. Pihak GAMKI diharapkan dapat mengikutsertakan sekitar 150–300 peserta untuk mengikuti kegiatan PPHKWN.
Chandra Sitorus	:	Apakah panitia GAMKI harus membuka pendaftaran terlebih dahulu atau seluruh peserta langsung mendaftar secara pribadi di MKLC?
Mundiri	:	Pusdik akan mengirimkan surat pemanggilan peserta terlebih dahulu kepada panitia GAMKI. Setelah itu, panitia GAMKI wajib memberikan nama calon peserta kepada Pusdik.
Chandra Sitorus	:	GAMKI memiliki 300 cabang. Kami berencana akan membuat <i>flyer</i> . Apakah boleh mencantumkan logo MK di <i>flyer</i> kami?
Santhy K	:	- Nantinya Pusdik akan mengirimkan surat pemanggilan peserta. Setelah itu mohon bantuan pengurus GAMKI untuk menjaring peserta dan memasukkan peserta ke dalam grup WA yang akan Pusdik sediakan. - Berkaitan dengan <i>flyer</i>, kami persilakan jika GAMKI akan membuat <i>flyer</i> untuk menjaring peserta. - Apakah bisa disepakati terkait tanggal pelaksanaan kegiatan? - Nanti Pusdik akan membuat grup WA untuk panitia GAMKI.
Chandra Sitorus	:	Terkait tanggal pelaksanaan akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan pengurus GAMKI yang lain. Maksimal 2 hari lagi akan kami sampaikan terkait tanggal pelaksanaan kegiatan.
Santhy K	:	Kira-kira ada berapa jumlah anggota GAMKI?
Chandra Sitorus	:	Berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia.
Saddan Sitorus	:	Apakah semua kegiatan melalui Zoom?
Santhy K	:	Kegiatan akan dilakukan dengan menggunakan metode <i>blended learning</i> secara daring melalui aplikasi <i>Zoom Meeting</i> dan <i>Platform e-learning</i> MKLC.
Saddan Sitorus	:	Terdapat plus minus kegiatan yang diselenggarakan melalui Zoom. Apakah masih ada kemungkinan kegiatan dilaksanakan secara <i>offline</i> ?
Agung Tamtam Sanjaya	:	Apakah dapat dipertimbangkan kembali untuk melaksanakan kegiatan secara <i>offline</i> ? Karena ketika penyelenggaraan kegiatan secara <i>offline</i> , materi akan menjadi mudah untuk dipahami oleh peserta.
Mundiri	:	Sudah menjadi arahan pimpinan bahwa kegiatan pendidikan di tahun 2026 akan diselenggarakan menggunakan MKLC dan <i>Zoom Meeting</i>. Nanti masukan bapak-bapak akan kami sampaikan kepada



		pimpinan dan pihak terkait.
Saddan Sitorus	:	Kalau menurut saya, kelemahan dari Zoom adalah akan ada gangguan internal dll, lalu juga akan ada pembatasnya. Mungkin masih bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan MK terkait penyelenggaraan secara <i>offline</i> mengingat sangat pentingnya kegiatan ini bagi GAMKI.
Mundiri	:	Pemerintah RI telah mencanangkan sistem pemerintahan elektronik. Dengan segala hormat karena ini sudah kebijakan, kami mohon maaf untuk kegiatan pendidikan di tahun ini akan diselenggarakan dengan menggunakan Zoom dan MKLC.
Ferdio P Simanjuntak	:	Kami sangat mengapresiasi. Nanti terkait hal teknis lainnya akan kami bicarakan melalui grup WA.
Santhy K	:	Sejak tahun 2025, Pusdik diberikan mandat untuk menyelenggarakan kegiatan secara <i>online</i> melalui <i>Zoom Meeting</i> . Di tahun 2026, Pusdik juga dimandatkan untuk menyelenggarakan pendidikan menggunakan <i>e-learning</i> MKLC dan <i>Zoom Meeting</i> . Terkait tanggal pelaksanaan kegiatan, akan kami tunggu informasinya melalui grup WA panitia.

D. Rapat ditutup pada pukul 15.12 WIB

E. Dokumentasi

KONSEP JADWAL KEGIATAN PPHKWN BAGI GAMKI

NO	KEGIATAN	WAKTU	LOKASI	KELOMPOK
1	Pembukaan	08.00 - 08.30	Online	100%
2	Pembahasan Materi	08.30 - 10.00	Online	100%
3	Pembahasan Materi	10.00 - 11.30	Online	100%
4	Pembahasan Materi	11.30 - 12.00	Online	100%
5	Pembahasan Materi	12.00 - 13.00	Online	100%
6	Pembahasan Materi	13.00 - 14.00	Online	100%
7	Pembahasan Materi	14.00 - 15.00	Online	100%
8	Pembahasan Materi	15.00 - 16.00	Online	100%
9	Pembahasan Materi	16.00 - 17.00	Online	100%
10	Pembahasan Materi	17.00 - 18.00	Online	100%
11	Pembahasan Materi	18.00 - 19.00	Online	100%
12	Pembahasan Materi	19.00 - 20.00	Online	100%
13	Pembahasan Materi	20.00 - 21.00	Online	100%
14	Pembahasan Materi	21.00 - 22.00	Online	100%
15	Pembahasan Materi	22.00 - 23.00	Online	100%
16	Pembahasan Materi	23.00 - 24.00	Online	100%
17	Pembahasan Materi	24.00 - 25.00	Online	100%
18	Pembahasan Materi	25.00 - 26.00	Online	100%
19	Pembahasan Materi	26.00 - 27.00	Online	100%
20	Pembahasan Materi	27.00 - 28.00	Online	100%
21	Pembahasan Materi	28.00 - 29.00	Online	100%
22	Pembahasan Materi	29.00 - 30.00	Online	100%
23	Pembahasan Materi	30.00 - 31.00	Online	100%
24	Pembahasan Materi	31.00 - 32.00	Online	100%
25	Pembahasan Materi	32.00 - 33.00	Online	100%
26	Pembahasan Materi	33.00 - 34.00	Online	100%
27	Pembahasan Materi	34.00 - 35.00	Online	100%
28	Pembahasan Materi	35.00 - 36.00	Online	100%
29	Pembahasan Materi	36.00 - 37.00	Online	100%
30	Pembahasan Materi	37.00 - 38.00	Online	100%
31	Pembahasan Materi	38.00 - 39.00	Online	100%
32	Pembahasan Materi	39.00 - 40.00	Online	100%
33	Pembahasan Materi	40.00 - 41.00	Online	100%
34	Pembahasan Materi	41.00 - 42.00	Online	100%
35	Pembahasan Materi	42.00 - 43.00	Online	100%
36	Pembahasan Materi	43.00 - 44.00	Online	100%
37	Pembahasan Materi	44.00 - 45.00	Online	100%
38	Pembahasan Materi	45.00 - 46.00	Online	100%
39	Pembahasan Materi	46.00 - 47.00	Online	100%
40	Pembahasan Materi	47.00 - 48.00	Online	100%
41	Pembahasan Materi	48.00 - 49.00	Online	100%
42	Pembahasan Materi	49.00 - 50.00	Online	100%
43	Pembahasan Materi	50.00 - 51.00	Online	100%
44	Pembahasan Materi	51.00 - 52.00	Online	100%
45	Pembahasan Materi	52.00 - 53.00	Online	100%
46	Pembahasan Materi	53.00 - 54.00	Online	100%
47	Pembahasan Materi	54.00 - 55.00	Online	100%
48	Pembahasan Materi	55.00 - 56.00	Online	100%
49	Pembahasan Materi	56.00 - 57.00	Online	100%
50	Pembahasan Materi	57.00 - 58.00	Online	100%
51	Pembahasan Materi	58.00 - 59.00	Online	100%
52	Pembahasan Materi	59.00 - 60.00	Online	100%
53	Pembahasan Materi	60.00 - 61.00	Online	100%
54	Pembahasan Materi	61.00 - 62.00	Online	100%
55	Pembahasan Materi	62.00 - 63.00	Online	100%
56	Pembahasan Materi	63.00 - 64.00	Online	100%
57	Pembahasan Materi	64.00 - 65.00	Online	100%
58	Pembahasan Materi	65.00 - 66.00	Online	100%
59	Pembahasan Materi	66.00 - 67.00	Online	100%
60	Pembahasan Materi	67.00 - 68.00	Online	100%
61	Pembahasan Materi	68.00 - 69.00	Online	100%
62	Pembahasan Materi	69.00 - 70.00	Online	100%
63	Pembahasan Materi	70.00 - 71.00	Online	100%
64	Pembahasan Materi	71.00 - 72.00	Online	100%
65	Pembahasan Materi	72.00 - 73.00	Online	100%
66	Pembahasan Materi	73.00 - 74.00	Online	100%
67	Pembahasan Materi	74.00 - 75.00	Online	100%
68	Pembahasan Materi	75.00 - 76.00	Online	100%
69	Pembahasan Materi	76.00 - 77.00	Online	100%
70	Pembahasan Materi	77.00 - 78.00	Online	100%
71	Pembahasan Materi	78.00 - 79.00	Online	100%
72	Pembahasan Materi	79.00 - 80.00	Online	100%
73	Pembahasan Materi	80.00 - 81.00	Online	100%
74	Pembahasan Materi	81.00 - 82.00	Online	100%
75	Pembahasan Materi	82.00 - 83.00	Online	100%
76	Pembahasan Materi	83.00 - 84.00	Online	100%
77	Pembahasan Materi	84.00 - 85.00	Online	100%
78	Pembahasan Materi	85.00 - 86.00	Online	100%
79	Pembahasan Materi	86.00 - 87.00	Online	100%
80	Pembahasan Materi	87.00 - 88.00	Online	100%
81	Pembahasan Materi	88.00 - 89.00	Online	100%
82	Pembahasan Materi	89.00 - 90.00	Online	100%
83	Pembahasan Materi	90.00 - 91.00	Online	100%
84	Pembahasan Materi	91.00 - 92.00	Online	100%
85	Pembahasan Materi	92.00 - 93.00	Online	100%
86	Pembahasan Materi	93.00 - 94.00	Online	100%
87	Pembahasan Materi	94.00 - 95.00	Online	100%
88	Pembahasan Materi	95.00 - 96.00	Online	100%
89	Pembahasan Materi	96.00 - 97.00	Online	100%
90	Pembahasan Materi	97.00 - 98.00	Online	100%
91	Pembahasan Materi	98.00 - 99.00	Online	100%
92	Pembahasan Materi	99.00 - 100.00	Online	100%

Participants: Mundiri_MK, Dina Gardina, Hadian Taofik Rochman, Tior MK, Santi_MK, MC_Edwin Aditya Irawan, Saddan Sitorus, Agung Tamtam Sanjaya, Ferdio P Simanjuntak SH (L), Santhy KustriHidriani, Chandra Sitorus LBH GAMKI, Chafid Supianto, Bambang Sukm..., Theryna Werneni D.



Lampiran II

Nota Dinas

Nomor : 9350/2600/DK.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 05 Juni 2026

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting* dan *platform* MKLC

Peserta : Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Zoom
	15.30 – 16.00	Penjelasan MKLC	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal MK 4. Sambutan Ketua Umum GAMKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua Umum GAMKI YM Ketua MK	Zoom
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - Selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Selasa, 26 Mei 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H / Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Moderator: Dr. Achmad Edi Subiyanto. S.H., M.H.	Zoom & MKLC



Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Zoom & MKLC
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia	MKLC





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1929/DK.06.00/04/2026
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Permintaan Data Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN)

24 April 2026

Yth. Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Bapak Sahat M.P. Sinurat, S.T., M.T.
di Jakarta

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei s.d. 05 Juni 2026 dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan *Platform e-learning* MKLC.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150-300 orang** anggota pada Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 11 Mei 2026** (ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Peserta wajib bergabung pada grup WhatsApp untuk mengetahui informasi terkait penyelenggaraan kegiatan melalui tautan <https://bit.ly/PPHKWN2026GAMKI> dengan menyertakan nama lengkap dan foto diri/pas foto pada pengaturan profil sebelum bergabung dalam grup tersebut untuk diverifikasi oleh admin.

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660** sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405718050260424040555

Lampiran I

Nomor : 1929/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

**KETENTUAN KEPESERTAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **150-300 orang** anggota pada Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.
- b. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **150-300 orang** orang paling lambat pada tanggal **11 Mei 2026**.
- c. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **150-300 orang** dimaksud.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).
- e. Peserta bergabung pada grup WhatsApp untuk mengetahui informasi terkait penyelenggaraan kegiatan melalui tautan <https://bit.ly/PPHKWN2026GAMKI> atau scan *barcode* di bawah ini



2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Mahkamah Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1929/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

PEDOMAN KEGIATAN *BLENDED LEARNING*
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, seluruh peserta wajib bergabung ke dalam grup WhatsApp (*link* dan *barcode* telah tertera pada Lampiran I) untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dan verifikasi akun dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui grup WhatsApp oleh Pusdik MK.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
- b. Peserta akan menggunakan *username* dan *password* akun di laman mklc.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan perangkat komputer/laptop yang memadai yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan platform *e-learning* MKLC. Aplikasi *Zoom Meeting* ini tersedia gratis serta bisa diakses di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
- g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nama Lengkap>_<Asal Instansi/Organisasi>
- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.



- j. Pada saat sesi materi interaktif berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib menyelesaikan seluruh materi pembelajaran maupun tugas yang diberikan melalui *platform* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III
Nomor : 1929/DK.06.00/04/2026
Tanggal : 24 April 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 05 Juni 2026**
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting* dan *platform* MKLC
Peserta : Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PANITIA	LOKASI
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Zoom
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan MKLC	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal MK 4. Sambutan Ketua Umum GAMKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua Umum GAMKI YM Ketua MK	Zoom
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 WIB - Selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia	MKLC
Selasa, 26 Mei 2026	09.00 – 11.00 WIB	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: Hakim Konstitusi	Zoom & MKLC
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 WIB - Selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi: - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia	MKLC



Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran Interaktif melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber: Hakim Konstitusi	Zoom & MKLC
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 WIB - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi: - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang - Post Test	Panitia	MKLC



Lampiran IV

Nomor : 1929/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA**

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif WA)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
300				



Lampiran V

Nomor : 1929/DK.06.00/04/2026

Tanggal : 24 April 2026

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini ... menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi/Organisasi
1.			
2.			
3.			
...			
300.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 05 Juni 2026

Tempat : Secara daring (*online*) dengan metode *blended learning* melalui aplikasi Zoom Meeting & MKLC

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
[pejabat yang berwenang]
Ttd
[nama lengkap]





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 9374/2600/DK.06.00/05/2026

Yth. : 1. Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
3. Bapak Kepala Biro Umum

Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal : Permohonan Dukungan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)

Tanggal : 11 Mei 2026

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026, serta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026 yang akan diselenggarakan secara online melalui aplikasi *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan kegiatan dimaksud, sebagai berikut:

1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Fasilitasi aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran dalam penyelenggaraan kegiatan dengan kapasitas maksimal 300 (tiga ratus) orang;
 - b. 1 (satu) orang Operator Zoom Meeting pengelola jaringan, dan *troubleshooting*, yang akan bertugas di Ruang Rapat Lt. 10 Gedung 1 pada sesi sebagaimana terlampir;
 - c. 1 (satu) orang yang melakukan setting pada perangkat elektronik di ruang kerja Ruang Rapat Lt. 10 Gedung 1 atau Ruang kerja YM Hakim Konstitusi (sesuai arahan lebih lanjut).
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (bertugas di Jakarta)
 - a. 1 (satu) orang Operator vMix: Live Video Streaming, tenaga desain dan publikasi;
 - b. 1 (satu) orang Kameramen;
 - c. 1 (satu) orang tim peliputan dalam rangka sebagai reporter/penulis berita;
3. Biro Umum
 - a. Fasilitasi 1 (satu) unit komputer laptop untuk pengaturan pin tampilan zoom narasumber.

Dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud, kami lampirkan jadwal kegiatan dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk1026778011260511013008

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 9374/2600/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 11 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 5 Juni 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 9374/2600/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 11 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (PERATIN)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 25 Mei s.d. 12 Juni 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Kamis, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 542/DK.06.00/05/2026

08 Mei 2026

Lampiran : 2 (satu) lembar

Perihal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci
dan Membuka Acara**

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Suhartoyo

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Tempat
PPHKWN bagi GAMKI	Senin, 18 Mei 2026	16.00 – 17.00 WIB	Secara online Melalui <i>Zoom Meeting</i>
PPHKWN bagi PERATIN	Senin, 25 Mei 2026	16.00 – 17.00 WIB	

Demikian permohonan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-812953685260508091713

Lampiran I
 Nomor : 542/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	09.00 – 11.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran II

Nomor : 542/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 572/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Memberikan Sambutan**
Pembukaan Kegiatan

12 Mei 2026

Yth. Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Bapak Sahat M.P. Sinurat, S.T., M.T.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026 secara online melalui *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan pada agenda pembukaan dimaksud, pada:

Hari, Tanggal : Senin, 18 Mei 2026

Waktu : pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB

Tempat : secara online melalui Zoom Meeting

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk877215633260512053029

Lampiran surat
 Nomor : 572/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 12 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 5 Juni 2026
 Tempat : secara online melalui *e-learning* MKLC & Zoom Meeting
 Peserta : Anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI YM Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 546/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

08 Mei 2026

YM. Hakim Konstitusi
Ibu Enny Nurbaningsih
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 05 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Moderator
PPHKWN bagi GAMKI	Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Abdul Basid Fuadi
PPHKWN bagi PERATIN	Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB		Oly Viana Agustine

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1746476807260508021756

Lampiran I

Nomor : 546/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme. b. Supremasi Konstitusi. c. Materi Muatan Konstitusi. d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. e. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 546/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III

Nomor : 546/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Kamis, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 549/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

08 Mei 2026

Kepada Yth. :

- 1. Bapak Abdul Basid Fuadi;**
 - 2. Ibu Oly Viana Agustine.**
- di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 05 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada :

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Moderator	Materi
PPHKWN bagi GAMKI	Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00 WIB	Abdul Basid Fuadi	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
PPHKWN bagi PERATIN	Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Oly Viana Agustine	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

- Bapak Sekretaris Jenderal;
- Bapak Plt. Panitera.



Digital Signature
mk1485116352260508025324

Lampiran I

Nomor : 549/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL MODERATOR
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)
DAN
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (PERATIN)

Hari, Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026 & Jumat, 5 Juni 2026

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Kegiatan	HARI	WAKTU	MATERI	MODERATOR
PPHKWN bagi GAMKI	Selasa, 26 Mei 2026	16.00-18.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
PPHKWN bagi PERATIN	Jumat, 5 Juni 2026	16.00-18.00 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.



Lampiran II

Nomor : 549/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Selasa, 2 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III

Nomor : 549/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Umum Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Kamis, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Jumat, 5 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 671/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Mei 2026

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Suhartoyo

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
PPHKWN bagi GAMKI	Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	YM Ketua MK – Suhartoyo dan YM Wakil Ketua MK – Saldi Isra
PPHKWN bagi PERATIN	Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB		

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk361755132260526081412

Lampiran I

Nomor : 671/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 27 Mei 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II
 Nomor : 671/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi Zoom Meeting	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	15.00 – 17.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Triyono Edy Budhiarto, S.H
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III

Nomor : 671/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA
(PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa, 9 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 670/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Mei 2026

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Saldi Isra
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026, serta kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN)** pada tanggal 25 Mei s.d. 12 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Kegiatan	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Narasumber
PPHKWN bagi GAMKI	Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	YM Ketua MK – Suhartoyo dan
PPHKWN bagi PERATIN	Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB		YM Wakil Ketua MK – Saldi Isra

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-384217791260526081228

Lampiran I

Nomor : 670/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 27 Mei 2026

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II
 Nomor : 670/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi Zoom Meeting	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	15.00 – 17.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Triyono Edy Budhiarto, S.H
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia



Lampiran III
 Nomor : 670/DK.06.00/05/2026
 Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERKUMPULAN ADVOKAT TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (PERATIN)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 25 Mei 2026	14.30 – 15.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	15.00 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua Peratin 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua PERATIN Ketua MK
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d 4 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	Panitia
Senin, 8 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Selasa, 9 Juni 2026	16.00 – 18.00 WIB	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi: Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Juni 2026	08.00 – selesai WIB	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 672/DK.06.00/05/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

27 Mei 2026

Kepada Yth.,
Bapak Triyono Edy Budhiarto

di tempat

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)** pada tanggal 18 Mei s.d. 05 Juni 2026. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan dengan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026
Waktu : 16:00 – 18:00 WIB
Materi : MK dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp Hotline Pusdik **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Plt. Panitera.



Digital Signature
mk-357068305260527115121

Lampiran I

Nomor : 672/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL FASILITATOR
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

Hari, Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

Kegiatan	HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
PPHKWN bagi GAMKI	Rabu, 3 Juni 2026	16.00-18.00 WIB	MK dan Hukum Acara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Triyono Edy Budhiarto, S.H



Lampiran II

Nomor : 672/DK.06.00/05/2026

Tanggal : 27 Mei 2026

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
Senin, 18 Mei 2026	14.30 – 15.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi Zoom Meeting	Panitia
	15.00 – 15.30	Penjelasan Teknis Kegiatan	Kapusdik
	15.30 – 16.00	Penjelasan Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)	Panitia
	16.00 – 17.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Sambutan Ketua GAMKI 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 5. Mars Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Umum GAMKI Ketua MK
Selasa s.d. Senin, 19 s.d 25 Mei 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk: - Pre test - Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Panitia
Selasa, 26 Mei 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. Moderator: Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.
Rabu s.d. Senin, 27 Mei s.d. 1 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 - Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Panitia
Rabu, 3 Juni 2026	16.00 – 18.00	Pembelajaran melalui Zoom untuk Sesi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator: Triyono Edy Budhiarto, S.H.
Rabu s.d. Jumat, 3 s.d. 5 Juni 2026	08.00 - selesai	Pembelajaran mandiri melalui MKLC untuk Sesi : - Sistem Informasi Perkara Elektronik - Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang - Post Test	Panitia





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor 297/2000/05/2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), dipandang perlu untuk menghadiri kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	Penugasan	Tanggal
1.	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>	<i>terlampir</i>



Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) secara daring melalui media pembelajaran *zoom meeting* dan *e-learning Mahkamah Konstitusi Learning Center* (MKLC) pada tanggal 18 Mei s.d. 5 Juni 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Mei 2026

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-1113238175260518043750

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 297/2000/05/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (GAMKI)

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	18 Mei dan 2 Juni 2026
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	2 Juni 2026
3.	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	26 Mei 2026
4.	Mardian Wibowo	Moderator	2 Juni 2026
5.	Abdul Basid Fuadi	Moderator	26 Mei 2026
6.	Mundiri	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
7.	Santhy Kustrihardiani	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
8.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
9.	Bambang Sukmadi	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
10.	Medi Kurniadi	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
11.	Santi Widiastuti	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
12.	Hadian Taofik Rochman	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
13.	Muhlis Nova	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
14.	Chafid Sugianto	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
15.	Angga Putri Gardina	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
16.	Bambang Sugito	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
17.	Suhardi	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
18.	William Ivan Nathanael P.	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
19.	Wiwit Roso Putro	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
20.	M. Indra Saputra	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
21.	Ernawati	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
22.	Suharjanto	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026



23.	Nur Rakhman	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
24.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
25.	Teguh Birawaputra	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026
26.	Hendy Prasetyawiguna	Panitia	18 Mei s.d. 5 Juni 2026





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT KETERANGAN

Nama : Mundi
NIP : 196908081990121001
Jabatan : PPK VIII

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai narasumber menyampaikan materi pada tanggal 3 Juni 2026;
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut berbeda dengan jadwal yang tercantum dalam Surat Tugas tanggal 2 Juni 2026, dikarenakan adanya perubahan jadwal yang telah dikoordinasikan dan disepakati oleh para pihak;
3. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan tidak mengurangi substansi dan kualitas materi yang disampaikan dalam kegiatan dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen VIII,

Mundi



Digital Signature
[mk1482057243260611035832](#)



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA**

Central Board of The Indonesian Youth Christian Movement

Sekretariat: Jl. Cirebon No 17, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10310
HP/WA: 0813 5489 2529 (Sekretaris Umum) / Email: dppgamki.su@gmail.com

Nomor : 121365/SU-GAMKI/EXT/B/V/2026
Lamp : Daftar Peserta
Perihal : **Surat Tugas**

Jakarta, 11 Mei 2026

bertandatangan di bawah ini:

nama : Sahat Martin Philip Sinurat, S.T., M.T.
jabatan : Ketua Umum DPP GAMKI

nama : Alan Christian Singkali, S.E., M.Si.
jabatan : Sekretaris Umum DPP GAMKI

dengan ini memberikan tugas kepada:

nama : terlampir
jabatan : terlampir

untuk mengikuti Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia pada:

hari, tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 Mei s.d. 05 Juni 2026

tempat : secara daring (Zoom Meeting & MKLC)

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Teriring salam dan doa.

Ora Et Labora...!

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA
MASA BAKTI 2023-2026**


Sahat M.P. Sinurat, S.T., M.T.
Ketua Umum


Alan Ch. Singkali, S.E., M.Si.
Sekretaris Umum

Tembusan: Arsip



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

Central Board of The Indonesian Youth Christian Movement

Sekretariat: Jl. Cirebon No 17, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10310
HP/WA: 0813 5489 2529 (Sekretaris Umum) / Email: dppgamki.su@gmail.com

DATA PESERTA PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

NAMA	JABATAN	KAB/KOTA	PROVINSI	NO. CONTACT	EMAIL
Albert Josua Putera Maliogha, MTS.	Pengurus DPD	Kota Surakarta	Jawa Tengah		
Novriadi Sitompul, S.Hum.	Kader	Kab. Tapanuli Utara	Sumatera Utara		
Stella Matitaputty, S.E., M.Pd., CFP.	Pengurus DPD	Kota Ambon	Maluku		
Sarindan Harry Solomon, A.Md.	Kader	Kab. Natuna	Kepulauan Riau		
Priscilla Ariany Indratama, S.TP.	Pengurus DPD	Kota Semarang	Jawa Tengah		
Eric Mangiri	Kader	Kota Sorong	PBD		
Maya Indriani Yacob Impak, S.E., M.Si	Sekretaris DPD	Kota Makassar	Sulawesi Selatan		
Michael Kendek, S.Pd.	Pengurus DPD	Kota Makassar	Sulawesi Selatan		
Hendri Vander Eugara, S.E.	Kader	Kab. Maluku Barat Daya	Maluku		
Oktavianus Hutalaean, S.Sos.	Pengurus DPD	Kota Medan	Sumatera Utara		
Ricky Thomas Rungu, S.K.M.	Ketua DPC	Kota Bitung	Sulawesi Utara		
Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H.	Kader	Kab. Pelalawan	Sumatera Utara		
Loda Ana Rara, S.Kom	Pengurus DPC	Kab. Sumba Timur	NTT		
Daniel Marlihot Silaban, S.H.	Ketua DPC	Kab. Pelalawan	Riau		
Rocky Marciano Ambar, S.H., LL.M., M.Kn.	Kader	Kab. Minahasa Utara	Sulawesi Utara		
Juni Henti Putri, S.Pd., Kons.	DPP	Kota Jakarta	DKI Jakarta		
Soetjahyono Tukiran, S.H.	Senior	Kota Jayapura	Papua		
Stefanus Lowu, S.H.	Pengurus DPC	Kab. Sumba Timur	NTT		
Christy Alfin Sonisa, S.Pd., S.H.	DPP	Kota Ambon	Maluku		
Ester Giovani Govin Makikui, S.Tr.IP.	Pengurus DPC	Kab. Sangihe	Sulawesi Utara		
Ricardo Jonatan Tutuanger, S. Pd.Gr.	Pengurus DPC	Kota Medan	Sumatera Utara		
Merlinee Pigoue, S.Pi	Kader	Kota Ambon	Maluku		
Lamhot Lambertus Siberani, S.H.	Pengurus DPC	Kota Medan	Sumatera Utara		
Putra Nataba Manallang	Kader	Kab. Tapanuli Utara	Sumatera Utara		
May Jessy Pangkalant Batuah, S. H.	Sekretaris DPD	Kota Pontianak	Kalimantan Barat		
Yelfani Neti Manurung, S. Pd.	Kader	Kab. Tapanuli Utara	Sumatera Utara		
Leonardo, S.H.	Pengurus DPC	Kab. Bekasi	Jawa Barat		
Romartu Situngkir, S. Sos.	DPP	Kota Jakarta	DKI Jakarta		
Ance Wally, S.Pd.	Wakil Ketua DPD	Kota Jayapura	Papua		
Natasya Brigita Masura, S. Tr.T.	Pengurus DPD	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara		

Tema: "Pulihkanlah Bangsa Kami" (Band. Mazmur 80)

Subtema: Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen yang Transformatif dan Inovatif



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

Central Board of The Indonesian Youth Christian Movement

Sekretariat: Jl. Cirebon No 17, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10310
HP/WA: 0813 5489 2529 (Sekretaris Umum) / Email: dppgamki.su@gmail.com

Risnal Ray, S.Pd.	Sekretaris DPC	Kab. Halmahera Barat	Mahuku Utara
Fransisca Susilawaty Br Purba, S.S.	Pengurus DPD	Kota Medan	Sumatera Utara
Albert Palangda, S.E	Ketua DPD	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
Dzulkipli Sanjani, S.Th.	Pengurus DPC	Kab. Kolaka	Sulawesi Tenggara
Feybe Indrini Madonsa, S.T.	Ketua DPC	Kab. Sangihe	Sulawesi Utara
Devita Ratu Tandrapak	Kader	Kab. Toraja Utara	Sulawesi Selatan
Neles Weipo, S.Pd.	Wakil Ketua DPC	Kab. Merauke	Papua Selatan
Beniel Obaja Doludy, S.A.P.	Kader	Kab. Maluku Barat Daya	Maluku
Armento Umbu Temu, S.A.P., M.A.P.	Pengurus DPC	Kab. Sumba Timur	NTT
Alpian Oti Magho, S.H., M.H.	Sekretaris DPC	Kab. Sumba Barat	NTT
Leo Josten Sagala, S.Kom.	Pengurus DPC	Kota Medan	Sumatera Utara
Daniel Demmanora S, S.P.	Kader	Kab. Mamasa	Sulawesi Barat
Melkisedek Kris Hot Asi Manatu, S.I.P.	Wakil Sekretaris DPD	Kota Jayapura	Papua
Melkias Raubaba, S.Pd., M.Pd.	Ketua DPC	Kab. Pinrang	Sulawesi Selatan
Weljan Ridho Pagora, A.Md.	Ketua DPC	Kab. Kep. Mentawai	Sumatera Barat
Adrianus Sandy Kalimbong, S.Hut.	Kader	Kota Makassar	Sulawesi Selatan
Martinus Edwin Ferdinand Thanos, S.Ak., M.I.Kom.	DPP	Kota Tangerang Selatan	Banten
Finkli Katamona	Kader	Kab. Minahasa Utara	Sulawesi Utara
Freterly William Manuputy, S.Si.Tol., M.A.	Pengurus DPD	Kota Ambon	Maluku
Glendy Switly Umbah, S.Th., M.Th.	Kader	Kab. Sintang	Sulawesi Utara
Hermanto Romora S	Ketua DPD	Kota Pekanbaru	Riau
Danang Dwi Kristiyanto, S.Si.	Pengurus DPD	Kota Semarang	Jawa Tengah
DR Yudi Hendria, M.Pd.	Sekretaris DPD	Kota Semarang	Jawa Tengah
Linda Maria, A.Md.	Pengurus DPC	Kota Medan	Sumatera Utara
Melkias, S.E.	Ketua DPC	Kab. Pinrang	Sulawesi Selatan
Pdt. Yohanis Paranta, S.Th.	Senior	Kab. Luwu Utara	Sulawesi Selatan
Pdt. Sufridi Mei Subendra, M.Th.	Kader	Kab. Toraja Utara	Sulawesi Selatan
Mayuneker Ponso	Kader	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
Melvianus Tantu Boku, S.H.	Pengurus DPC	Kab. Sumba Timur	NTT
Innas Saputra, S.E., S.Ak.	Pengurus DPD	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat
Dr. Richard Marsilio Waas, S.H., M.H.	Kader	Kota Medan	Sumatera Utara
Ondi Yohan Tambunan, S.Sn.	Kader	Kota Medan	Sumatera Utara



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

Central Board of The Indonesian Youth Christian Movement

Sekretariat: Jl. Cirebon No 17, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10310
HP/WA: 0813 5489 2529 (Sekretaris Umum) / Email: dppgamki.su@gmail.com

Paulus Hasiholan Bayanahor	Kader	Kota Tanjungpinang	Kepulauan Riau	
Adv. Jufri Bayar, S.H.	Pengurus DPC	Kota Ternate	Maluku Utara	
Ronailan Ronailan Ndakulak, S.H.	Pengurus DPC	Kab. Sumba Timur	NTT	
Daniel Salelatang, S.T., M.A.P.	DPP	Kota Bihung	Sulawesi Utara	
Dewi Pika Lbi Batu, S.H., M.H.	Pengurus DPD	Kota Medan	Sumatera Utara	
Andakawan Danumartita, S.M.	Pengurus DPC	Kab. Pinrang	Sulawesi Selatan	
Marojahan Hutabarat, S.H., M.H.	Kader	Kota Jakarta	DKI Jakarta	
Joshua Samuel Hutapea	Kader	Kota Surabaya	Jawa Timur	
Andriany Tandi, S.H., M.H.	Bendahara DPD	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	
Agnes Caroline Maundeng, S.K.M., M.P.H.	Kader	Kota Manado	Sulawesi Utara	
Christian Emy Toda Watu, S.H.	Pengurus DPC	Kab. Sumba Barat	NTT	
Valentino Albertho Mirino, S.T.	Wakil Ketua DPD	Kota Jayapura	Papua	
Gilbert Putra Imozen Saragih	Pengurus DPC	Kota Medan	Sumatera Utara	
Erwin Septiarnan Zega, S.H.	Pengurus DPC	Kota Salatiga	Jawa Tengah	
Rismayanti, S.Pd.Gr.	Kader	Kab. Toraja Utara	Sulawesi Selatan	
Ir. Martinus Satria Talebong, S.Hut.	Senior	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	
Meiyer F. S. Damima, S.E.	Ketua DPC	Kab. Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	
Feryanto Hb, S.H., M.H., NLP.	Pengurus DPC	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	
Kevin K. Runtukahu, S.IP.	Wakil Bendahara DPD	Kota Jayapura	Papua	
Suwandi, S.Pd.Gr.	Pengurus DPC	Kota Medan	Sumatera Utara	
Arbie Sadputra Haman, S.I.P.	DPP	Kota Jakarta	DKI Jakarta	
Dr. Sostones Y Sisimanu, S.H., M.Hum.	Pengurus DPD	Kota Ambon	Maluku	
Linda Trisnawati, S.T.	Pengurus DPC	Kota Medan	Sumatera Utara	
Lourens Batuwael	Kader	Kota Ambon	Maluku	
Daniel Darwis, S.Pd., M.Pd., C.Med.	Pengurus DPD	Kota Jakarta	DKI Jakarta	
Des Alpin, S.H.	Kader	Kota Jakarta	DKI Jakarta	
Natalianus Paembe Sarulallo, S.E.	Senior	Kab. Toraja Utara	Sulawesi Selatan	
Wilhelmus Labobar, S.Pd., M.Pd.	Pengurus DPD	Kota Ambon	Maluku	
Herson B.K. S.IP.	Kader	Kab. Minahasa	Sulawesi Barat	
Leny Yan Palebaugan, S.T.	Kader	Kab. Toraja Utara	Sulawesi Selatan	
William Paas, S.H., M.H.	Pengurus DPC	Kota Salatiga	Jawa Tengah	
Timothy Caesar, S.H.	Kader	Kab. Bekasi	Jawa Barat	



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

Central Board of The Indonesian Youth Christian Movement

Sekretariat: Jl. Cirebon No 17, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10310
HP/WA: 0813 5489 2529 (Sekretaris Umum) / Email: dppgamki.su@gmail.com

Prandy Arthayoga Louk Fanggi, S.H., M.H.	Sekretaris DPD	Kota Mataram	NTB	
Imayanti Lebon, S.Th.	Pengurus DPC	Kab. Pinrang	Sulawesi Selatan	
Sawatoma Tafonao, S.Th.	Kader	Kota Pare-Pare	Sulawesi Selatan	
Wilson Zalogo, M.Pd., M.Si	Kader	Kota Batam	Kepulauan Riau	
Yeremia Louis Tongan Paat, S.H.	Pengurus DPD	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	
Ryan Silambi, S.T.	Sekretaris DPD	Kota Sorong	PBD	
Haniel Alfred Alexander, S.E., M.Si.	Ketua DPD	Kab. Poso	Sulawesi Tengah	
Obed Susatya, S.Pd.	Wakil Ketua DPC	Kab. Pringsewu	Lampung	
Albert Sahala Siahaan	Pengurus DPD	Kab. Jepara	Jawa Tengah	
Mikdon Hede Pahu, S.E.	Pengurus DPD	Kota Kupang	NTT	
Pdt Tony Preston Marbun, S.Th.	Senior	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	
Norsel Maranden, S.H.	Pengurus DPD	Kab. Sintang	Sulawesi Selatan	
Akut, M.Pd.K.	Kader	Kab. Bengkayang	Kalimantan Barat	
Marthinus Z. Palebangi, S.PAK., M.Th.	Senior	Kab. Sintang	Sulawesi Barat	
Halida, S.H.	Pengurus DPD	Kab. Sintang	Kalimantan Utara	
Arianto Waruwu	Kader	Kota Bogor	Jawa Barat	
Alan Christian Singcali, S.E., M.Si.	DPP	Salatiga	Jawa Tengah	
Rustin Efendy, S.Pd.	Senior	Kab. Sintang	Sulawesi Barat	
Edy Jantier Latumahina, S.H., M.H.	Senior	Kota Ambon	Maluku	
Pdt Martha Sabono, S.Si.	Pengurus DPD	Kab. Sintang	Maluku	
Jery Parimba, S.T., M.Ag	DPP	Kab. Sintang	Sulawesi Selatan	
Yusuf Sabathianto, S.Pd.	Ketua DPC	Kab. Semarang	Jawa Tengah	
Likawati Sambobulawan, S.Pd.	Pengurus DPC	Kab. Sintang	Sulawesi Selatan	
Aldo Natanael Purba	Pengurus DPC	Kab. Sintang	Sumatera Utara	
Yosaphat Mark Susanto Rumba'	Kader	Kota Jakarta	DKI Jakarta	
Ooklas, S.T.	Sekretaris DPD	Kota Pangkalpinang	Bangka Belitung	
Ferry Gunawan, S.T.	DPP	Kab. Sintang	Jawa Barat	
Bentguriun Litha Brent, B.Coman, MIT.	Pengurus DPD	Kab. Sintang	Sulawesi Selatan	
Damlat Viktor Sh Sinaga, S.E.	Kader	Kab. Sintang	Sumatera Utara	
Iv Ardiansah, S.Th.	Ketua DPC	Kab. Sukoharjo	Jawa Tengah	
Nora Kristina Simetupang, M.Mis.PM.	Pengurus DPC	Kab. Sukoharjo	Jawa Tengah	
Sonny, S.T.	Ketua DPD	Kota Surakarta	Jawa Tengah	

**Daftar Hadir Sesi Penjelasan Teknis dan Pembukaan Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia**

Senin, 18 Mei 2026

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
1	5/18/2026 16:39:51	VANIA MEGAWATI MANURUNG	Universitas darma persada
2	5/18/2026 16:39:56	Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H.	Universitas Trisakti
3	5/18/2026 16:40:01	danang dwi kristiyanto	DPD GAMKI Jawa Tengah
4	5/18/2026 16:40:09	Inmas Saputra	DPD GAMKI SULAWESI BARAT
5	5/18/2026 16:40:11	Hermanto Romora S	GAMKI
6	5/18/2026 16:40:15	Chreisty alfin souisa	DPP GAMKI
7	5/18/2026 16:40:22	Armanto Umbu Tamu	GAMKI
8	5/18/2026 16:40:52	Loda Ana Rara, S.Kom	GAMKI Sumba Timur
9	5/18/2026 16:40:52	Stefanus Lowu, S.H	DPC GAMKI SUMBA TIMUR
10	5/18/2026 16:40:56	ARMIN BENI PASAPAN	GAMKI
11	5/18/2026 16:40:59	Pdt. Yohanis Paranta, S. Th.	Gereja Toraja
12	5/18/2026 16:41:02	HARDIONO ARRON DAUD UNAS	GAMKI KOTA SALATIGA
13	5/18/2026 16:41:03	Okvandi samuel	Kalimantan Barat Kab Melawi
14	5/18/2026 16:41:05	Andikiawan	DPC,GAMKI kabupaten Pinrang
15	5/18/2026 16:41:09	Juan Euriko Gilson Kause	GAMKI DPC Salatiga
16	5/18/2026 16:41:12	RICKY THOMAS RINUGA	DPC KOTA BITUNG
17	5/18/2026 16:41:19	Weljan Ridho Pagora	Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
18	5/18/2026 16:41:20	Prandy Arthayoga Louk Fanggi,S.H.,M.H.	GAMKI Nusa Tenggara Barat
19	5/18/2026 16:41:24	Imanuella Chereilyn Angelie Togelang	DPC GAMKI BALIKPAPAN

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
20	5/18/2026 16:41:32	Michael Kendek	GAMKI Sulawesi Selatan
21	5/18/2026 16:41:34	Rafhilia Loho	GAMKI Tomohon
22	5/18/2026 16:41:38	Yeremia Louis Tongam Paat	DPD GAMKI SULUT
23	5/18/2026 16:41:38	LAMBOK SAHAT ALVARO FILBERT	STRADA SANTA ANNA
24	5/18/2026 16:41:47	Lamhot Lambertus Sibarani	GAMKI PAC Medan Tuntungan
25	5/18/2026 16:42:02	Martinus Edwin Ferdinand Thanos	GAMKI
26	5/18/2026 16:42:08	HENDRI VANDER EUGARA	PEMERINTAH DESA TOUNWAWAN
27	5/18/2026 16:42:08	Leonardo	GAMKI kab. bekasi
28	5/18/2026 16:42:15	Zadrak Rahantoknam	Aktif Di DPP GAMKI
29	5/18/2026 16:42:18	William Paais	DPC GAMKI Salatiga
30	5/18/2026 16:42:27	Martinus Satria Talebong	DPD GAMKI SULSEL
31	5/18/2026 16:42:33	Fritska Sumolang	Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum
32	5/18/2026 16:42:35	Merlince Pigome	Solo Rhema Training Center
33	5/18/2026 16:42:39	Gian Anugrah	Peserta
34	5/18/2026 16:42:45	Michael Fredy Yacob	DPD GAMKI Kaltim
35	5/18/2026 16:42:54	Yelfani Netti Manurung	GAMKI PAC MEDAN TUNTUNGAN
36	5/18/2026 16:43:21	Herson B.K	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa
37	5/18/2026 16:43:40	Doli Silaban	Gamki kab pringsewu
38	5/18/2026 16:43:41	MARKUS YUSUF RAUBABA,SH	Sekretariat DPR Papua Selatan
39	5/18/2026 16:43:49	Natasya Brigita Masuara, S.Tr.T	DPD GAMKI Sulawesi Tenggara
40	5/18/2026 16:44:46	Oktavianus Hutahaean, S.Sos	GAMKI

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
41	5/18/2026 16:44:58	ADRIANUS SANDY KALALIMBONG	PEMUDA TORAJA INDONESIA SULSEL
42	5/18/2026 16:45:01	GABRIEL HENRY WILLY CHOANDY, A.Md., S.E., M.Si., AAP	DPD GAMKI SUMUT
43	5/18/2026 16:45:09	Marthinus Z. Palebangi, S.PAK, M.Th	GAMKI Sulbar
44	5/18/2026 16:45:19	Andri Daulat Marroha	SDN 101018
45	5/18/2026 16:45:21	Asra Bulla Junga Jara, S.I.Kom	DPC GAMKI SUMBA TENGAH
46	5/18/2026 16:45:25	Kevin K. Runtukahu	DPD GAMKI Papua
47	5/18/2026 16:45:47	BENNI POLIN PARSAULIAN PURBA	SIMALUNGUN
48	5/18/2026 16:45:48	Imanuel Raganda Purba	GAMKI DPD BANTEN
49	5/18/2026 16:45:59	Ryan Silambi	GAMKI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
50	5/18/2026 16:47:00	Simon Walilo	DPC GAMKI Yalimo Proinsi Papua Pegunungan
51	5/18/2026 16:47:19	Eric Mangiri	GAMKI
52	5/18/2026 16:47:39	Licar Jaya Demmanaba	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
53	5/18/2026 16:48:26	Freterly W. Manuputty, S.Si.-Teol., M.A.	DPD GAMKI Maluku
54	5/18/2026 16:48:37	Wilhelmus Labobar	Dewan Pimpinan Daerah GAMKI Prov. Maluku
55	5/18/2026 16:48:42	Y. LEONAR HANA SALAUDIN	DPD GAMKI MALUT
56	5/18/2026 16:48:59	Enddy Iyahkenta Sembiring	PAC Medan Tuntungan
57	5/18/2026 16:49:09	Haniel Alfred Alexander	GAMKI
58	5/18/2026 16:49:14	Jevon Lundi Pali	GMKI CABANG MANADO
59	5/18/2026 16:49:23	Melkisedek Kris Hot Asi Manalu	DPD GAMKI PAPUA
60	5/18/2026 16:49:32	Sawatoma Tafonao, S. Th	GAMKI
61	5/18/2026 16:49:33	WIDYA MINAR CHRISTINE SITORUS	GAMKI MEDAN/SMA NEGERI 2 BESITANG

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
62	5/18/2026 16:49:36	Wendy Anugrah Putra	GAMKI
63	5/18/2026 16:49:50	Feybe Indriani Madonsa	DPC GAMKI Sangihe
64	5/18/2026 16:50:10	OBED SUSATYA	GAMKI KABUPATEN PRINGSEWU (DPMP KABUPATEN PRINGSEWU)
65	5/18/2026 16:50:24	Des Alpin	GAMKI DPC Buleleng
66	5/18/2026 16:50:32	Lidya EvaLuciana Br Matondang	DPD GAMKI SUMUT
67	5/18/2026 16:50:36	Reinaldi Gisberd Sasundame	DPC GAMKI Kabupaten Minahasa Selatan
68	5/18/2026 16:50:39	Christian Einy Toda Watu	DPC GAMKI SUMBA BARAT
69	5/18/2026 16:50:43	Yosaphat mark susanto ramba	Gamki jaksel
70	5/18/2026 16:50:55	RISMAYANTI	SMA KRISTEN BARANA'
71	5/18/2026 16:51:24	Reki Tomangoko, S.Sos	DPD GAMKI MALUKU UTARA
72	5/18/2026 16:52:00	Fast Andreian Tu'uni	GAMKI
73	5/18/2026 16:52:02	Paulus Hasiholan Banjarnahor	Gamki
74	5/18/2026 16:53:00	OSIAS DOPONG,S.Pd.K	DPC GAMKI KOTA SINGKAWANG
75	5/18/2026 16:53:16	Neles Wetipo	DPC GAMKI Merauke
76	5/18/2026 16:53:34	Angelina Sigalingging	DPD GAMKI Riau
77	5/18/2026 16:53:54	Daniel marihot silaban	GAMKI kabupaten Pelalawan
78	5/18/2026 16:54:21	INNEKE VALERIA SEBLEKU	-
79	5/18/2026 16:54:53	JUFRI BAYAR	GMKI MALUKU UTARA
80	5/18/2026 16:56:24	Ester Giovani Govin Makikui, S.Tr.IP	DPC GAMKI SANGIHE
81	5/18/2026 16:56:37	Albert Josua Putera Maliogha	DPD GAMKI Jateng
82	5/18/2026 16:56:37	Valentino A. Mirino, ST	DPD GAMKI PAPUA

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
83	5/18/2026 16:58:04	Wilson Zalogo, M.Pd.,M.Si	Kota Batam
84	5/18/2026 16:58:26	Devita ratu tandirapak	Toraja utara
85	5/18/2026 16:58:32	Novriadi Sitompul	GAMKI
86	5/18/2026 16:58:48	Melkias Raubaba	DPD GAMKI PAPUA
87	5/18/2026 16:58:48	Priscilla Ariany Indratama	Gamki DPD Jawa Tengah
88	5/18/2026 16:59:39	Brando Enstein Wawointana	GAMKI Tomohon
89	5/18/2026 17:00:28	Ance Wally	DPD GAMKI PAPUA
90	5/18/2026 17:00:43	Ricardo Jonatan Tumanggor, S.Pd., Gr	SMA SWASTA GKPI PADANG BULAN MEDAN
91	5/18/2026 17:00:46	Ayubruhari Udju Dima	GAMKI
92	5/18/2026 17:00:52	Natalia Simanjuntak	GAMKI
93	5/18/2026 17:01:15	Meilamsen Simamora	Gamki kab. Malang
94	5/18/2026 17:01:27	Marojahan hutabarat SH MH	GAMKI Lampung
95	5/18/2026 17:01:32	Rustan efendy	GAMKI Mamuju, Sulawesi-Barat
96	5/18/2026 17:01:54	RELLI ROY RICHARD DISIN	GAMKI cabang TOBELO
97	5/18/2026 17:01:59	ALBERT PALANGDA	GAMKI
98	5/18/2026 17:02:17	Soetjahyono Tukiran	GAMKI
99	5/18/2026 17:02:38	AKUT	DPC GAMKI ASMAT
100	5/18/2026 17:02:49	Dr. Sostones Y Sisinaru. SH.,M.Hum.	GAMKI Maluku
101	5/18/2026 17:02:56	Eric David Andreas	GAMKI Kota Makassar
102	5/18/2026 17:02:57	Gladies Barbara Lucas	GAMKI SULUT
103	5/18/2026 17:03:01	Jondamay Sinurat	GAMKI

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
104	5/18/2026 17:03:39	Andriany Tandi, SH., MH	DPD GAMKI Sulawesi Selatan
105	5/18/2026 17:04:02	Ferdinand Willy Sualang	GAMKI Kabupaten Minahasa Tenggara
106	5/18/2026 17:07:00	Melkias	DPC GAMKI PINRANG
107	5/18/2026 17:07:20	Maya Indriani Yacob Impak, S.E., M.Si	DPD GAMKI Sulawesi Selatan
108	5/18/2026 17:08:27	DANIEL SALELETANG, ST,.M.AP	DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I BITUNG
109	5/18/2026 17:09:08	Estefanus Balaati	GAMKI/API
110	5/18/2026 17:17:45	Reinaldy	Dpc Pinrang
111	5/18/2026 17:18:44	Elvina Priska Hosianna Saragih	DPC SINGKAWANG

Daftar Hadir Sesi Materi Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Selasa, 26 Mei 2026

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
1	26/05/2026 15:46:49	Novriadi Sitompul	GAMKI
2	26/05/2026 15:46:50	Priscilla Ariany Indratama	GAMKI DPD Jawa Tengah
3	26/05/2026 15:46:50	Alfrit Dody	GAMKI KALTENG
4	26/05/2026 15:46:55	Stefanus Lowu	GAMKI SUMBA TIMUR
5	26/05/2026 15:47:16	Maya Indriani Yacob Impak, S.E., M.Si	DPD GAMKI SulSel
6	26/05/2026 15:47:16	Bismar Mangaratua Hutagaol	Sekretaris DPC GAMKI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
7	26/05/2026 15:47:19	Risnal Ray	GAMKI Halmahera Barat
8	26/05/2026 15:47:21	Pdt.Sufriadi Mei Suhendra	GAMKI
9	26/05/2026 15:47:30	Dr. Sostones Y Sisinaru. SH.,M.Hum.	DPD GAMKI Maluku
10	26/05/2026 15:47:35	Andikiawan,S.M	DPC,pinrang
11	26/05/2026 15:47:37	Irmayanti Lebon	GAMKI PINRANG
12	26/05/2026 15:47:42	Danang Dwi Kristiyanto	DPD GAMKI Jawa Tengah
13	26/05/2026 15:47:46	Jan Rafles Takasihaeng	DPC GAMKI Sangihe
14	26/05/2026 15:47:48	Leonardo	GAMKI Kab. Bekasi
15	26/05/2026 15:47:56	Feybe Indriani Madonsa	DPC GAMKI Sangihe
16	26/05/2026 15:47:57	Mayuneker Ponno	GAMKI
17	26/05/2026 15:48:01	Nugraha	Diskominfo Kota Singkawang/ GAMKI DPC KOTA SINGKAWANG
18	26/05/2026 15:48:09	Ricky Thomas Rinuga	DPC GAMKI Kota Bitung-Sulut
19	26/05/2026 15:48:13	VALENTINO A. MIRINO, ST	DPD GAMKI PAPUA

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
20	26/05/2026 15:48:13	AKUT	GAMKI ASMAT
21	26/05/2026 15:48:21	Seaklangi	DPD GAMKI Sulbar
22	26/05/2026 15:48:25	WILLIAM PAAIS	GAMKI SALATIGA
23	26/05/2026 15:48:25	Ronailan Ndakualarak, S.H.	GAMKI SUMBA TIMUR
24	26/05/2026 15:48:39	Ricky Donny Lamhot Marpaung	Universitas Trisakti
25	26/05/2026 15:48:42	Des Alpin	DPC GAMKI Buleleng
26	26/05/2026 15:49:00	DANIEL DEMMANORA S	GAMKI MAMASA, SULAWESI BARAT
27	26/05/2026 15:49:10	LIKAWATI SAMBOBULAWAN	DPC GAMKI KABUPATEN PINRANG
28	26/05/2026 15:49:17	MEIYER F. S. DAMIMA, SE.	DPC GAMKI BANGGAI KEPULAUAN
29	26/05/2026 15:49:23	Daulat Viktor SH Sinaga	DPD GAMKI SUMUT
30	26/05/2026 15:49:28	Yosaphat mark susanto ramba	Gmki jaksel
31	26/05/2026 15:49:29	Alpian Otni Magho	DPC Kab. Sumba Barat
32	26/05/2026 15:49:43	WENDY ANUGRAH PUTRA	GAMKI KALBAR
33	26/05/2026 15:50:02	Ondi Yohan Tambunan	Seniman
34	26/05/2026 15:50:06	MELKIAS, S.E	DPC GAMKI KAB. PINRANG PROV. SULSEL
35	26/05/2026 15:50:09	Lourens Batuwael	MALUKU
36	26/05/2026 15:50:09	Yeremia Louis Tongam Paat	Pengurus DPD GAMKI SULUT (Sulawesi Utara)
37	26/05/2026 15:50:10	Weljan Ridho Pagora	DPC Kabupaten Kepulauan Mentawai / Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
38	26/05/2026 15:50:15	Oktavianus Hutahaeen, S.Sos	DPD GAMKI SUMUT
39	26/05/2026 15:50:24	Imanuella Chereilyn Angelie	DPC GAMKI BALIKPAPAN
40	26/05/2026 15:50:28	Daniel M Silaban, SH	Ketua DPC GAMKI PELALAWAN (RIAU)

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
41	26/05/2026 15:50:33	Timothy Caesar	GAMKI Kab. Bekasi
42	26/05/2026 15:50:34	Martinus S Talebong	DPD GAMKI SULSEL
43	26/05/2026 15:50:56	Albert Palangda	GAMKI
44	26/05/2026 15:51:01	Binsar Nababan	GAMKI
45	26/05/2026 15:51:04	Suwandi, S.Pd.,Gr.	DPC. GAMKI Medan
46	26/05/2026 15:51:42	Melvianus Tamu Buku	GAMKI Cabang Sumba Timur
47	26/05/2026 15:51:42	Hardiono Arron Daud Unas	GAMKI Salatiga
48	26/05/2026 15:51:54	FERYANTO HB, S.H.,M.H.,NL.P	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG/ KETUA PEMBINA GAMKI
49	26/05/2026 15:51:57	Inmas Saputra	GAMKI SULAWESI BARAT
50	26/05/2026 15:51:58	Christian Einy Toda Watu	GAMKI Sumba Barat NTT
51	26/05/2026 15:52:34	Dr. Richard M. Waas, SH, MH	DPD GAMKI MALUKU
52	26/05/2026 15:53:17	Haniel Alfred Alexander	GAMKI
53	26/05/2026 15:53:39	Finkli katamona	GAMKI MINAHASA UTARA
54	26/05/2026 15:54:01	Merlince Pigome	Solo Rhema training center
55	26/05/2026 15:54:18	DANIEL SALELETANG, ST. M.AP	DPP GAMKI / DISTRIK NAVIGASI BITUNG
56	26/05/2026 15:54:23	Neles Wetipo	DPC GAMKI Merauke
57	26/05/2026 15:55:03	Linda Maria	Gerakan mahasiswa kristen Indonesia
58	26/05/2026 15:56:06	JOSHUA SAMUEL HUTAPEA	Gamki Surabaya
59	26/05/2026 15:56:14	Ferdinand Willy Sualang	GAMKI Minahasa Tenggara
60	26/05/2026 15:56:43	Herson B.K	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa
61	26/05/2026 15:56:46	SARINDAN HARRY SOLOMAN	GAMKI

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
62	26/05/2026 15:57:13	Melkisedek Kris Hot Asi Manalu	DPD GAMKI PAPUA
63	26/05/2026 15:57:17	Jayanta bangun	Gamki medan timur
64	26/05/2026 15:58:08	Aldo Natanael Purba	GAMKI MEDAN
65	26/05/2026 15:58:27	Obed Romario Worembay	Swasta
66	26/05/2026 15:59:24	Arianto Waruwu	GMKI Cabang BOGOR
67	26/05/2026 16:00:10	Bentgursion Litha Brent	DPD GAMKI Sulawesi Selatan
68	26/05/2026 16:01:04	LIDYA EVALUCIANA BR MATONDANG	DPD GAMKI SUMUT
69	26/05/2026 16:04:36	Devita ratu tandirapak	Universitas terbuka makassar
70	26/05/2026 16:04:52	Dr Yudi Hendrilia. M.Pd	DPD GAMKI Jateng
71	26/05/2026 16:05:19	tinasabono023@gmail.com	GAMKI PROVINSI MALUKU
72	26/05/2026 16:05:42	Ester Giovani Govin Makikui, S.Tr.IP	Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
73	26/05/2026 16:05:51	HENDRI VANDER EUGARA	PEMERINTAH DESA TOUNWAWAN
74	26/05/2026 16:07:25	Rocky Marciano Ambar	Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara
75	26/05/2026 16:09:31	Eric Mangiri	GAMKI
76	26/05/2026 16:11:06	Doli silaban	Dpc pringsewu
77	26/05/2026 16:11:14	Eric David Andreas	GAMKI Kota Makassar
78	26/05/2026 16:14:25	Juni henti putri	GAMKI
79	26/05/2026 16:17:18	Edy Janter Latumahina, S.H., M.H	DPC GAMKI KOTA AMBON
80	26/05/2026 16:18:25	ADRIANUS SANDY KALALIMBONG	SWASTA
81	26/05/2026 16:19:13	Wilhelmus Labobar	Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI Prov. Maluku
82	26/05/2026 16:19:55	ANCE WALLY	DPD GAMKI PAPUA

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
83	26/05/2026 16:20:09	Benni Polin Parsaulian Purba, S.Pd, M.Pd	GAMKI SIMALUNGUN
84	26/05/2026 16:20:45	Prandy Arthayoga Louk Fanggi, S.H.,M.H.	DPD GAMKI NTB
85	26/05/2026 16:20:59	Mikdon Hede Patu	DPD GAMKI NTT
86	26/05/2026 16:21:14	ROFIN	DPD CABANG PINRANG
87	26/05/2026 16:22:15	Ayub Alexander	GAMKi Cab. Kolaka
88	26/05/2026 16:23:11	Melkias Raubaba	DPD GAMKI PROVINSI PAPUA
89	26/05/2026 16:23:34	Natalianus Paembe SARULALLO	KPU KAB.TANA TORAJA
90	26/05/2026 16:25:34	Chreisty alfin souisa	DPP GAMKI
91	26/05/2026 16:26:36	RICARDO JONATAN TUMANGGOR, S,Pd.,Gr	SMA SWASTA GKPI PADANG BULAN MEDAN
92	26/05/2026 16:29:20	DEWI PIKA LBN BATU, SH.,MH	DPD GAMKI SUMUT
93	26/05/2026 16:33:14	Angelina Sigalingging	DPD GAMKI Riau
94	26/05/2026 16:33:24	Soetjahyono Tukiran	GAMKI
95	26/05/2026 16:34:35	Michael Kendek	GAMKI SULAWESI SELATAN
96	26/05/2026 16:49:25	Fransisca Susilawaty br purba	Wiraswasta
97	26/05/2026 16:51:06	Freterly William Manuputty	DPD GAMKI Maluku
98	26/05/2026 16:52:20	Irfansius, S.Sos., M.Pd.	DPD GAMKI Provinsi Kalimantan Barat
99	26/05/2026 16:52:34	Natasya Brigita Masuara	DPD GAMKI Sulawesi Tenggara
100	26/05/2026 16:53:02	Rafhilia Loho	GAMKI DPC TOMOHON
101	26/05/2026 17:04:28	Jery Parimba	GAMKI
102	26/05/2026 17:15:27	Albert Sahala Siahaan	GAMKI
103	26/05/2026 20:50:07	Widya Minar Christine Sitorus	GAMKI Medan

Daftar Hadir Sesi Materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

Rabu, 3 Juni 2026

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
1	3/6/2026 12:25:28	chreisty alfin souisa	DPP GAMKI
2	3/6/2026 12:25:44	Sostones sisinaru	DPD Maluku
3	3/6/2026 12:25:45	Andikiawan	DPC Pinrang
4	3/6/2026 12:25:46	Sawatoma Tafonao, S.Th	GAMKI
5	3/6/2026 12:25:46	Soetjahyono Tukiran	GAMKI
6	3/6/2026 12:25:50	Stefanus Lowu, S.H	DPC GAMKI Sumba Timur
7	3/6/2026 12:26:01	Devita ratu tandirapak	Universitas terbuka makassar
8	3/6/2026 12:26:02	Neles Wetipo	DPC GAMKI MERAUKE
9	3/6/2026 12:26:02	Irmayanti Lebon	GAMKI
10	3/6/2026 12:26:10	Sufriadi Mei Suhendra	GAMKI
11	3/6/2026 12:26:37	HARDIONO ARRON DAUD UNAS,SE,MM,MH.	GAMKI SALATIGA
12	3/6/2026 12:26:54	Linda Maria	GAMKI
13	3/6/2026 12:27:02	Doli silaban	DPC GAMKI Pringsewu
14	3/6/2026 12:27:21	Daniel mariohot silaban, SH	Ketua DPC GAMKI PELALAWAN (RIAU)
15	3/6/2026 12:27:38	LIKAWATI SAMBOBULAWAN	DPC GAMKI KABUPATEN PINRANG
16	3/6/2026 12:27:40	Doli Silaban	DPC GAMKI Pringsewu
17	3/6/2026 12:28:10	Melkias	DPC GAMKI KABUPATEN PINRANG
18	3/6/2026 12:28:15	HENDRI VANDER EUGARA	PEMERINTAH DESA TOUNWAWAN
19	3/6/2026 12:28:18	Daniel Demmanora S	GAMKI Mamasa_ Sulawesi Barat

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
20	3/6/2026 12:28:31	DANIEL MARIHOT SILABAN, SH	Dpc GAMKI PELALAWAN
21	3/6/2026 12:28:32	Oktavianus Hutahaean	DPD GAMKI SUMUT
22	3/6/2026 12:28:37	Doli silaban	DPC GAMKI Pringsewu
23	3/6/2026 12:28:58	Herson B.K, S.Ip	Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa
24	3/6/2026 12:28:59	Leonardo	GAMKI Kab.Bekasi
25	3/6/2026 12:31:16	Haniel Alfred Alexander	GAMKI
26	3/6/2026 12:32:29	Dzulkifli Sanjani	Gamki.Cab, Kab, Kolaka
27	3/6/2026 12:32:38	Maya Indriani Yacob Impak, S.E., M.Si	DPD GAMKI SulSel
28	3/6/2026 12:32:57	Marojahan Hutabarat SH MH	GAMKI Lampung
29	3/6/2026 12:33:21	Rustan efendy	GAMKI SUL-BAR
30	3/6/2026 12:33:25	Erwin Septriaman Zega	Gamki Salatiga
31	3/6/2026 12:33:51	Martinus Satria Talebong	DPD GAMKI SULSEL
32	3/6/2026 12:34:27	Ricardo Jonatan Tumanggor, S. Pd., Gr	SMA SWASTA GKPI PADANG BULAN MEDAN
33	3/6/2026 12:35:15	Melkias Raubaba	DPD GAMKI Provinsi Papua
34	3/6/2026 12:35:20	Andriany Tandi, SH., MH	KPU Provinsi Sulawesi Selatan / (DPD GAMKI SULSEL)
35	3/6/2026 12:35:33	Ricardo Jonatan Tumanggor, S. Pd., Gr	SMA SWASTA GKPI PADANG BULAN MEDAN
36	3/6/2026 12:35:33	ADRIANUS SANDY KALALIMBONG	Swasta
37	3/6/2026 12:35:34	Michael Kendek	GAMKI SULAWESI SELATAN
38	3/6/2026 12:36:09	Timothy Caesar	GAMKI Kab. Bekasi
39	3/6/2026 12:36:34	Edy Janter Latumahina, S.H., M.H	Universitas Pattimura, Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, DPC GAMKI KOTA AMBON
40	3/6/2026 12:36:48	Wilson Zalogu,M.Pd.,M.Si	GBI HOUSE OF MERCY KOTA BATAM

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
41	3/6/2026 12:36:51	Martinus Satria Talebong	DPD GAMKI SULSEL
42	3/6/2026 12:36:52	Inmas Saputra	DPD GAMKI SULAWESI BARAT
43	3/6/2026 12:37:28	Albert Palangda	GAMKI
44	3/6/2026 12:38:19	Eric David Andreas	GAMKI Kota Makassar
45	3/6/2026 12:38:53	Christian Einy Toda Watu	GAMKI Kab Sumba Barat NTT
46	3/6/2026 12:39:11	Eric Mangiri	GAMKI
47	3/6/2026 12:40:27	Priscilla ariany Indratama	DPD GAMKI Jawa Tengah
48	3/6/2026 12:40:43	Natasya Brigita Masuara, S.Tr.T	DPD GAMKI Sulawesi Tenggara
49	3/6/2026 12:45:05	William Paais	GAMKI salatiga
50	3/6/2026 12:46:08	Dr. Yudi Hendrilia. M.PdK	DPD GAMKI Jateng
51	3/6/2026 12:47:54	Dr. Sostones Y Sisinaru.SH.,M.Hum.	DPD GAMKI Maluku
52	3/6/2026 12:51:46	Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H.	Universitas Trisakti
53	3/6/2026 12:51:46	Melvianus Tamu Boku	GAMKI Cabang Sumba Timur
54	3/6/2026 12:51:50	Ricky Thomas Rinuga	DPC GAMKI Kota Bitung - Sulut
55	3/6/2026 12:51:57	Martinus Edwin Ferdinand Thanos, S.Ak., M.I.Kom.	DPP GAMKI
56	3/6/2026 12:52:38	Finkli Katamona	GAMKI MINAHASA UTARA
57	3/6/2026 12:52:44	Binsar Nababan	Gamki
58	3/6/2026 12:53:00	Melkisedek Kris Hot Asi Manalu	DPD GAMKI PAPUA
59	3/6/2026 12:53:05	AKUT	DPC GAMKI ASMAT
60	3/6/2026 12:53:42	Danang Dwi Kristiyanto	DPD Jateng
61	3/6/2026 12:55:11	Mikdon Hede Patu	Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
62	3/6/2026 12:55:37	Juni Henti Putri	DPP GAMKI
63	3/6/2026 12:55:42	Armanto Uumbu Tamu, S.A.P., M.A.P	GAMKI
64	3/6/2026 12:56:21	Feybe Indriani Madonsa	DPC GAMKI Sangihe
65	3/6/2026 12:56:22	Prandy Arthayoga Louk Faggi,S.H.,M.H.	Universitas Mataram / DPD GAMKI NTB
66	3/6/2026 12:56:39	Des Alpin	DPC GAMKI Buleleng
67	3/6/2026 12:56:46	Bismar Mangaratua Hutagaol	SEKRETARIS DPC GAMKI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
68	3/6/2026 12:56:57	Danang Dwi Kristiyanto	DPD Jateng
69	3/6/2026 12:59:04	Ester Giovani Govin Makikui	GAMKI sangihe - sekretariat daerah kabupaten kepulauan sangihe
70	3/6/2026 12:59:22	Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H.	Universitas Trisakti
71	3/6/2026 12:59:32	Linda Maria	GAMKI
72	3/6/2026 12:59:37	Maya Indriani Yacob Impak, S.E., M.Si	DPD GAMKI SulSel
73	3/6/2026 13:00:05	Weljan Ridho Pagora	Sekretariat Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai
74	3/6/2026 13:00:09	Yeremia Louis Tongam Paat	Pengurus DPD GAMKI Sulut
75	3/6/2026 13:00:21	merlince Pigome	Solo rhema training center
76	3/6/2026 13:00:25	Michael Fredy Yacob	GAMKI Kaltim
77	3/6/2026 13:00:48	SONNY, ST	DPRD
78	3/6/2026 13:00:54	Afner Rerung	DPD GAMKI SULSEL
79	3/6/2026 13:01:26	VALENTINO ALBERTHO MIRINO, ST	DPD GAMKI PAPUA
80	3/6/2026 13:01:35	Albert Josua Putera Maliogha	GAMKI
81	3/6/2026 13:02:09	Marthina Sabono, S.Si	GAMKI PROVINSI MALUKU
82	3/6/2026 13:03:09	Elvina Priska Hosianna Saragih, S.Psi	DPC GAMKI Kota Singkawang

No	Timestamp	Nama Peserta	Asal Instansi
83	3/6/2026 13:31:45	Suwandi, S.Pd.,Gr.	DPC. GAMKI MEDAN
84	3/6/2026 13:35:57	Imanuella Cherelyn Angelie Togelang	DPC GAMKI BALIKPAPAN
85	3/6/2026 13:43:56	Suwandi, S.Pd.,Gr.	DPC. GAMKI MEDAN
86	3/6/2026 14:23:37	Yeremia Louis Tongam Paat	Pengurus DPD GAMKI Sulawesi Utara
87	3/6/2026 15:06:21	Daniel Saleletang, ST,. M.AP	Distrik navigasi bitung/ DPP GAMKI

Rekapitulasi Data Peserta
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	PROGRESS
1	Albert Josua Putera Maliogha	m*****	100.00%
2	Stella Matitaputty S.E, M.Pd, CFP	m*****	100.00%
3	Novriadi Sitompul	n*****	100.00%
4	Sarindan Harry Soloman	s*****	100.00%
5	Priscilla Ariany Indratama,S.TP	a*****	100.00%
6	Eric Mangiri	e*****	100.00%
7	Maya Indriani Yacob Impak	m*****	100.00%
8	Michael Kendek	k*****	100.00%
9	HENDRI VANDER EUGARA	e*****	100.00%
10	Oktavianus Hutahaean	o*****	100.00%
11	RICKY THOMAS RINUGA	r*****	100.00%
12	Ricky Donny Lamhot Marpaung	m*****	100.00%
13	Loda Ana Rara, S.Kom	a*****	100.00%
14	Daniel Marihot Silaban	d*****	100.00%
15	Rocky Marciano Ambar	r*****	100.00%
16	Juni Henti Putri	p*****	100.00%
17	Soetjahyono Tukiran, S.H.	s*****	100.00%
18	Stefanus Lowu, S.H	s*****	100.00%
19	Chreisty Alfin Souisa	c*****	100.00%
20	Ester Giovani Govin Makikui, S.Tr.IP	e*****	100.00%
21	Ricardo Jonatan Tumanggor	r*****	100.00%
22	Merlince Pigome	m*****	100.00%
23	Putra Nataba	p*****	100.00%
24	Lamhot Lambertus Sibarani	l*****	100.00%
25	May Jessy Pangkalant Batuah	p*****	100.00%
26	Yelfani Netti Manurung	g*****	100.00%
27	Leonardo	l*****	100.00%
28	Romartu Situngkir	r*****	100.00%
29	Ance Wally	w*****	100.00%
30	Natasya Brigita Masuara	n*****	100.00%
31	Risnal Ray	r*****	100.00%
32	Fransisca Susilawaty Purba	f*****	100.00%
33	Albert Palangda	a*****	100.00%
34	Dzulkipli Sanjani	d*****	100.00%
35	Feybe Indriani Madonsa	m*****	100.00%
36	Devita ratu Tandirapak	t*****	100.00%
37	Neles Wetipo	n*****	100.00%
38	BETUEL OBAJA DOLUDY	b*****	100.00%
39	Armanto Umbu Tamu	a*****	100.00%
40	Reki Tomangoko	r*****	100.00%
41	ALPIAN OTNI MAGHO, S.H., M.H.	a*****	100.00%
42	Wendy Anugrah putra	w*****	100.00%
43	Leo Josten Sagala	l*****	100.00%
44	DANIEL DEMMANORA S	d*****	100.00%
45	Melkisedek Kris Hot Asi Manalu	m*****	100.00%
46	Melkias Raubaba	m*****	100.00%
47	Weljan Ridho Pagora	w*****	100.00%
48	Adrianus Sandy Kalalimbong	k*****	100.00%
49	Martinus Edwin Ferdinand Thanos	e*****	100.00%
50	Finkli Katamona	f*****	100.00%
51	Freterly William Manuputty	f*****	100.00%

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	PROGRESS
52	Glendy Switly Umboh	g*****	100.00%
53	Hermanto Romora S	m*****	100.00%
54	DANANG DWI KRISTIYANTO	d*****	100.00%
55	Yudi Hendrilia	y*****	100.00%
56	LINDA MARIA	m*****	100.00%
57	Melkias	m*****	100.00%
58	Pdt. Yohanis Paranta, S. Th.	p*****	100.00%
59	Sufriadi Mei Suhendra	s*****	100.00%
60	Mayuneker ponno	m*****	100.00%
61	Melvianus Tamu Boku	u*****	100.00%
62	Inmas Saputra	i*****	100.00%
63	Dr. Richard M. Waas, S.H.,M.H.	w*****	100.00%
64	Ondi Yohan Tambunan	o*****	100.00%
65	Paulus Hasiholan Banjarnahor	p*****	100.00%
66	Jufri Bayar	n*****	100.00%
67	Ronailan Ndakularak, S.H.	r*****	100.00%
68	DANIEL SALELETANG, S.T., M.AP	s*****	100.00%
69	Dewi Pika Lbn Batu	d*****	100.00%
70	Andikiawan	a*****	100.00%
71	Marojahan Hutabarat SH MH	m*****	100.00%
72	Joshua Samuel Hutapea	j*****	100.00%
73	Andriany Tandil, S.H., M.H	a*****	100.00%
74	Agnes Caroline Maundeng	a*****	100.00%
75	Christian Einy Toda Watu	e*****	100.00%
76	Valentino Albertho Mirino	p*****	100.00%
77	GILBERT PUTRA IMOZEN SARAGIH	g*****	100.00%
78	Erwin Septriaman Zega	e*****	100.00%
79	Rismayanti	r*****	100.00%
80	Martinus Satria Talebong	p*****	100.00%
81	FRYANTO HB, S.H.,M.H.,NL.P	f*****	100.00%
82	MEIYER F. S. DAMIMA, SE	m*****	100.00%
83	Kevin K. Runtukahu, S.IP.	k*****	100.00%
84	Suwandi	s*****	100.00%
85	Arbie Sadputra Haman	r*****	100.00%
86	Dr. Sostones Y Sisinaru. SH.,M.Hum.	s*****	100.00%
87	Linda Trisnawati Sembiring,ST.	l*****	100.00%
88	Lourens Batuwael	b*****	100.00%
89	Daniel Darwis	a*****	100.00%
90	Des Alpin	a*****	100.00%
91	Natalianus Paembe Sarulallo	n*****	100.00%
92	Wilhelmus Labobar, M.Pd	w*****	100.00%
93	Herson B.K	h*****	100.00%
94	Lenn Yan Palebangan	l*****	100.00%
95	William Paais	w*****	100.00%
96	Timothy Caesar	t*****	100.00%
97	Prandy Arthayoga Louk Fanggi,S.H.,M.H.	p*****	100.00%
98	Irmayanti Lebon	l*****	100.00%
99	Sawatoma Tafonao	s*****	100.00%
100	Wilson Zalogo, M.Pd.,M.Si	w*****	100.00%
101	Yeremia Louis Tongam Paat	p*****	100.00%
102	ryan silambi	r*****	100.00%
103	Haniel Alfred Alexander	h*****	100.00%
104	OBED SUSATYA	o*****	100.00%
105	Albert Sahala	a*****	100.00%
106	Obed Romario. Com	o*****	100.00%

NO	NAMA	ALAMAT EMAIL	PROGRESS
107	Mikdon Hede Patu	m*****	100.00%
108	Tony Freston Marbun	l*****	100.00%
109	Norsel Maranden	n*****	100.00%
110	AKUT	a*****	100.00%
111	Marthinus Z. Palebangi, S,PAK, M.Th	p*****	100.00%
112	Halidin Trk	l*****	100.00%
113	Arianto Waruwu	a*****	100.00%
114	Jondamay Sinurat	j*****	100.00%
115	Binsar Nababan	n*****	100.00%
116	Alan Christian Singkali	a*****	100.00%
117	Rustan efendy S,Pd. M,Pd	r*****	100.00%
118	Edy Janter Latumahina, S.H., M.H	e*****	100.00%
119	MARTHINA SABONO	t*****	100.00%
120	Jery Parimba	j*****	100.00%
121	Yusuf Sabathtianto	j*****	100.00%
122	likawati Sambobulawan	l*****	100.00%
123	Aldo Natanael Purba	a*****	100.00%
124	Yosaphat Mark Susanto Ramba	y*****	100.00%
125	Goklas	h*****	100.00%
126	Ferry Gunawan	f*****	100.00%
127	Bentgurion Litha Brent	b*****	100.00%
128	Daulat Viktor Sinaga	d*****	100.00%
129	Is Ardiansah	i*****	100.00%
130	Nora kristina Simatupang	a*****	100.00%
131	Sonny	s*****	100.00%

REKAPITULASI TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

NO	Nama	Post Review	Post Review	Post Review	Post Review	Post Review	Post Review	Rata-Rata	Nilai Post Test (Tes Sumatif)	Tes Formatif (20%)	Tes Sumatif (80%)	Tingkat Pemahaman
		Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4	Materi 5	Praktik					
1	A*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
2	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
3	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
4	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
5	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
6	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
7	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
8	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
9	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
10	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
11	A*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
12	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
13	A*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
14	A*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
15	A*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
16	B*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
17	B*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
18	B*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
19	C*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
20	C*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
21	D*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
22	D*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
23	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
24	D*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
25	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
26	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
27	D*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
28	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
29	D*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
30	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
31	D*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
32	D*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
33	E*****	10	10	10	10	10	10	10	1	20	8	28
34	E*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
35	E*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
36	E*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
37	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
38	F*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
39	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
40	F*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
41	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
42	F*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
43	G*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
44	G*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
45	G*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
46	H*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
47	H*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
48	H*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
49	H*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
50	H*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
51	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
52	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
53	I*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
54	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
55	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
56	J*****	10	10	10	10	10	10	10	3	20	24	44
57	J*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
58	J*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
59	K*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
60	L*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
61	L*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
62	L*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
63	L*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
64	I*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
65	L*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
66	L*****	10	10	10	10	10	10	10	4	20	32	52
67	L*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
68	L*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
69	M*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
70	M*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
71	M*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
72	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
73	M*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
74	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
75	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
76	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
77	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
78	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
79	M*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
80	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
81	M*****	10	10	10	10	10	10	10	4	20	32	52
82	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
83	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
84	M*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
85	N*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
86	N*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
87	N*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100

88	N*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
89	N*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
90	N*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
91	O*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
92	O*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
93	O*****	10	10	10	10	10	10	10	0	20	0	20
94	O*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
95	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
96	P*****	10	10	10	10	10	10	10	0	20	0	20
97	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
98	P*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
99	P*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
100	R*****	10	10	10	10	10	10	10	3	20	24	44
101	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
102	R*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
103	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
104	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
105	R*****	10	10	10	10	10	10	10	7	20	56	76
106	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
107	R*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
108	R*****	10	10	10	10	10	10	10	4	20	32	52
109	R*****	10	10	10	10	10	10	10	6	20	48	68
110	r*****	10	10	10	10	10	10	10	2	20	16	36
111	S*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
112	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
113	S*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
114	S*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
115	S*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
116	S*****	10	10	10	10	10	10	10	0	20	0	20
117	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
118	S*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
119	T*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
120	T*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
121	V*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
122	W*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
123	W*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
124	W*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
125	W*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
126	W*****	10	10	10	10	10	10	10	9	20	72	92
127	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	5	20	40	60
128	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
129	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	8	20	64	84
130	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
131	Y*****	10	10	10	10	10	10	10	10	20	80	100
TOTAL		1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1107	2620	8856	11476
RATA-RATA		10	10	10	10	10	10	10	8.45	20	68	87.60

REKAPITULASI EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

No.	Nama	Nilai Post Test	Nilai Pre Test	Gap	Baseline/ Ceiling	N-Gain	Efektivitas Pembelajaran
1	A*****	6	4	2	6	0.33	33%
2	A*****	10	7	3	3	1.00	100%
3	A*****	10	2	8	8	1.00	100%
4	A*****	10	10	0	0		
5	A*****	10	9	1	1	1.00	100%
6	A*****	9	6	3	4	0.75	75%
7	A*****	9	9	0	1	0.00	0%
8	A*****	10	8	2	2	1.00	100%
9	A*****	10	10	0	0		
10	A*****	10	6	4	4	1.00	100%
11	A*****	5	4	1	6	0.17	17%
12	A*****	9	7	2	3	0.67	67%
13	A*****	9	6	3	4	0.75	75%
14	A*****	10	9	1	1	1.00	100%
15	A*****	7	8	-1	2	-0.50	-50%
16	B*****	7	4	3	6	0.50	50%
17	B*****	6	4	2	6	0.33	33%
18	B*****	10	4	6	6	1.00	100%
19	C*****	10	10	0	0		
20	C*****	10	6	4	4	1.00	100%
21	D*****	8	7	1	3	0.33	33%
22	D*****	5	6	-1	4	-0.25	-25%
23	D*****	10	9	1	1	1.00	100%
24	D*****	9	10	-1	0		
25	D*****	10	9	1	1	1.00	100%
26	D*****	10	6	4	4	1.00	100%
27	D*****	7	6	1	4	0.25	25%
28	D*****	10	8	2	2	1.00	100%
29	D*****	8	10	-2	0		
30	D*****	10	9	1	1	1.00	100%
31	D*****	5	7	-2	3	-0.67	-67%
32	D*****	10	8	2	2	1.00	100%
33	E*****	1	2	-1	8	-0.13	-13%
34	E*****	5	6	-1	4	-0.25	-25%
35	E*****	10	10	0	0		
36	E*****	8	9	-1	1	-1.00	-100%
37	F*****	10	10	0	0		
38	F*****	8	4	4	6	0.67	67%
39	F*****	10	5	5	5	1.00	100%
40	F*****	9	3	6	7	0.86	86%
41	F*****	10	9	1	1	1.00	100%
42	F*****	10	9	1	1	1.00	100%
43	G*****	10	8	2	2	1.00	100%
44	G*****	9	8	1	2	0.50	50%
45	G*****	8	7	1	3	0.33	33%
46	H*****	8	9	-1	1	-1.00	-100%
47	H*****	9	9	0	1	0.00	0%
48	H*****	10	7	3	3	1.00	100%
49	H*****	5	3	2	7	0.29	29%
50	H*****	6	7	-1	3	-0.33	-33%
51	I*****	10	0	10	10	1.00	100%
52	I*****	10	9	1	1	1.00	100%
53	I*****	10	10	0	0		
54	J*****	10	4	6	6	1.00	100%
55	J*****	10	9	1	1	1.00	100%

56	J*****	3	1	2	9	0.22	22%
57	J*****	6	6	0	4	0.00	0%
58	J*****	10	9	1	1	1.00	100%
59	K*****	10	9	1	1	1.00	100%
60	L*****	7	0	7	10	0.70	70%
61	L*****	10	10	0	0		
62	L*****	10	3	7	7	1.00	100%
63	L*****	10	9	1	1	1.00	100%
64	I*****	9	6	3	4	0.75	75%
65	L*****	9	7	2	3	0.67	67%
66	L*****	4	4	0	6	0.00	0%
67	L*****	10	2	8	8	1.00	100%
68	L*****	10	0	10	10	1.00	100%
69	M*****	6	5	1	5	0.20	20%
70	M*****	8	5	3	5	0.60	60%
71	M*****	6	5	1	5	0.20	20%
72	M*****	10	6	4	4	1.00	100%
73	M*****	7	6	1	4	0.25	25%
74	M*****	10	7	3	3	1.00	100%
75	M*****	10	6	4	4	1.00	100%
76	M*****	10	4	6	6	1.00	100%
77	M*****	10	10	0	0		
78	M*****	10	9	1	1	1.00	100%
79	M*****	9	3	6	7	0.86	86%
80	M*****	10	7	3	3	1.00	100%
81	M*****	4	8	-4	2	-2.00	-200%
82	M*****	10	2	8	8	1.00	100%
83	M*****	10	8	2	2	1.00	100%
84	M*****	10	4	6	6	1.00	100%
85	N*****	9	4	5	6	0.83	83%
86	N*****	10	10	0	0		
87	N*****	10	5	5	5	1.00	100%
88	N*****	10	10	0	0		
89	N*****	6	5	1	5	0.20	20%
90	N*****	10	7	3	3	1.00	100%
91	O*****	7	5	2	5	0.40	40%
92	O*****	9	7	2	3	0.67	67%
93	O*****	0	6	-6	4	-1.50	-150%
94	O*****	10	10	0	0		
95	P*****	10	5	5	5	1.00	100%
96	P*****	0	5	-5	5	-1.00	-100%
97	P*****	10	10	0	0		
98	P*****	10	5	5	5	1.00	100%
99	P*****	8	8	0	2	0.00	0%
100	R*****	3	4	-1	6	-0.17	-17%
101	R*****	10	10	0	0		
102	R*****	9	9	0	1	0.00	0%
103	R*****	10	8	2	2	1.00	100%
104	R*****	10	10	0	0		
105	R*****	7	4	3	6	0.50	50%
106	R*****	10	9	1	1	1.00	100%
107	R*****	10	6	4	4	1.00	100%
108	R*****	4	5	-1	5	-0.20	-20%
109	R*****	6	5	1	5	0.20	20%
110	r*****	2	1	1	9	0.11	11%
111	S*****	8	4	4	6	0.67	67%
112	S*****	10	9	1	1	1.00	100%
113	S*****	8	8	0	2	0.00	0%
114	S*****	9	7	2	3	0.67	67%
115	S*****	9	9	0	1	0.00	0%
116	S*****	0	5	-5	5	-1.00	-100%
117	S*****	10	8	2	2	1.00	100%

118	S*****	10	4	6	6	1.00	100%
119	T*****	10	10	0	0		
120	T*****	10	10	0	0		
121	V*****	10	5	5	5	1.00	100%
122	W*****	10	9	1	1	1.00	100%
123	W*****	10	10	0	0		
124	W*****	10	5	5	5	1.00	100%
125	W*****	8	10	-2	0		
126	W*****	9	3	6	7	0.86	86%
127	Y*****	5	1	4	9	0.44	44%
128	Y*****	10	10	0	0		
129	Y*****	8	8	0	2	0.00	0%
130	Y*****	10	5	5	5	1.00	100%
131	Y*****	10	10	0	0		
TOTAL		1107	869	238	441	58.73	5873%
RATA-RATA		8.45	6.63	1.82	3.37	0.54	53.88%

Catatan : Peserta yang telah mencapai nilai baseline maksimal (Nilai 10) pada tahap pretest akan dieliminasi dari perhitungan indikator ini. Hal ini dilakukan karena secara statistik peserta tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk peningkatan nilai (potential gain sebesar nol), sehingga keberadaan data tersebut dapat mendistorsi nilai rata-rata efektivitas secara keseluruhan.

TINGKAT KEPUASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

NO	NAMA	SARAN	UNSUR KOMPETENSI							UNSUR KEMUDAHAN PERSYARATAN	UNSUR WAKTU	UNSUR PENGADUAN DAN SARAN	UNSUR PROSEDUR		UNSUR PRODUK	UNSUR BIAYA	Indeks Kualitas Layanan Substansi Pembelajaran	Indeks Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pembelajaran	Rata-Rata
			Materi yang diberikan mudah dipahami	Materi berupa PowerPoint mudah dipahami	Materi yang diberikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	Materi relevan dengan tujuan pendidikan	Soal review per materi mampu mengukur pemahaman peserta	Soal post test mampu mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah diberikan	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif dan mudah dipahami (yang dikemas dalam bentuk video)	Persyaratan peserta untuk mengikuti pendidikan di MKLC mudah untuk dipenuhi	Peserta dapat mengikuti pendidikan di MKLC dengan waktu yang lebih fleksibel	Halo MKLC memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat	Panduan penggunaan MKLC memberikan penjelasan yang komprehensif	QnA di menu 'AðBantuan' dapat memberikan solusi bagi peserta untuk memahami prosedur mengikuti pendidikan di MKLC	MKLC dapat diakses dengan mudah	Kegiatan pendidikan di MKLC tidak memungut biaya apapun			
1	A*****	terobosan yang bagus untuk edukasi masyarakat luas...lanjutkan dan kembangkan	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3.57	3.71	3.64
2	A*****	bisa membuka kegiatan ini bagi lebih banyak kelompok masyarakat.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3.71	3.71	3.71
3	A*****	tetap menjalankan fungsi sebagaimana mestinya	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3.00	3.14	3.07
4	A*****	Jika dimungkinkan dapat dilaksanakan kembali bagi rekan-rekan yang belum sempat menyelesaikan tugas di MKLC	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
5	A*****	Tidak ada	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3.71	3.71	3.71
6	A*****	sudah sangat baik semoga kedepan bisa materi bisa diakses via smartphone	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
7	A*****	Perlu diperluas kepada berbagai kalangan, terutama para pemuda dan pemuda Indonesia.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
8	A*****	melalui mklc masyarakat harus paham tentang ideologi negara agar penegak dapat berjalan tanpa semena-mena	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
9	A*****	Kegiatan ini sudah sangat bagus dengan materi dan pemateri yang sangat luar biasa sehingga dapat menambah pengetahuan peserta untuk mengetahui hak-haknya sebagai warga negara serta kewenangan dan proses pengajuan Permohonan di MK.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
10	A*****	kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi warga negara untuk dapat memahami tentang konstitusi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.00	3.14	3.07
11	A*****	Saran,dalam bentuk Video beberapa materi tidak di tampilan	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
12	A*****	Semakin ditingkatkan untuk ilmu pengetahuan terbaru khususnya untuk informasi masyarakat dalam proses pengajuan permohonan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
13	A*****	Tidak ada	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3.57	3.57	3.57
14	A*****	Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat serta dapat memberikan pemahaman yang mendalam terutama dalam aspek pengetahuan tentang mahkamah konstitusi dan dapat di pergunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3.86	3.29	3.57
15	A*****	Kegiatan ini sangat bagus dengan sistem sepenuhnya dengan memanfaatkan teknologi sangat mudah dan ini menjadi percontohan penggunaan teknologi kedepannya, perlu memasuki dunia akademi sebagai mitra pealtihan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
16	B*****	Bentuk Komunitas Mahkamah Konstitusi, Ngopi bareng Hakim MK	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.71	4.00	3.86
17	B*****	Berikut adalah kritik dan saran terhadap kegiatan PPHKWN GAMKI yaitu : 1. Kritik Materi yang disampaikan masih bersifat umum, lebih sering mengacu pada UUD sehingga metode penyampaian masih bersifat konvensional. 2. Saran Materi disetiap pembahasan berkaitan dengan hak konstitusional ajaran iman Kristen yaitu mengarah kepada cara saling menghormati hak orang lain dan kebebasan serta hak menyampaikan pendapat. Pemahaman ini bertujuan agar menjaga kerukunan antar umat beragama. Intinya adalah agar GAMKI tidak hanya memahami hak konstitusional sebagai teks hukum, tetapi menjadikannya pedoman hidup untuk membangun karakter pemimpin muda yang paham hukum, beriman dan cinta tanah air.	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3.29	3.43	3.36
18	B*****	Bagus sekali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00

19	C*****	Saya sangat senang dengan sistem digitalisasi pendidikan yang dibangun oleh MK untuk mendorong peningkatan kesadaran pendidikan konstitusional. hanya saja terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan sesuai pengalaman saya selama menggunakan platform ini sebagai berikut : 1. platformnya harus lebih di maksimalkan dengan lebih fleksibel agar bisa di terapkan pada berbagai perangkat sehingga bisa diakses oleh berbagai kalangan kapanpun dan dimanapun. 2. selain itu tampilan Antarmuka (UI/UX) yang Kaku, Kurang ada ruang untuk diskusi mendalam yang dinamis. 3. Platform sering kali mengalami kelambatan (lag) atau bahkan tumbang (crash) ketika diakses secara massal dalam waktu bersamaan misalnya saat pendaftaran program Bimbingan Teknis (Bimtek) baru saja dibuka terutama saat proses verifikasi email. 4. Pembelajaran cenderung bersifat satu arah. Pengguna biasanya hanya diminta menonton video prarekaman, membaca dokumen PDF, dan mengerjakan kuis pilihan ganda. Kurang ada ruang untuk diskusi mendalam yang dinamis. Saran saya : 1. Terapkan Gamifikasi: Gunakan sistem poin, level, dan lencana (badges) untuk meningkatkan motivasi belajar pengguna. 2. Fokus Mobile-First: Kembangkan aplikasi Android/iOS dengan fitur download materi untuk akses offline di daerah minim sinyal. 3. Hadirkan Pembelajaran Interaktif: Integrasikan fitur live webinar dan forum diskusi aktif, bukan sekadar menonton video satu arah. 4. Personalisasi berbasis AI: Gunakan teknologi AI untuk merekomendasikan materi hukum secara otomatis sesuai minat pengguna. Semoga saran ini bisa menjadi pertimbangan untuk platform MKLC menjadi lebih baik kedepannya. Salam hormat dan	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3.71	3.86	3.79
20	C*****	Sosialisai kegiatan belum menjangkau seluruh kader GAMKI di daerah sehingga partisipasi peserta dari cabang-cabang masih kurang merata dan belum banyak pembahasan mengenai isu-isu aktual seperti netralitas ASN, politik uang, hak konstitusional pemilih, dan penyelesaian sengketa pemilu yang dekat dengan realitas masyarakat.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4.00	3.86	3.93	
21	D*****	luar biasa bagi warga NRI	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3.57	3.86	3.71	
22	D*****	Secara umum, materi pelatihan sudah disajikan dengan baik dan variatif namun perlu ditambah dengan infografis agar lebih menarik. Selain itu, perlu disediakan forum diskusi atau sesi tanya jawab yang aktif sehingga peserta dapat berinteraksi dan mendapatkan insight baru dengan lebih cepat. Dengan masukan tersebut, diharapkan pelatihan ke depannya menjadi lebih mmenarik.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	
23	D*****	Kalau bisa materi pawer pointnya dibuat lebih kaya isi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	
24	D*****	tidak ada	3	3	4	4	3	4	2	3	4	3	3	3	4	3.29	3.43	3.36	
25	D*****	Kritik.> - Materi yang disampaikan masih terlalu teoritis dan kurang dikaitkan dengan realitas sehari-hari. - Diskusi belum cukup memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman pribadi terkait pelaksanaan hak konstitusional. - Waktu kegiatan relatif singkat sehingga beberapa topik penting tidak dibahas mendalam. Saran > - Menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang (akademisi, praktisi hukum, aktivis masyarakat) agar perspektif lebih kaya. - Menambahkan simulasi kasus atau role-play tentang pelaksanaan hak konstitusional dalam kehidupan berbangsa. - Membuat kelompok diskusi kecil agar peserta lebih aktif dan berani menyampaikan pendapat. - Menyediakan materi tertulis atau modul digital yang bisa dipelajari kembali setelah kegiatan. - Mengintegrasikan isu-isu aktual (misalnya kebebasan berpendapat, hak berorganisasi, hak atas pendidikan) agar lebih relevan dengan konteks generasi muda.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	1	3	3	3.00	3.00	3.00
26	D*****	THANK YOU VERY MUCH AND GOD BLESS US. AMEN	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4.00	3.71	3.86
27	D*****	Tidak ada MK harus tetap jadi menjaga integritasnya agar konstitusi tetap menjadi dasar negara ini	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	
28	D*****	sangat berguna bagi pembelajaran hukum bagi masyarakat awam khususnya anak sekolah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	
29	D*****	Rutin untuk diadakan pelatihan untuk selanjutnya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	
30	D*****	Saran : MKLC dapat diperluas lagi bagi semua kalangan, baik siswa maupun mahasiswa dan masyarakat umum, terima kasih.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	
31	D*****	Baik Sekali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00	
32	D*****	sangat memuaskan namun kedepannya bisa menjangkau masyarakat lebih luas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	
33	E*****	Kita bisa belajar Pancasila dengan baik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	
34	E*****	sudah cukup baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00	
35	E*****	Semoga kegiatan ini tetap berlanjut. Karena sangat membantu pihak yang awam mengenai hak-hak konstitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00	

36	E*****	terima kasih atas setiap materi yang menambah wawasan saya, semoga kedepannya lewat kegiatan ini tidak berakhir lewat materi atau sertifikat tapi mungkin lebih lanjut adanya tatap muka atau kegiatan secara langsung bukan online agar dengan mudah para peserta bisa menerima dan mempraktekannya, terima kasih	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3.43	3.86	3.64
37	F*****	Perbaikan sistem websitenya	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3.57	3.86	3.71
38	F*****	Agar Kegiatan ini dapat di pertahankan setiap Tahunnya untuk sarana Pembelajaran dan Edukasi kepada Masyarakat Indonesia dengan melalui Lembaga Organisasi Masyarakat, dan dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Pembina DPC GAMKI Kota Singkawang menyampaikan terimakasih kepada Ketua MK Republik Indonesia bersama jajarannya yang telah menyelenggarakan Kegiatan PPHKWN, Salam dari FERYANTO HB, SH, MH, NLP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
39	F*****	MKLC sudah sangat baik, akses yang sederhana mempermudah peserta untuk menggunakan MKLC ini. materi pembelajaran sangat baik dan mudah dipahami. di tungguu pembelajaran berikutnya. mungkin nanti dilaksanakan praktek langsung di MK.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
40	F*****	Jika peserta telah mengikuti materi maka peserta diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti materi selanjutnya (lainnya) terima kasih	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
41	F*****	Sebaik nya glat seperti ini lebih masuk dalam lingkungan sekolah agar para siswa mulai melek tentang hukum	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3.00	2.71	2.86
42	F*****	Teruslah Berkembang Lebih Baik Lagi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
43	G*****	sangat bagus dan bermanfaat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
44	G*****	Keren dan Lanjutkan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
45	G*****	MK Semakin jaya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
46	H*****	terus pertahankan dan tingkatkan kualitas pembelajaran, Terima kasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
47	H*****	lebih diperluas pada berbagai segmen masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam mulai dari terendah hingga yang tertinggi demikian pula dengan berbagai organisasi profesi	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3.86	3.86	3.86
48	H*****	Semoga kedepan ada lagi materi terkait dengan MKLC untuk meningkatkan pemahaman lebih lanjut.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
49	H*****	Materi online berguna buat publik... Harusnya jadi pengetahuan umum	3	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3.43	3.29	3.36
50	H*****	Semoga layanan cs cepat merespon terkait kendala	3	3	3	4	3	4	3	3	4	2	3	3	4	4	3.29	3.29	3.29
51	J*****	Proses Pembelajaran yang saya lakukan sangat menambah wawasan saya, dan yang perlu ditingkatkan ialah perlunya disediakan media atau tempat untuk berdiskusi terkait pembelajaran yang sedang kita ikuti. Terima Kasih atas segala ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3.57	3.57	3.57
52	J*****	Aplikasi atau webnya lebih diperbaiki lagi.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
53	J*****	Saya sangat senang mendapat ilmu baru	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.14	3.29	3.21
54	J*****	Sebaiknya sesi materi melalui pemaparan langsung pemateri kepada peserta secara online dapat lebih diperbanyak lagi, bisa sesuai dengan setiap bagian materi (1-9). Pada materi Teknik Penyusunan Permohonan, dapat dibuat secara lebih interaktif antara peserta dan pemateri. Tapi selebihnya kegiatan ini sangat bermanfaat. Bravo MK.	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3.71	3.71	3.71
55	J*****	Mantap, agar terus dikembangkan. Sangat bermanfaat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
56	J*****	Saran : Diharapkan Kedepannya Kegiatan Ini bisa ada lagi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4.00	3.86	3.93
57	J*****	Lebih ditingkatkan lagi	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
58	J*****	sangat membantu masyarakat yang selama ini memiliki kendala untuk lebih mengenal konstitusi yang ada di Indonesia. semakin jaya dan selalu membela yang benar	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3.71	3.86	3.79
59	K*****	Mantap MKLC, sukses terus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
60	L*****	karna pembelajaran ini sangat bermakna bagi masyarakat, harapanya program ini di jalankan juga untuk setara sma	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.57	4.00	3.79
61	L*****	Terus lakukan dan kembangkan pendidikan seperti ini untuk generasi bangsa.	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3.29	3.43	3.36
62	L*****	pendidikan ini sangat memberikan dampak positif dan banyak pengetahuan yang belum saya pahami menjadi paham terkait hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam melakukan uji materi ke MK.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3.86	3.86	3.86
63	L*****	Semoga ini bisa di pertahankan dan kalo bisa materi untuk belajar mandiri di kurangi ya pak/Bu. Terimakasih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
64	J*****	Semoga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Terimakasih	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.29	3.29	3.29

65	L*****	Kritik: >>Akses Video Kurang Fleksibel: Berbeda dengan PDF yang bisa diunduh, materi video wajib diputar di platform sehingga menguras kuota internet dan menyulitkan peserta yang berada di area sinyal tidak stabil. >>Beban Materi Padat: Volume materi yang diberikan dalam waktu 2 minggu sangat besar, sehingga waktu untuk mencerna seluruh modul secara berkualitas terasa terbatas. Saran: >>Pertahankan Fitur Unduh PDF: Fasilitas unduh modul PDF sudah sangat baik dan sangat membantu peserta untuk belajar mandiri secara luring (offline). Mohon fitur ini terus dipertahankan. >>Pertahankan Durasi Video: Durasi video yang ada saat ini (10-20 menit) sudah sangat pas, ideal, dan tidak membuat jenuh. Mohon format durasi pendek ini dipertahankan. >>Ops Unduh/Pilihan Resolusi Video: Menyediakan opsi unduh video atau pilihan resolusi (misal: 360p atau 480p) agar lebih hemat kuota dan lancar diputar di jaringan yang lambat.	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3.57	3.57	3.57
66	L*****	Terimakasih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.00	3.14	3.07
67	L*****	Server MKLC kadang lambat dan error saat diakses. Harap bisa lebih dikembangkan lagi sistemnya agar bisa diakses secara baik dan dapat diakses menggunakan handphone. Dalam mengikuti Pendidikan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara ini merupakan langkah baik, memberikan dampak positif bagi saya pribadi, apalagi dengan adanya sistem MKLC. Diharapkan kedepannya pendidikan seperti ini dapat diakses oleh masyarakat secara umum, tidak terbatas pada organisasi atau instansi tertentu. Pemahaman tentang konstitusi adalah hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara. Dengan adanya platform MKLC ini, Mahkamah Konstitusi punya peluang besar untuk dapat mengedukasi masyarakat, terlebih yang ada di tempat terpencil. Dan juga pendidikan seperti ini tidak hanya terbatas sampai di sini, sangat diharapkan untuk terus berlanjut.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
68	L*****	Proses mendaftar menjadi kendala sekalipun ada tutorial nya kemudian beberapa materi Bagus untuk dijadikan bahan pegangan semoga kedepannya saya bisa mengikuti kegiatan berikutnya terkait dengan MKLC	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	2.71	3.29	3.00
69	M*****	Keseluruhan bagus, cuma kalau bisa kedepannya untuk tes dapat menggunakan akses handphone, tidak fokus ke laptop, karena tidak setiap hari laptop di bawa kemana kemana.	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3.71	3.71	3.71
70	M*****	Tidak ada kritik. Saran saya yakni terus mengedukasi masyarakat dalam berbagai cara dan bentuk guna tercapainya tujuan nasional	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
71	M*****	Semoga MK dapat menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain juga agar informasi tentang keberadaan dan tujuan dibentuknya MK	3	3	4	2	2	3	4	3	4	3	3	4	2	4	3.00	3.29	3.14
72	M*****	semua sudah baik, lanjutkan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
73	M*****	Agar ke depan pembelajaran PPHKWN ini dapat lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat dengan bukti konkret yang dapat masyarakat praktekkan di lingkungan sekitarnya	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3.71	3.71	3.71
74	M*****	Saran : Lebih banyak mengadakan pelatihan dan pembelajaran seperti ini guna menambah wawasan dan ilmu yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan. Usul juga untuk mengadakan pelatihan secara offline guna mempermudah dalam penyampaian materi dan evaluasi apabila dilakukan pembelajaran luring. Terimakasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
75	M*****	Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan sebagai peserta. Sangat menarik, walaupun secara pribadi saya beberapa bagian terasa sulit dipahami. Namun, dapat solusi dengan cara mengulangi bagian yang tidak dapat langsung dipahami. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
76	M*****	Bagus dan mendidik	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3.57	3.86	3.71
77	M*****	Peserta untuk MKLC lebih diperluas lagi, agar pemahaman warga negara terkait Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lebih baik dan lebih luas cakupannya.	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3.71	3.86	3.79
78	M*****	setiap video materi agar durasinya tidak terlalu panjang sehingga penjelasannya lebih mudah dipahami	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.71	4.00	3.86
79	M*****	Secara utuh materi ringkasan penempatan materi sangat baik namun untuk materi dalam bentuk video mohon menggunakan gaya komunikasi standar masyarakat agar lebih mudah dipahami. terima kasih	3	3	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4	3.43	3.71	3.57
80	M*****	semoga bisa pendidikan secara offline di gedung MK	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
81	M*****	Semoga kegiatan kerja sama ini dengan GAMKI terus berlanjut, sebab masih banyak kader yang juga belum bisa ikut serta di kegiatan ini.	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3.86	3.57	3.71
82	M*****	Mengadakan edukasi hukum dan konstitusi sampai ke sekolah dan daerah terpencil.	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	1	3.86	3.14	3.50

83	M*****	Kiranya Peserta dapat diundang Ke Ruang Sidang MK untuk merasakan suasana Sidang MK yang konon katanya membuat orang gugup ketika dimintai Kesaksian dan menunggu pembacaan putusan Hakim MK	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3.71	3.71	3.71
84	M*****	Aras saya, kalo Bisa semua materi itu di sampaikan dalam bentuk video saja karena mudah di mengerti	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3.86	3.29	3.57
85	N*****	Sangat membantu	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4.00	3.14	3.57
86	N*****	Semua materi dan pematerinya mantap, gampang dimengerti. Awalnya tidak suka belajar tentang hukum, sekarang jadi suka belajar tentang hukum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
87	N*****	Secara pribadi sangat mengapresiasi yang tinggi terhadap inisiasi kegiatan menarik dan menambah wawasan terhadap konstitusi dasar dan nilai-nilai negara kita. Terimakasih	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3.43	3.57	3.50
88	N*****	Sangat menyenangkan...	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.14	3.29	3.21
89	N*****	Lumayan untuk menambah wawasan, materi seperti ini yang memang perlu lebih di kembangkan dan pesertanya generasi muda.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
90	N*****	Mantap	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
91	O*****	Terimakasih untuk sistem pembelajaran yg telah di desain sedemikian rupa untuk dapat membantu setiap peserta dalam memahami materinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kami (warga negara) dalam kehidupan berbangsa & bernegara. Ora Et Labora. Cinta TUHAN, Cinta Nusa Bangsa. Jayapura - Papua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
92	O*****	bagus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
93	O*****	SEMAKIN LEBIH BAIK	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
94	O*****	Terus mengadakan kegiatan kegiatan pendidikan seperti ini	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3.29	3.43	3.36
95	P*****	kegiatan ini sangat berguna bagi anak bangsa, mohon terus di kerjasamakan dengan lembaga lainnya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
96	P*****	Kami berharap mklc.mki berkesinambungan spy utuh pengajarannya dan pendalaman kami.	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3.71	3.71	3.71
97	P*****	lanjutan	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.86	4.00	3.93
98	P*****	pendidikan ini sangat berguna bagi kami kaum awam untuk memahami hak dan kewajiban kami dalam sisi konstitusi setiap pertanyaan memiliki pernyataan yang cukup membosankan, Namun dengan pernyataan yang mendalam memberikan pemahaman yang baik tentang MK terhadap masyarakat Indonesia, Sekian Kritik dan saran dari saya, Terima Kasih atas Partisipasinya	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3.00	3.71	3.36
99	P*****	Sudah baik lebih giat lagi untuk dipertahankan nilai kebaikan ini. Terimakasih	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3.29	3.29	3.29
100	R*****	Sudah baik lebih giat lagi untuk dipertahankan nilai kebaikan ini. Terimakasih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
101	R*****	Sebaiknya Kegiatan seputar Mahkamah Konstitusi lebih sering dilakukan, agar masyarakat dapat memahami apa sebenarnya tujuan di bentuknya Mahkamah Konstitusi dan ranahnya ke arah mana, agar kedepannya masyarakat turut merasakan dampak adanya mahkamah konstitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
102	R*****	Maju terus Mahkamah Konstitusi dalam mengedukasi melalui pembelajaran PPHKWN dan program lainnya seperti Bimtek MK. Salus populi suprema lex esto!	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
103	R*****	materi sangat bermanfaat dan mudah dipahami untuk masyarakat sipil	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
104	R*****	Tidak ada, menurut saya semua sudah baik.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
105	R*****	Kegiatan ini terus di laksanakan	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.71	4.00	3.86
106	R*****	MK tetap menjadi lembaga penjaga marwa konstitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
107	R*****	Materi jangan bisaa langsung di skip	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3.71	3.43	3.57
108	R*****	setiap materi yang di sampaikan sangat bagus dan sangat bagus pematerinya sangat kompeten, hanya kendalanya tidak berdiskusi secara langsung, power poit yang share sangat bagus hanya kurang memadai jika kami yang baca sendiri dan menafsirkan sendiri, tetapi jika di dengar langsung seperti biasa nya jauh lebih efektif dan efisien.	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3.14	3.00	3.07
109	R*****	Semoga MK terus maju dan berintegritas	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3.43	3.57	3.50
110	R*****	Terimakasih atas materinya, semoga kedepan lebih baik.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.00	3.29	3.14
111	S*****	PORTAL MKLC SANGAT MUDAH UNTUK DIKUTI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
112	S*****	MK Keren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4.00	3.86	3.93
113	S*****	Pendidikan seperti ini perlu untuk terus dilaksanakan karena menambah pemahaman peserta.. Terima kasih Mahkamah Konstitusi..	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
114	S*****	Terimakasih atas pengajaran yang diberikan hal ini sangat berguna bagi kami dalam memahami dan lebih mencintai Negara Indonesia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
115	S*****	Tampilan slide materi pada media tidak dapat di lihat dgn utuh, namun penjelasan dari para pemateri dapat di pahami dengan baik. Saran, untuk tampilan slide dapat di perbaiki sehingga dapat di tampilkan secara utuh dan dapat di pahami dgn baik oleh peserta.	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3.71	3.57	3.64

116	S*****	kiranya peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dapat difasilitasi untuk mengimplementasikan pada komunitas bagi GAMKI dll untuk menularkan informasi dan pengetahuan yang penting dan bermanfaat ini bagi masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
117	S*****	Terima kasih atas materi yang telah diberikan. Kiranya ke depan MKLC lebih aktif lagi membangun kerjasama dengan kampus-kampus dan Ormas demi mamaksimalkan pengetahuan warga negara terhadap konstitusi negara Indonesia dan akan semakin tinggi kecintaannya terhadap undang-undangan dan peraturan yang berlaku. Terima kasih.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.71	4.00	3.86
118	S*****	Lanjutan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
119	T*****	Tidak ada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
120	T*****	Terima kasih atas Materi-materi yang telah diberikan dalam MKLC ini, sangat membantu untuk memahami dinamika di Indonesia Teruslah berinovasi, salam Konstitusi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
121	Y*****	Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya dari kami GAMKI Papua kepada Pimpinan dan Jajaran PUSDIK MK / MKLC, boleh memberikan kesempatan untuk belajar lebih memahami tentang hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Jayalah & sukses selalu, Ora Et Labora! DPD GAMKI PAPUA.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
122	W*****	Semua sangat Bagus dan sesuai, harapan Lebih banyak lagi Materinya.	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4.00	3.71	3.86
123	W*****	sedikit saran Boleh gabungkan materi dengan studi kasus, simulasi, atau diskusi kelompok.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
124	W*****	Saat review jawaban yang salah masih ada Coding menyatu dengan narasi seperti </p>. selebihnya sangat membelajarkan materi2 tersebut.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
125	W*****	terus tingkatan kualitas dan pelayanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
126	W*****	SEMOGA DENGAN MENGIKUTI PELATIHAN MKLC TIDAK BERHENTI DAN HAL HAL LANJUTAN UNTUK KEGIATAN SEPERTI INI DAN JUGA PESERTA YANG MENGIKUTI MKLC DAPAT DIBERDAYAKAN MENJADI FUNGSIONAL DAN PERPANJANGAN TANGAN DARI MK... TERIMAKASIH, TUHAN YESUS MEMBERKATI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
127	Y*****	mklc sangat bermanfaat, khususnya bagi kami Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.00
128	Y*****	Lanjutan	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4.00	3.86	3.93
129	Y*****	Terimakasih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	3.00	3.00
130	Y*****	bisa di kembangkan lagi dengan sangat muda dan fleksibel dan bisa dipahami masyarakat awam suke MKLC. salam Pancasila	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3.71	3.71	3.71
RATA-RATA INDIKATOR			3.59	3.62	3.76	3.72	3.67	3.67	3.60	3.68	3.76	3.57	3.66	3.55	3.75	3.80			
RATA-RATA UNSUR			3.66							3.68	3.76	3.57	3.61		3.75	3.80	3.66	3.70	3.68



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA

NOMOR : 28/PK/2026

NOMOR : 121372/SU-GAMKI/EXT/B/V/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan April, tahun Dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sahat M.P. Sinurat, S.T., M.T.**, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, berkedudukan di Jl. Cirebon No 17, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia 10310, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

[Handwritten signature]

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia pada hari Senin, 18 Mei 2026 s.d. Jumat, 05 Juni 2026 menggunakan metode *blended learning* secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* MKLC.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan platform *e-learning* MKLC, bahan ajar, serta Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
- e. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar menuntaskan seluruh rangkaian pembelajaran di MKLC pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.

[Signature]

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150-300 orang sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.
- b. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar menuntaskan seluruh rangkaian pembelajaran di MKLC pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 11 Mei 2026.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 11 Mei 2026.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ditutup.

[Signature]

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA METERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea meterai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

#8#

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat

Pls Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *h*

PIHAK KEDUA,
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia



Sahat M.P. Sinurat, S.T., M.T.
Ketua Umum

LAPORAN KEUANGAN
PPHKWN bagi GAMKI
(077.01.BJ.4246.QDC.001.051.0A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo	Honor Narasumber Pembukaan	Rp 1,700,000
2	Enny Nurbaningsih	Honor Narasumber Materi	Rp 3,400,000
3	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber Materi	Rp 6,800,000
TOTAL			Rp 11,900,000